

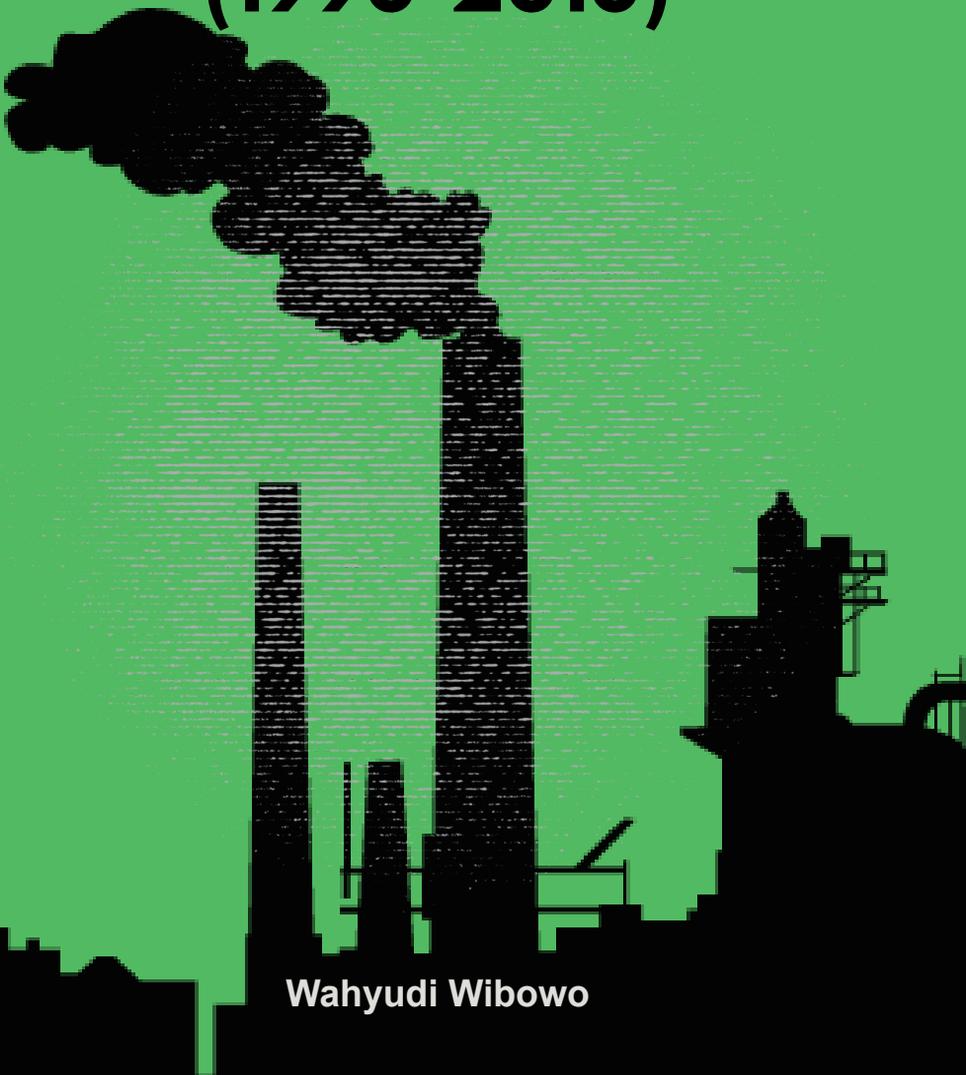


Pustaka Aksara

Gelombang Modal Asing dan Daya Saing Industri

Pada Dua Dekade Bergejolak

(1990-2010)



Wahyudi Wibowo

**GELOMBANG MODAL ASING
DAN DAYA SAING INDUSTRI
PADA DUA DEKADE BERGEJOLAK
(1990-2010)**

Wahyudi Wibowo



Pustaka Aksara

**GELOMBANG MODAL ASING DAN DAYA SAING
INDUSTRI PADA DUA DEKADE BERGEJOLAK
(1990-2010)**

Penulis : Wahyudi Wibowo
Desain Sampul : Camellian R. R.
Tata Letak : Silviera Elsa

ISBN : 978-623-161-345-5

Diterbitkan oleh : **PUSTAKA AKSARA, 2024**

Redaksi:

Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Telp. 0858-0746-8047

Laman : www.pustakaaksara.co.id

Surel : info@pustakaaksara.co.id

Anggota IKAPI : 277/JTI/2021

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Profesor Jeon Yongbok, International Trade and Commerce Department, College of Commerce and Economics, Kyungsoong University, Korea Selatan, atas kontribusi pemikiran dan motivasi berharga selama proses kajian ini.

Ucapan terima kasih mendalam juga ditujukan kepada keluarga penulis. Perjalanan penulisan yang panjang ini tidak akan tuntas tanpa dukungan mereka. Terakhir, karya ini penulis dedikasikan bagi bangsa Indonesia yang terus bergerak maju membangun daya saing negeri.

PRAKATA

Dalam empat dekade terakhir, Indonesia dan negara berkembang lainnya semakin bergantung pada investasi asing. Berbagai kebijakan dikeluarkan untuk menarik masuknya investasi asing, dengan harapan akan membawa dampak positif bagi perekonomian. Namun, penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut tidaklah teruji.

Buku ini mengkaji dampak investasi asing terhadap output dan produktivitas sektor manufaktur Indonesia pada dua dekade penuh gejolak, yakni periode 1990-2010. Periode ini menarik perhatian karena mencakup masa kejayaan sektor manufaktur Indonesia maupun masa kemundurannya setelah krisis moneter 1997-1999.

Setelah menggarisbawahi pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perkembangan pesat perdagangan dan investasi internasional pasca Perang Dunia Kedua, buku ini menyoroti kompleksitas pola investasi asing dan beragam dampaknya pada negara-negara berkembang. Kajian empiris digunakan untuk menganalisis dampak-dampak tersebut pada sektor manufaktur Indonesia.

Secara umum, hasil kajian dalam buku ini menemukan bahwa dampak positif investasi asing terhadap kinerja sektor manufaktur Indonesia tidaklah kuat. Selain itu, liberalisasi perdagangan ternyata membuka lebih banyak dampak positif bagi perusahaan-perusahaan asing ketimbang perusahaan-perusahaan domestik.

Berbeda dengan pandangan umum bahwa jenis investasi asing tertentu, seperti investasi yang menyoar efisiensi biaya produksi (*efficiency-seeking*), akan membawa dampak positif yang lebih besar pada produktivitas negara penerima investasi, buku ini menawarkan perspektif baru.

Jenis investasi asing tidak selalu menentukan dampak positif yang diharapkan, terutama jika hubungan rantai pasok vertikal antara perusahaan asing dan domestik rendah.

Hasil kajian dalam buku ini juga menegaskan bahwa dampak positif investasi asing akan ditentukan oleh kapasitas penyerapan (*absortive capacity*) negara penerima. Dengan kata lain, karakteristik negara penerima seperti tingkat pendidikan, kemampuan R&D, serta aspek-aspek kelembagaan turut menentukan kualitas dampak-dampak investasi asing.

Oleh karena itu, buku ini mengajak para pembuat kebijakan dan pelaku industri di Indonesia untuk mengevaluasi kembali strategi pembangunan yang berorientasi pada penerimaan modal asing. Strategi ke depan sebaiknya lebih fokus pada pengembangan rantai pasok antara perusahaan asing dan domestik. Agenda penting lainnya meliputi peningkatan kemampuan SDM dan penguasaan teknologi perusahaan domestik, penguatan aspek kelembagaan, serta sinergi kebijakan di sektor perdagangan, investasi, dan industri.

Buku ini disusun didasarkan pada penelitian yang dilakukan penulis untuk disertasi doktoral di International Trade and Commerce Department, Kyungsoong University, Korea Selatan. Banyak pihak telah berkontribusi dalam penyelesaian buku ini.

Selamat membaca. Semoga buku ini dapat memperkaya wacana tentang peran investasi asing dalam pembangunan nasional. Kritik dan saran sangat diharapkan.

Surabaya, Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

Ucapan Terima Kasih.....	iii
Prakata.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Lampiran	ix
Daftar Singkatan	x
Bab 1.	
Pengantar.....	1
1.1 Arus modal global di negara-negara berkembang..	1
1.2 Hitam putih dampak modal asing	10
Bab 2.	
Investasi Asing di Indonesia.....	32
2.1 Liberalisasi investasi dan perdagangan	32
2.2 Arus investasi asing pada sektor manufaktur.....	46
Bab 3.	
Dampak Investasi Asing	64
3.1 Beberapa kajian empiris.....	64
3.2 Perusahaan asing vs perusahaan domestik	85
Bab 4.	
Penutup.....	96
4.1 Meraup limbah produktivitas	96
4.2 Implikasi kebijakan dan agenda masa depan.....	104
Lampiran.....	111
Referensi.....	120
Tentang Penulis	132

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Persetujuan FDI dan Kehadiran FDI Manufaktur, 1970-2003	49
Tabel 2.	Realisasi Inward FDI di Sektor Manufaktur Indonesia, 1990-2010	51
Tabel 3.	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Sektor Manufaktur Indonesia Tahun 1990-2010 .	52
Tabel 4.	Tren Kehadiran FDI di Sektor Manufaktur Indonesia, 1990-2010	52
Tabel 5.	Perdagangan Intra-regional di Asia Timur, 1990 dan 2001	57
Tabel 6.	Aliran Masuk FDI Intra-Regional di Asia Timur, 1990-2000.....	59
Tabel 7.	Klasifikasi ISIC pada Manufaktur Indonesia	83
Tabel 8.	Struktur Data: berdasarkan tahun	84
Tabel 9.	Struktur Data: menurut industri	85
Tabel 10.	Perusahaan Asing vs. Perusahaan Domestik	89
Tabel 11.	Limpahan FDI pada Nilai Tambah: Model Efek Tetap.....	94
Tabel 12.	Limpahan FDI terhadap Produktivitas Faktor Total: Model Efek Tetap	94
Tabel 13.	Limpahan FDI pada Nilai Tambah: Model Efek Acak.....	95
Tabel 14.	Limpahan FDI terhadap Produktivitas Faktor Total: Model Efek Acak	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkembangan ekspor barang global (<i>merchandise trade as percentage of GDP</i>), 1960-2022 (%)	3
Gambar 2. Perkembangan arus investasi asing global (<i>net FDI inflows</i>), 1970-2022 (triliun, US\$).	5
Gambar 3. Rasio Aliran Masuk FDI terhadap PDB dan GCF di Indonesia, 1970-2008.	47
Gambar 4. Impor Barang Menengah Sektor Manufaktur Indonesia, 1970-2010.....	99

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1:	Ringkasan studi empiris mengenai dampak FDI di negara berkembang.....	111
Lampiran 2:	Ringkasan studi empiris mengenai dampak FDI di Indonesia.....	117

DAFTAR SINGKATAN

AANZFTA	: ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area
ACFTA	: ASEAN-China Free Trade Agreement
AEC	: ASEAN Economic Communities
AFTA	: ASEAN Free Trade Area
AIA	: ASEAN Investment Area
AIFTA	: ASEAN-India Free Trade Area
AJCEP	: ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership
AKFTA	: ASEAN-Korea Free Trade Area
APEC	: Asia-Pacific Economic Cooperation
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BPS	: Badan Pusat Statistik
CEPT	: Common Effective Preferential Tariffs
CIS	: Commonwealth of Independent States
EPZ	: Export Processing Zone
EU	: European Union
FDI	: Foreign Direct Investment
GATT	: General Agreement on Tariffs and Trade
GCF	: Gross Capital Formation
GDP	: Gross Domestic Product
GNI	: Gross National Income
GNP	: Gross National Product
GSP	: Generalized System of Preferences
IBRA	: Indonesian Banking Restructuring Agency
IMF	: International Monetary Fund
JIEPA	: Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement
M&A	: Merger and Acquisition
MFN	: Most Favored Nation

MNC	: Multinational Corporation
MNE	: Multinational Enterprise
NIE	: Newly Industrialized Economies
OECD	: Organization for Economic Cooperation and Development
PTA	: Preferential Trade Agreement
SWI	: Sachs-Warner Index
TBI	: Trade Bias Index
TFP	: Total Factor Productivity
TNC	: Transnational Corporations
TRIMs	: Trade Related Investment Measures
TRIPs	: Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
UNCTAD	: United Nations Conference on Trade and Development
UNDP	: United Nations Development Programme
UNSO	: United Nations Statistical Office
WTO	: World Trade Organization

**GELOMBANG MODAL ASING
DAN DAYA SAING INDUSTRI
PADA DUA DEKADE BERGEJOLAK
(1990-2010)**

Wahyudi Wibowo

BAB 1

PENGANTAR

1.1 Arus modal global di negara-negara berkembang

Globalisasi telah menjadi mesin penggerak interaksi ekonomi antar negara sejak abad ke-19. Globalisasi, dalam hal ini, merupakan proses dimana barang dan jasa, serta faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal, dapat dengan mudah melintasi batas-batas antar negara. Fenomena ini nampak jelas pada pergerakan arus perdagangan dan modal antar negara yang kian tanpa batas. Sebuah fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah perekonomian global [1].

Sebelum era globalisasi, pemikiran ekonomi sebenarnya telah berubah secara revolusioner sejak Adam Smith mengajukan pandangan kritisnya pada tahun 1776 [2]. Smith menyatakan bahwa peningkatan kemakmuran suatu negara akan dicapai melalui perdagangan bebas dan spesialisasi produksi, yakni melalui pemanfaatan keunggulan absolut yang dimilikinya.

Pandangan di atas kemudian diperluas oleh David Ricardo, salah seorang murid Adam Smith, pada tahun 1817. David Richardo memperkenalkan gagasan keunggulan komparatif [3]. Menurut Ricardo, meski suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut tertentu, perekonomian tersebut tetap dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan dengan negara lain. Keuntungan dari perdagangan antar negara akan diperoleh jika masing-masing negara berkonsentrasi pada produksi dan perdagangan barang-barang yang menjadi keunggulan komparatifnya.

Kemajuan dalam hubungan ekonomi antar negara ini kemudian mendorong pergeseran kebijakan-kebijakan

ekonomi di banyak negara. Sebuah pergeseran dari kebijakan protektif (*mercantilism*) menuju kebijakan perdagangan terbuka (*open trade policy*). Kecenderungan pergeseran ini juga dipicu oleh munculnya inovasi-inovasi lain di bidang teknologi transportasi dan telekomunikasi yang telah dimulai sejak awal abad ke-19. Inovasi-inovasi ini telah mengurangi secara signifikan biaya-biaya transaksi antar negara serta memungkinkan berkembangnya interaksi ekonomi yang efisien pada skala global.

Seiring dengan perkembangan-perkembangan lain pada era globalisasi, negara-negara semakin membuka perekonomiannya terhadap arus perdagangan dan investasi internasional sebagai bagian dari kebijakan pembangunan ekonomi mereka. Sebagai contoh, pada masa pasca Perang Dunia Kedua, kebijakan umum yang diterapkan negara-negara maju adalah deregulasi dan privatisasi, serta kebijakan-kebijakan lain yang bertujuan mendorong arus perdagangan, investasi, dan teknologi pada skala internasional [4].

Untuk lebih menjelaskan perkembangan ini, berikut disajikan statistik perdagangan dan investasi global pada periode 1960-2022 yang diambil dari basis data Bank Dunia (lihat Gambar 1 dan Gambar 2). Pada aspek perdagangan internasional, sebagaimana ditunjukkan oleh statistik perkembangan ekspor barang global pada Gambar 1, aktivitas ekspor barang secara global terus mengalami pertumbuhan pesat sejak tahun 1960 hingga 2007. Pertumbuhan yang pesat ini kemudian mengalami penurunan mendadak pada tahun 2008, sebagai akibat krisis ekonomi di sebagian besar negara industri maju. Setelahnya, aktivitas ekspor negara-negara cenderung

menunjukkan pemulihan serta kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2022.



Gambar 1. Perkembangan ekspor barang global (*merchandise trade as percentage of GDP*), 1960-2022 (%).

Sumber: basis data Bank Dunia.

Seiring dengan perkembangan pada aspek perdagangan internasional di atas, dapat diamati bahwa baik negara-negara berpenghasilan tinggi (*high income countries*) maupun negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (*low- and middle-income countries*) menunjukkan pola pergerakan aktivitas ekspor yang serupa. Bahkan, kontribusi ekspor terhadap pendapatan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, yang notabene adalah negara-negara sedang berkembang, nampak tumbuh lebih cepat terutama pada periode tahun 1987-1989 dan 1991-2009. Namun pasca krisis ekonomi global di tahun 2008, kontribusi ekspor negara-negara

berpenghasilan rendah dan menengah nampak berada di bawah negara-negara berpenghasilan tinggi.

Pada aspek investasi internasional, statistik arus investasi asing global (*net inflows of Foreign Direct Investment, FDI*) pada periode 1970-2022 menunjukkan pergerakan yang lebih dinamis dibandingkan perdagangan internasional. Hal ini disajikan dalam Gambar 2. Pada awal perkembangannya, arus investasi asing (FDI) global meningkat secara perlahan mulai tahun 1970 hingga 1985. Kemudian sejak tahun 1986 terjadi percepatan pertumbuhan hingga tahun 1990.

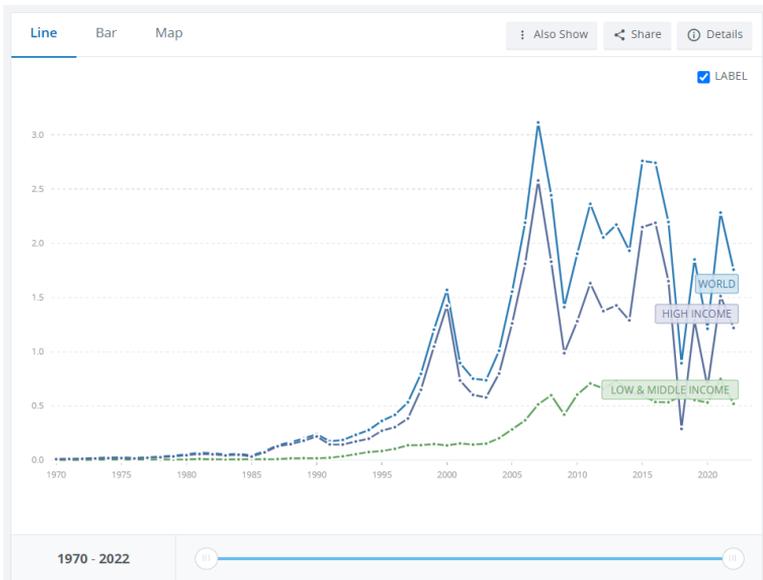
Setelah mengalami perlambatan dalam dua tahun, arus investasi asing kembali tumbuh dengan pesat dan berkelanjutan hingga tahun 2000. Namun demikian, pertumbuhan pesat arus investasi asing global ini kemudian anjlok pada periode 2001-2003, akibat pecahnya gelembung dot-com (*dot-com bubble*), serangan teroris ke gedung World Trade Center di New York, serta stagnasi pertumbuhan ekonomi di beberapa kawasan.

Aliran investasi asing global kemudian menunjukkan pemulihan Kembali pada tahun 2004 serta mengalami puncak tertingginya pada tahun 2007. Aktivitas puncak investasi asing global sepanjang sejarah ini tidak dapat bertahan dan kembali anjlok akibat krisis ekonomi global pada periode 2008-2009.

Pada periode 2010-2015, arus investasi asing dunia kembali menunjukkan kecenderungan meningkat. Arus investasi asing berhasil mencapai puncak tertinggi kedua pada tahun 2015. Namun, selanjutnya kembali mengalami pasang surut pada periode 2016-2022, dengan puncak tertinggi ketiga dicapai pada tahun 2021.

Menarik pula untuk diamati pola arus investasi asing global selama lebih dari setengah abad sebagaimana

ditunjukkan pada Gambar 2. Arus investasi asing yang umumnya berasal dari negara-negara maju lebih banyak diterima oleh sesama negara-negara. Sementara arus investasi asing yang diterima oleh negara-negara berkembang relatif terbatas. Dengan kata lain, pola pergerakan arus modal global mencerminkan arus investasi asing antar negara-negara maju.



Gambar 2. Perkembangan arus investasi asing global (*net FDI inflows*), 1970-2022 (triliun, US\$).

Sumber: basis data Bank Dunia

Sekalipun demikian, patut dicatat sejak awal tahun 1990an telah terjadi peningkatan arus investasi asing ke negara-negara berkembang. Meskipun tingkat pertumbuhan arus investasi asing ke negara-negara berkembang secara umum lebih lambat, pola tersebut menunjukkan pertumbuhan yang lebih stabil. Selain itu, jumlah negara-negara berkembang yang menerima arus

investasi asing terus meningkat dari rata-rata 15% pada periode 1970-1991 menjadi 36% pada tahun 2010.

Perkembangan penting lain adalah sejak tahun 1985 pertumbuhan arus investasi asing global semakin melampaui pertumbuhan arus perdagangan barang global. Perkembangan ini merupakan resultante dari beberapa faktor. Faktor pertama, sejak pertengahan 1980-an, banyak negara mengadopsi kebijakan liberalisasi ekonomi, termasuk promosi investasi asing melalui insentif fiskal, penyederhanaan prosedur perizinan, dan pengembangan infrastruktur. Kebijakan promosi investasi ini seringkali berjalan seiring dengan deregulasi pasar keuangan, pengurangan hambatan perdagangan, dan privatisasi perusahaan milik negara. Kebijakan-kebijakan ini tentunya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi asing, karena mengurangi biaya dan risiko bagi investor global.

Faktor kedua, adalah berkembangnya rantai nilai global (*global value chains*). Aktivitas produksi barang dan jasa semakin terfragmentasi secara global, dengan perusahaan-perusahaan masing-masing mengambil peran yang berbeda dalam aktivitas rantai produksi global (*global production networks*) yang dilakukan di berbagai negara. FDI menjadi cara bagi perusahaan untuk berpartisipasi dalam rantai nilai global ini, dengan berinvestasi di fasilitas produksi, R&D, ataupun jaringan distribusi di banyak negara, termasuk di negara-negara berkembang.

Faktor ketiga, yang tidak kalah penting, adalah perubahan struktur ekonomi yang terjadi di banyak negara berkembang. Pada pertengahan 1980-an, negara-negara seperti Korea Selatan, Taiwan, Malaysia, Thailand, Brasil, dan Meksiko, mengalami transformasi struktural dari ekonomi berbasis pertanian menjadi ekonomi berbasis

manufaktur. Transformasi ini menciptakan peluang baru bagi investasi asing di sektor-sektor yang sedang berkembang.

Kebijakan-kebijakan tersebut telah menjadi insentif bagi investor asing dan berkontribusi pada pesatnya pertumbuhan arus FDI secara global. Artinya, peranan investasi asing menjadi semakin penting bagi banyak negara [5]. Sekalipun demikian perlu pula diperhatikan bahwa sebagian besar arus perdagangan dan investasi asing tersebut terjadi di antara negara-negara OECD yang memiliki tingkat perkembangan perekonomian yang sama [6,7].

Bagaimana globalisasi membawa pengaruh luas terhadap perekonomian dunia? Era globalisasi secara khusus ditandai dengan dua macam perubahan signifikan [8]. Pertama, perubahan kuantitatif, dimana terjadi peningkatan interaksi ekonomi antar negara dalam bentuk arus perdagangan, investasi, devisa, teknologi, dan migrasi tenaga kerja. Kedua, perubahan kualitatif, dimana kekuatan institusi negara untuk mempengaruhi kegiatan-kegiatan ekonomi telah berkurang seiring dengan semakin terintegrasinya perekonomian dunia serta menguatnya pengaruh institusi bisnis dan kekuatan pasar.

Menguatnya pengaruh institusi bisnis dan kekuatan pasar sebagaimana disebut di atas adalah terkait dengan peran entitas bisnis raksasa perusahaan multinasional (*multinational company*, MNC). Perusahaan-perusahaan multinasional merupakan aktor utama investasi asing (FDI).

MNC adalah perusahaan yang memiliki aset dan menjalankan aktivitas bisnis langsung di lebih dari satu negara. MNC memiliki kemampuan untuk merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan

produksi internasionalnya dari kantor pusatnya untuk menjalankan tujuan dan strategi yang sama [9].

Pada tahun 2000 tercatat perusahaan multinasional mengelola sekitar 75% perdagangan barang-barang manufaktur dunia dan melaksanakan 75% kegiatan penelitian dan pengembangan industri di negara-negara OECD. Dalam kebanyakan kasus, perusahaan multinasional mempromosikan integrasi ekonomi antara negara-negara berkembang ke dalam beberapa jaringan produksi dan pasar global yang sedang berkembang [10].

Dalam perkembangannya kini, di tengah tantangan regulasi global terutama terkait dengan perpajakan, perlindungan data, dan persaingan, MNC terus memperbarui strategi bisnis dan investasi mereka di berbagai negara. Misalnya, meski MNC masih terkonsentrasi di negara-negara OECD, peran mereka di negara-negara berkembang makin meningkat, karena faktor-faktor seperti liberalisasi ekonomi, pertumbuhan pasar konsumen di negara-negara berkembang, serta upaya MNC untuk mendiversifikasi rantai pasokan mereka.

Pada aspek perkembangan lain, kini terdapat kecenderungan MNC untuk mengalihkan fokus aktivitas R&D mereka ke teknologi-teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), robotika, dan energi terbarukan. MNC juga meningkatkan kolaborasi dengan perusahaan domestik, universitas, dan lembaga penelitian di berbagai negara. Hal ini mencerminkan perubahan lanskap industri global dan kebutuhan untuk tetap kompetitif di pasar yang terus berkembang.

Perkembangan-perkembangan di atas menunjukkan globalisasi telah mendorong peningkatan aktivitas ekonomi antar negara pada skala yang belum pernah

terjadi sebelumnya. Hal ini tentu saja berdampak positif bagi perkembangan perekonomian di tiap negara yang aktif mengambil bagian. Namun, pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah apakah globalisasi juga mendorong pemerataan kemakmuran, khususnya diantara negara-negara berkembang? Pembahasan Goldberg dan Pavcnik [11] menyajikan observasi yang menarik.

Berbeda dengan premis dampak positif globalisasi bagi perekonomian, dampak yang ditimbulkannya di tiap-tiap negara tidaklah sama. Dampak positif globalisasi lebih dirasakan oleh negara-negara maju, Goldberg dan Pavcnik menemukan bukti adanya kesenjangan pendapatan di berbagai negara berkembang akibat globalisasi [11].

Kesenjangan pendapatan akibat globalisasi tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan negara-negara berkembang untuk melakukan realokasi tenaga kerja maupun realokasi sektoral sebagai respons terhadap tingginya tingkat keterbukaan terhadap perdagangan internasional. Artinya, sektor-sektor ekonomi yang terkait langsung dengan aktivitas perdagangan internasional menyerap tenaga kerja serta menikmati tingkat pendapatan lebih tinggi dari sektor-sektor lain [11].

Karenanya, meski globalisasi membawa kemajuan ekonomi yang luar biasa di banyak negara, perkembangan ini mengarah pada pola pembangunan ekonomi yang tidak merata dan kurang menguntungkan negara-negara berkembang. Kondisi ini menjadi catatan khusus bagi pilihan-pilihan kebijakan strategis yang perlu diambil oleh negara-negara berkembang.

1.2 Hitam putih dampak modal asing bagi negara berkembang

Literatur hukum bisnis, Black Law Dictionary memberikan definisi investasi sebagai “*an expenditure to acquire property or assets to produce revenue; a capital outlay*” [12]. Sehingga investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan secara langsung, baik oleh investor domestik maupun investor asing. Penanaman modal oleh investor domestik disebut juga penanaman modal dalam negeri (PMDN), sedangkan penanaman modal oleh investor asing disebut penanaman modal asing (PMA).

Lebih lanjut, M. Sornarajah mendefinisikan investasi asing sebagai “*the transfer of tangible or intangible assets from one country to another for the purpose of their use in that country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets*” [13]. Penanaman modal asing sendiri terbagi dalam investasi langsung (*foreign direct investment, FDI*) dan investasi tidak langsung (*foreign indirect investment, FII*). FII sebenarnya termasuk dalam kategori investasi portofolio (*portfolio investment*), yakni pembelian saham melalui pasar modal (*capital market*).

FDI secara umum dipahami sebagai investasi perusahaan dari negara asal investasi (*home country*) ke negara penerima investasi (*host country*), yang memberikan perusahaan tersebut saham ekuitas yang cukup besar untuk memegang kendali signifikan atas kepemilikan dan kepentingan jangka panjang. Dalam kriteria IMF yang banyak dipakai, pembagian ekuitas adalah setidaknya sepuluh persen kepemilikan untuk membedakannya dengan jenis investasi asing lain yang disebut investasi portofolio [9].

Dengan demikian, FDI berkaitan dengan aktivitas produksi lintas negara secara langsung. FDI bisa

dilakukan dalam bentuk pendirian entitas usaha baru ataupun melalui mekanisme merger dan akuisisi (M&A). Investasi dalam bentuk pendirian entitas usaha baru disebut pula *greenfield investment*, sedangkan investasi dalam bentuk M&A sering disebut sebagai *brownfield investment*.

Selanjutnya, guna memperjelas pengertian pembaca, klasifikasi negara berkembang dalam studi ini mengacu pada klasifikasi Bank Dunia yang didasarkan pada tingkat pendapatan per kapita. Untuk membedakannya dengan negara maju, negara berkembang dikategorikan sebagai negara dengan pendapatan nasional per kapita (*gross national income per capita*) kurang dari US\$12.476.

Dalam pengertian yang lebih dalam, perekonomian negara-negara berkembang umumnya dicirikan oleh kurangnya penggunaan modal, tenaga kerja terampil, dan teknologi dalam menopang produktivitas perekonomian. Sekalipun demikian, sebagian negara-negara ini telah mengupayakan industrialisasi perekonomian mereka. Karenanya, klasifikasi ini mencakup kategori negara kurang berkembang (*least developed country*, LDC), perekonomian dunia ketiga, atau perekonomian non-industri.

Beralih pada pokok bagian ini, penjelasan pada bagian-bagian sebelumnya telah membawa kita pada pengertian tentang peran penting perusahaan multinasional terhadap kegiatan ekonomi negara-negara berkembang. Sejalan dengan pengertian tersebut, kita perlu melakukan eksplorasi lebih jauh terhadap realitas dibaliknya, khususnya pada mekanisme dan dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan-perusahaan multinasional di negara-negara berkembang.

Dalam pokok bahasan tersebut, terdapat perdebatan dua aliran pemikiran mengenai kontribusi perusahaan multinasional terhadap pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Aliran pertama menyoroti 'sisi terang', yang mengacu pada dampak-dampak positif MNC dalam meningkatkan kegiatan ekonomi antar negara. Aktivitas bisnis MNC diasumsikan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, lebih banyak penciptaan lapangan kerja, dan dampak-dampak positif lainnya.

Sementara itu, aliran kedua menyoroti 'sisi gelap', yakni sehubungan dengan potensi dampak-dampak negatif dari aktivitas bisnis perusahaan multinasional di negara-negara berkembang. Dampak-dampak negatif ini mungkin timbul berkenaan dengan isu-isu pembangunan ekonomi yang tidak merata, pencemaran lingkungan hidup, ketimpangan distribusi tenaga kerja dan pendapatan, dan juga pelanggaran hak asasi manusia di negara penerima investasi (*host country*) [14].

Aliran kedua memandang ekspektasi terhadap dampak-dampak positif investasi asing adalah berlebihan. MNC sebagai entitas bisnis tentunya memiliki tujuan yang diarahkan pada maksimalisasi keuntungan usaha mereka sendiri. Sedangkan, negara penerima investasi memiliki tujuan berbeda, yang diarahkan bagi peningkatan pendapatan pajak, penciptaan lapangan kerja, dan standar hidup masyarakat yang lebih tinggi. Dalam kenyataan, kedua tujuan ini seringkali tidaklah sejalan, atau setidaknya bukanlah dua hal yang dapat diasumsikan serta merta tercapai bersama.

Terkait dengan perdebatan di atas, dampak-dampak investasi asing langsung (FDI) terhadap pembangunan ekonomi telah dipelajari secara intensif dalam dua dekade terakhir. Dalam hal ini, berbagai teori yang menjelaskan

dampak FDI di negara-negara berkembang telah diperkenalkan, dimana sebagian besar menghubungkannya dengan faktor-faktor penentu FDI.

Pertanyaan mendasar yang seringkali diajukan dalam studi-studi terakhir terkait dampak-dampak FDI adalah mengenai validitas hipotesis mengenai dampak positif FDI. Bukti empiris mengenai dampak FDI sebenarnya beragam. Misalnya, dampak beragam FDI terhadap negara berkembang dalam beberapa survei literatur yang dilakukan oleh Gorg dan Greenaway, Lall dan Narula, serta Rugraff et al. [15,16,17].

Lebih lanjut, studi mengenai relevansi FDI terhadap negara-negara berkembang semakin banyak ditemukan dalam tiga dekade terakhir. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, temuan-temuan menunjukkan adanya pola pembangunan yang tidak merata di sebagian besar negara-negara berkembang, hal mana dalam beberapa aspek berhubungan dengan globalisasi ekonomi. Kedua, sejak tiga dekade terakhir, negara-negara berkembang cenderung menerapkan kebijakan pembangunan yang bergantung pada FDI. Ketiga, berbeda dengan anggapan bahwa investasi asing berdampak positif bagi negara penerima, sehingga jumlah arus masuk investasi asing yang lebih besar akan lebih bermanfaat, bukti-bukti yang ada sejauh ini tidaklah meyakinkan.

Pada bagian berikut ini akan disampaikan survei literatur mengenai dampak FDI terhadap negara-negara berkembang. Secara umum, dampak positif yang diharapkan didasarkan pada anggapan bahwa FDI dan MNC merupakan agen yang sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi. Klaim ini misalnya didasarkan

pada keberhasilan macan Asia, yakni Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura.¹

Secara teoretis, dampak positif FDI dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Bentuk pertama, manfaat langsung berupa peningkatan pembentukan modal, kapasitas produksi dalam negeri, jumlah lapangan kerja, dan perpajakan. Bentuk kedua, manfaat tidak langsung atau eksternalitas seperti limpahan teknologi (*technology spillovers*) dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia (SDM). Karena itu, beberapa negara berkembang membuat beberapa kebijakan untuk meningkatkan arus masuk FDI dalam tiga dekade terakhir. Taktik standar untuk mengundang arus masuk FDI mencakup kemudahan perijinan, perpanjangan *tax holiday*, pembebasan bea masuk, ataupun tawaran subsidi langsung.

Namun demikian, meski secara teori hubungan antara FDI dan pertumbuhan ekonomi secara umum positif, kajian empiris masih kurang memberikan bukti-bukti yang meyakinkan. Bahkan bukti empiris terkini mengenai dampak-dampak FDI di negara-negara berkembang kian beragam.

Literatur mengenai dampak investasi asing di negara-negara berkembang menunjukkan beberapa dampak alternatif [18]. Selain dampak positif FDI, terdapat juga beberapa bukti dampak negatif yang ditimbulkan oleh FDI [15]. Ringkasan mengenai studi dampak FDI di negara berkembang disajikan pada bagian Lampiran 1.

¹ Sering disebut sebagai Asian Tigers atau juga *four newly industrialized economies* (NIEs-4).

A. Dampak Kinerja

Bagian ini membahas beberapa isu mengenai dampak MNC terhadap peningkatan produktivitas maupun kemampuan teknologi negara penerima investasi. Dalam literatur neoklasik, FDI dikaitkan secara positif dengan pertumbuhan output, karena FDI diasumsikan memperbesar batas kemungkinan produksi (*production possibilities frontier*), meningkatkan pembentukan modal (*gross capital formation*), dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Selain itu, dalam kasus-kasus tertentu, FDI dapat memperkenalkan teknologi baru dan memperkenalkan teknik manajemen yang meningkatkan produktivitas (*total factor productivity*) negara penerima investasi. Karena itu, terdapat ekspektasi bahwa perusahaan asing tidak hanya mendatangkan investasi baru yang meningkatkan pendapatan nasional, namun juga membawa dampak sekunder berupa pertumbuhan produktivitas perekonomian.

Sebaliknya, terdapat pula kemungkinan dampak-dampak negatif, yang umumnya terjadi di negara-negara berkembang. Pertama, hal yang paling masuk akal adalah bahwa perusahaan asing melemahkan produktivitas perusahaan domestik melalui mekanisme persaingan [19,20]. Kedua, penjelasan lain adalah mungkin saja terdapat hambatan-hambatan bagi perusahaan-perusahaan domestik untuk mempelajari teknologi dan teknik manajemen baru yang diperkenalkan MNC. Ini terkait dengan kapasitas penyerapan (*absorptive capacity*) negara penerima investasi [21].

Karenanya, dampak positif limpahan produktivitas (*productivity spillovers*) FDI bergantung

pada kompleksitas teknologi yang ditransfer oleh perusahaan multinasional dan kesenjangan kemampuan teknologi antara perusahaan domestik dan perusahaan multinasional. Kapasitas penyerapan ini erat kaitannya dengan tingkat kemampuan riset dan pengembangan perusahaan domestik [22].

Studi lain oleh Findlay [23] menekankan pentingnya keterbelakangan relatif (*relative backwardness*). Studi ini menekankan bahwa transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang dipengaruhi oleh kesenjangan teknologi diantara mereka. Semakin besar kesenjangan teknologi, semakin tinggi pula potensi transfer teknologi.

FDI diidentifikasi sebagai mekanisme transfer teknologi yang penting bagi pembangunan ekonomi negara berkembang. FDI tidak hanya mendatangkan modal tetapi juga teknologi canggih dan keterampilan manajerial, yang berkontribusi terhadap perkembangan teknologi di negara penerima investasi. Studi ini juga menyarankan negara-negara berkembang untuk berfokus pada kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi agar dapat efektif menyerap kemajuan teknologi asing melalui mekanisme FDI [23].

Namun sebaliknya, kesenjangan teknologi juga dapat menjadi penghalang terjadinya dampak negatif, misalnya dalam studi Glass dan Saggi [24]. Semakin besar kesenjangan dalam aspek sumber daya manusia, infrastruktur fisik, dan jaringan distribusi, semakin kecil kemungkinan negara penerima untuk melakukan investasi tambahan serta semakin rendah kualitas dampak teknologinya.

Persoalan mengenai kapasitas penyerapan negara penerima sering kali disebabkan oleh perbedaan tahap perkembangan antara negara penerima dan negara asal FDI. Dalam hal ini kecepatan dan tingkat dampak positif FDI berhubungan positif dengan kapasitas penyerapan negara penerima. Analisis ini diperkenalkan dalam studi Markusen dan Rutherford [25]. Dampak positif hanya akan terjadi jika kondisi negara penerima memungkinkan dalam berbagai aspek, misalnya kemampuan sumber daya manusia, kualitas infrastruktur swasta dan publik, serta kepastian hukum. Selain itu kapasitas penyerapan negara penerima investasi juga berkaitan dengan struktur industri [26].

Faktor lain yang perlu ditimbang, perusahaan multinasional juga memiliki motivasi untuk mencegah kebocoran teknologi dan keunggulan spesifik mereka yang akan meningkatkan kinerja pesaing domestik. Namun, mereka akan bersedia mentransfer pengetahuan kepada pemasok domestiknya. MNC dapat secara sukarela ataupun tidak membantu meningkatkan efisiensi pemasok ataupun pelanggan dalam negeri melalui hubungan input-output vertikal, yaitu melalui mekanisme yang dikenal sebagai *backward linkage* dan *forward linkage*.

Perusahaan multinasional dapat memberikan bantuan teknis kepada pemasok untuk membantu mereka meningkatkan kualitas produk setengah jadi yang mereka hasilkan, atau mereka mungkin hanya mempersyaratkan standar mutu tinggi bagi input-input dari pemasok domestik, yang kesemuanya merupakan insentif bagi pemasok domestik untuk meningkatkan kemampuan teknologi mereka [27]. Oleh karena itu, limpahan FDI kemungkinan besar terjadi melalui

hubungan vertikal ke belakang (*backward vertical linkage*). Penjelasan ini didukung oleh bukti-bukti yang ditemukan dalam beberapa studi [28,29].

Ada beberapa faktor yang berpotensi mendorong dampak positif melalui hubungan vertikal antara MNC dengan pemasok domestik. Pertama, tujuan MNC untuk melakukan investasi asing akan mempengaruhi sejauh mana pengadaan rantai pasok produksi berasal dari perusahaan domestik. MNC yang bertujuan mengembangkan pasar baru (*market-seeking FDI*) akan cenderung membeli lebih banyak secara domestik ketimbang mereka yang berorientasi ekspor (*efficiency-seeking FDI*). Persyaratan kualitas dan teknis yang terkait dengan barang yang ditargetkan untuk pasar domestik mungkin lebih rendah, sehingga pemasok domestik akan lebih mudah melayani perusahaan multinasional yang berfokus pada pasar domestik. Karenanya, penting untuk membedakan dampak yang dibawa oleh berbagai jenis FDI (*market-seeking, efficiency-seeking, resource-seeking*) [31].

Kedua, terdapat argumen bahwa investasi dibentuk melalui skema M&A atau *joint venture* cenderung memperoleh pasokan dari sumber daya domestik lebih banyak, dibanding investasi *greenfield*. M&A atau *joint venture* cenderung mengambil keuntungan dari hubungan pemasok yang telah dibangun oleh perusahaan yang diakuisisi atau mitra domestiknya [30].

Ketiga, investasi asing yang terintegrasi dengan jaringan pasokan global (*global supply chain*) yang dikembangkan perusahaan induk MNC akan memberikan dampak yang lebih positif terhadap perekonomian negara penerima investasi. Ketika

perusahaan domestik menjadi bagian dari rantai pasokan global, mereka berkesempatan untuk mengadopsi teknologi dan praktik manajemen yang lebih baik, sehingga meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka. Integrasi ke dalam rantai pasokan global juga membuka akses pasar internasional yang lebih luas bagi perusahaan domestik. Produk mereka dapat diekspor ke berbagai negara melalui jaringan rantai pasok MNC, sehingga meningkatkan pendapatan ekspor dan devisa negara.

Sedangkan investasi asing yang tidak terintegrasi ke jaringan pasokan global milik MNC cenderung tidak membawa dampak-dampak positif di atas. Ini dapat terjadi misalnya pada kasus persyaratan *joint venture* dengan mitra domestik dan persyaratan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) [27].

Keempat, mungkin saja terdapat beragam dampak pada tingkat sektoral atau perusahaan yang tidak dipertimbangkan dalam studi-studi dengan pendekatan agregat [15]. Dampak beragam FDI terhadap kinerja perekonomian negara penerima mungkin terkait dengan fakta bahwa dampak yang ditimbulkan bervariasi antar sektor industri [32,33]. Faktor ini mencakup persyaratan tingkat teknologi tertentu, orientasi pasar, struktur pasar, atau keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan rantai pasokan global.

Karenanya, investasi asing pada sektor-sektor yang memiliki potensi adopsi teknologi yang besar, industri-industri yang memproduksi barang-barang berkualitas tinggi dan berteknologi tinggi, serta pada industri-industri yang menghasilkan skala ekonomi eksternal, mungkin akan mempercepat laju

pertumbuhan ekonomi [34]. Dampak positif atas rekomendasi ini bervariasi menurut sektor industri. Di sektor primer, cakupan hubungan vertikal seringkali terbatas karena penggunaan proses produksi yang berkelanjutan dan intensitas modal dalam operasinya. Studi lintas negara yang berfokus pada FDI berbasis sumber daya alam (*resource-seeking*) menemukan dampak beragam investasi asing terhadap produktivitas, serta bahkan menunjukkan dampak negatif pada beberapa kasus [35]. Pada sektor manufaktur, potensi keterkaitan vertikal lebih luas, tergantung pada sejauh mana input antara terhadap total produksi dan jenis proses produksi [16].

Selanjutnya, sehubungan dengan dampak pada struktur pasar domestik, MNC dapat membawa efek *crowding-in* yang positif ketika beberapa keunggulan teknologinya dapat diadopsi oleh perusahaan domestik. Efek *crowding-in* ini misalnya terjadi melalui mekanisme hubungan rantai pasok (*backward linkage*), ataupun pada kasus lain melalui mekanisme *demonstration effect* kepada pesaing domestik. Dampak positif yang timbul akan menstimulasi peningkatan efisiensi pada perusahaan-perusahaan domestik.

Namun, di sisi lain terdapat potensi efek *crowding-out* berupa dampak anti-persaingan. Hal ini terjadi pada kasus tersingkirnya perusahaan-perusahaan domestik akibat kalah bersaing dengan MNC, atau pada kasus MNC memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menguasai sumber daya langka dan tenaga kerja terampil. Pada kasus lain jaringan pasokan dalam negeri dapat tersingkir sebagai pemasok, karena MNC membawa serta rantai pasokan hulu dan hilir yang terintegrasi [17].

B. Dampak Ketenagakerjaan

Bagian ini membahas beberapa isu penting mengenai dampak MNC dan aktivitas produksi internasionalnya terhadap perluasan kesempatan kerja, tingkat upah serta tingkat pendidikan dan keterampilan. Hal ini merupakan isu yang cukup penting untuk dibahas, yang biasanya menjadi landasan bagi para pengambil kebijakan untuk menarik lebih banyak investasi asing. Pada tahun 1999, perusahaan multinasional bertanggung jawab atas penyerapan tenaga kerja lebih dari 86 juta pekerja [36].

Pertama, pada kasus merger dan akuisisi (M&A) yang pada kenyataannya merupakan porsi terbesar FDI, hampir 80% dari total FDI, dalam dua dekade terakhir. Jenis investasi ini dipandang menghasilkan penambahan kapasitas produksi bagi MNC, namun tidak bagi negara penerima. Investasi asing melalui skema M&A hanya menangani peningkatan kendali kepemilikan dan kapasitas produksi MNC yang mengakuisisi, tanpa menciptakan lapangan kerja baru di perekonomian domestik.

Dalam jangka pendek M&A cenderung tidak menciptakan lapangan kerja. Namun dalam jangka menengah, terdapat kemungkinan perusahaan melakukan PHK seiring dengan restrukturisasi dan rasionalisasi pasca M&A, demi meningkatkan efisiensi perusahaan. Hanya dalam jangka panjang, M&A dapat berinvestasi secara organik dan hal ini akan mengarah pada penciptaan lapangan kerja baru.

Kedua, dalam hal investasi asing baru (*greenfield investment*). Investasi asing jenis ini memang menghasilkan kapasitas baru dan karenanya mempunyai potensi menciptakan lebih banyak

lapangan kerja di negara penerima investasi. Meski demikian, MNC dapat saja meningkatkan kapasitas produksinya di suatu negara dengan merekrut tenaga kerja secara terbatas. Hal ini terutama terjadi pada investasi padat modal. FDI di negara maju cenderung mengarah pada produksi padat modal, sedangkan di negara berkembang cenderung mengarah pada investasi padat karya. Potensi penciptaan lapangan kerja tambahan lebih besar di negara-negara berkembang dibandingkan di negara-negara maju.

Perlu dicatat bahwa uraian sebelumnya mengenai investasi asing baru dan potensi dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja didasarkan pada asumsi bahwa FDI menambah rencana investasi yang sudah ada di negara asal investasi. Namun, situasi tersebut tidak berlaku jika FDI hanya menggantikan rencana investasi dan produksi yang dilakukan pelaku usaha domestik. Dalam situasi seperti ini, dampak sebaliknya akan timbul. Dampak negatif *crowding-out* dalam penciptaan lapangan kerja mungkin akan terjadi, karena perusahaan dalam negeri yang tidak mampu bersaing dengan pesaing asing.

C. Dampak Perdagangan

Dalam banyak hal, MNC merupakan pusat kendali bagi sebagian besar transaksi perdagangan internasional barang dan jasa. Misalnya, hampir separuh arus perdagangan adalah intraperusahaan atau perdagangan dalam kelompok perusahaan multinasional [38]. Namun, dalam hal ini, ada beberapa isu penting yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis dampak-dampak FDI terhadap perdagangan.

Pertama, terdapat permasalahan hubungan komplementer versus substitusi antara perdagangan dan produksi internasional. Sehingga konsekuensinya adalah sejauh mana produksi langsung di negara penerima investasi dapat menggantikan ekspor ke negara tersebut? Atau, sejauh mana strategi integrasi vertikal internasional dari suatu MNC akan menghasilkan lebih banyak perdagangan antar negara?

Dalam literatur neoklasik, hambatan perdagangan akan merangsang produksi internasional, sedangkan pembatasan pergerakan modal internasional akan merangsang produksi dalam negeri dan dengan demikian mendorong perdagangan internasional. Dalam kerangka ini, FDI dan perdagangan saling menggantikan. Ini pada dasarnya menganalisis aspek produksi dan perdagangan internasional sebagai sumber pasokan untuk pasar domestik.

Namun perlu diingat bahwa hubungan antara produksi internasional dan perdagangan berbeda menurut tiga jenis produksi [39]. Dalam produksi yang mencari sumber daya alam (*resource-seeking*), investasi asing membawa hubungan yang saling melengkapi dengan perekonomian negara penerima. Spesialisasi diantara perekonomian berbasis sumber daya alam dan perekonomian berbasis manufaktur dapat menghasilkan perdagangan internasional. Dalam hal produksi yang mencari pasar (*market-seeking*), investasi asing membawa hubungan substitusi terhadap perekonomian negara penerima. Hambatan perdagangan merangsang produksi langsung untuk menembus pasar domestik, seperti yang disarankan oleh kerangka neoklasik.

Terakhir, dalam hal pencarian efisiensi atau produksi vertikal internasional yang terintegrasi (*efficiency-seeking*), investasi asing membawa hubungan yang saling melengkapi dengan perekonomian negara penerima. Dalam hal ini, FDI mengarah pada perdagangan internasional karena komponen produk berpindah dari satu negara ke negara lain. Saat ini, FDI di negara-negara berkembang semakin banyak yang mengikuti pola ini, sesuai perkembangan rantai nilai global.

Selanjutnya, analisis dampak produksi internasional MNC terhadap pola perdagangan di negara berkembang dapat disampaikan dalam beberapa cara. Salah satu analisis yang umum dilakukan adalah berdasarkan pola geografis dan struktur perdagangan. Dalam hal ini, analisisnya mengikuti pola siklus hidup produk internasional (*international product life cycle*). Yang lainnya berkaitan dengan pola perdagangan intra-perusahaan dan intra-industri. Pola-pola ini terkait dengan strategi produksi internasional MNC yang terintegrasi secara vertikal, seperti yang disarankan oleh paradigma Ownership Advantage, Location Advantage, dan Internalization Advantage (OLI) yang diperkenalkan John Dunning [9,14].

Sejak awal tahun 2000, aliran FDI ke negara-negara berkembang semakin terkait dengan perdagangan intra-industri dan pembentukan jaringan produksi yang terintegrasi secara vertikal. Oleh karena itu, dampak kesalingterkaitan investasi dan perdagangan internasional (*FDI-trade nexus*) di negara-negara berkembang menjadi penting. Dapat dikatakan bahwa *FDI-trade nexus* merupakan konsekuensi dari

upaya MNC untuk membentuk rantai pasokan dan jaringan produksi regional. Fenomena ini umum terjadi di negara-negara berkembang, misalnya industri otomotif dan elektronik di Asia Tenggara dan Amerika Selatan.

Selain itu, MNC dapat membawa manfaat tambahan antara lain teknologi canggih, praktik manajemen yang efisien, dan jaringan distribusi ke pasar ekspor. Oleh karena itu, pembuat kebijakan di negara-negara berkembang menerapkan kebijakan terbuka terhadap FDI dan perusahaan multinasional akan mendorong perekonomian mereka untuk berkinerja baik, menunjukkan perkembangan industri dan keberhasilan ekspor [36].

D. Dampak Neraca Pembayaran

Investasi asing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional (MNC) memiliki dampak pada perekonomian negara asal maupun negara penerima investasi. Ketika MNC berinvestasi di luar negeri, negara asal akan mencatat pengeluaran modal dalam neraca pembayarannya (*balance of payments, BoP*), yang berarti nilai negatif. Sebaliknya, negara penerima investasi akan mencatat adanya pemasukan modal, yang berarti nilai positif.

Dalam jangka pendek, investasi MNC di luar negeri dapat menyebabkan modal finansial keluar dari negara asal untuk mendanai investasi tersebut. Namun, dalam jangka menengah, keuntungan dan dividen yang dihasilkan dari investasi akan mengalir kembali ke negara asal, memberikan dampak positif pada neraca pembayarannya. Seiring berjalannya waktu, keuntungan kumulatif yang besar dapat tercipta,

bahkan memungkinkan pendanaan investasi baru dari keuntungan investasi sebelumnya.

Investasi asing juga dapat berdampak tidak langsung pada neraca transaksi berjalan (*current account*) negara penerima. Jika investasi tersebut meningkatkan ekspor, maka akan ada dampak positif pada neraca transaksi berjalan.

Namun, ada juga potensi dampak negatif tidak langsung, yaitu manipulasi harga transfer (*transfer pricing*). Harga transfer adalah harga yang ditetapkan dalam transaksi internal antara unit usaha MNC di negara yang berbeda. Manipulasi harga transfer terjadi ketika MNC menetapkan harga yang berbeda dari harga pasar untuk mengurangi beban pajak. Praktik ini dapat merugikan negara penerima investasi karena mengurangi potensi pendapatan pajak.

Investasi asing dari MNC memiliki dampak kompleks pada perekonomian negara asal dan negara penerima. Meskipun ada potensi dampak negatif seperti manipulasi harga transfer, investasi asing dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, terutama dalam jangka menengah dan panjang, melalui peningkatan ekspor, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja.

E. Dampak Sekunder

Dampak-dampak pada kinerja dan ketenagakerjaan negara penerima dapat dikelompokkan sebagai dampak langsung dari investasi asing. Selain itu, terdapat pula dampak-dampak tidak langsung yang mungkin timbul dan bersifat sekunder.

Pertama, dampak tidak langsung mungkin terjadi melalui hubungan perdagangan dan FDI. Jika penanaman modal asing meningkatkan peluang ekspor negara tuan rumah, hal ini dapat menciptakan lapangan kerja tambahan. Di sisi lain, jika hal ini mendatangkan lebih banyak impor, misalnya dalam FDI yang mencari pasar dan bergantung pada bahan baku dari luar negeri, maka hal ini dapat mengurangi penciptaan lapangan kerja di negara pengimpor.

Kedua, dampak tidak langsung dapat timbul melalui kegiatan rantai produksi vertikal. Jika rantai pasokan beroperasi dalam perekonomian domestik, dampak tidak langsung terhadap lapangan kerja akan menjadi positif karena pemasok/distributornya adalah perusahaan domestik. Namun jika meluas ke luar negeri, dampak positifnya mungkin tidak banyak.

Ketiga, terdapat juga dampak makroekonomi tidak langsung, dimana dampak pajak penghasilan dan pengganda lapangan kerja dapat terjadi dalam kasus investasi asing (*greenfield* FDI). Sekalipun dampak-dampak tidak langsung tersebut tidaklah merupakan dampak spesifik dari, namun juga dapat berasal dari semua jenis investasi, baik asing maupun domestik.

Dampak potensial lain dari penanaman modal asing adalah terhadap kualitas lapangan kerja. Aspek kuantitas lapangan kerja berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, sedangkan aspek kualitas lapangan kerja berkaitan dengan tingkat upah, produktivitas dan keterampilan, serta daya tawar tenaga kerja. Dalam hal ini, sebagian besar penelitian menegaskan adanya tingkat produktivitas yang lebih tinggi pada perusahaan-perusahaan multinasional dibandingkan pada perusahaan domestik yang relatif lebih kecil.

Produksi MNC biasanya beroperasi pada tingkat modal per unit output yang lebih tinggi. Perusahaan multinasional biasanya berukuran lebih besar dan cenderung menggunakan teknik produksi padat modal yang lebih tinggi. Tingkat produktivitas yang lebih tinggi memungkinkan perusahaan membayar upah lebih tinggi dari rata-rata. Tingkat produktivitas yang lebih tinggi juga dapat dicapai melalui peningkatan tingkat keterampilan pekerja, karena perusahaan multinasional cenderung mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk pelatihan dan pengembangan.

Pada gilirannya, dampak positif dari tingginya tingkat upah yang dibayarkan oleh perusahaan multinasional dapat membawa dampak negatif tidak langsung terhadap perusahaan domestik. Perusahaan domestik yang lebih kecil harus bersaing dengan mereka atau mendapatkan tenaga kerja yang kurang terampil. Di sisi lain, dampak positif tidak langsung dari penanaman modal asing terhadap tingkat pengetahuan dan keterampilan perekonomian domestik mungkin terjadi ketika tenaga kerja terlatih dari perusahaan multinasional berpindah ke perusahaan domestik.

Sehubungan dengan dampak FDI terhadap daya tawar tenaga kerja, aktivitas MNC dapat menyebabkan berbagai bentuk fragmentasi pasar kerja, yang mengakibatkan rendahnya daya tawar tenaga kerja terhadap modal. Dalam hal ini, mungkin terjadi fragmentasi dalam batasan geografis atau politik, organisasi, dan proses produksi terhadap tenaga kerja di berbagai perekonomian. Hal ini disebut strategi '*divide and rule*' [37].

Sebagai contoh, perusahaan multinasional di sektor sepatu, garmen, elektronik, maupun otomotif yang melakukan alih daya (*outsourcing*) fasilitas produksinya ke luar negara asal. Perusahaan-perusahaan multinasional tersebut menerapkan teknologi terkini dan pengembangan organisasi untuk membagi proses produksi menjadi komponen-komponen produksi yang memerlukan tingkat keterampilan berbeda di banyak negara penerima investasi. Akibatnya, pada akhir tahun 1970an terjadi perkembangan besar-besaran yang disebut *new international division of labor* (NIDL) di negara-negara berkembang, yang dihasilkan oleh strategi relokasi produksi yang dilakukan perusahaan-perusahaan multinasional.

Setelah menguraikan dampak-dampak investasi asing pada perekonomian negara penerima, beberapa poin pemikiran dapat disarikan. Bagian awal buku ini telah menjelaskan pengaruh globalisasi terhadap negara-negara berkembang, khususnya terhadap perkembangan perdagangan dan investasi internasional. Ketika interaksi ekonomi antar negara meningkat, hal ini membawa kompleksitas pada pola perdagangan dan investasi internasional. Hal ini pada gilirannya menimbulkan dampak beragam dari penanaman modal asing.

Selain itu, ketika perbedaan dalam indikator makroekonomi, kekayaan, kebijakan dan perkembangan teknologi juga dipertimbangkan, teori dan bukti yang disurvei dalam makalah ini telah mengkonfirmasi pentingnya faktor-faktor tersebut. Terdapat pendapat yang menyatakan dampak FDI yang beragam disebabkan oleh heterogenitas dua arah:

(1) karakteristik negara tuan rumah, dan (2) tujuan dan strategi yang berbeda dari berbagai jenis FDI [40].

Karena itu, belum ada teori yang komprehensif mengenai dampak FDI. Beragam pendekatan teoritis yang ada masing-masing berupaya menjelaskan beberapa aspek dari dampak-dampak yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, penggunaan satu pendekatan tidak serta merta menggantikan pendekatan yang lain, melainkan memberikan penjelasan yang lebih banyak mengenai aspek-aspek berbeda dari fenomena yang sama.

Dalam hal ini, variabel tak terbatas yang terkait dengan perilaku MNC menghalangi teori FDI yang menjelaskan dan memprediksi secara terpadu [40]. Karena itu, analisis terhadap dampak FDI tidak boleh hanya mengandalkan satu teori saja, melainkan pada kombinasi beberapa pendekatan. Ini merupakan agenda penelitian ke depan.

Selain itu, jika perbedaan negara dan banyaknya jenis investasi langsung diasumsikan menjadi faktor penting dampak FDI terhadap negara penerima, maka pelajaran utamanya mungkin adalah pencarian hubungan universal adalah sia-sia. Oleh karena itu, disarankan bahwa untuk memahami dampak FDI, kita perlu mengkaji berbagai jenis FDI - yaitu pencarian sumber daya (*resources seeking*), pasar (*market seeking*), efisiensi (*efficiency seeking*), atau aset strategis (*strategic seeking*) - dalam kasus perekonomian tertentu. Alternatifnya, saran yang layak adalah melakukan analisis berdasarkan sektoral perekonomian.

Pokok-pokok kajian dalam buku ini akan disusun sebagai berikut. Bab 1 memberikan pengantar mengenai arah studi dampak FDI saat ini, dengan

perhatian khusus terhadap kasus-kasus di negara berkembang. Bab 2 memberikan penjelasan seputar perkembangan kebijakan investasi asing di Indonesia, termasuk fase-fase penanaman modal asing dan liberalisasi perdagangan. Bab 3 memberikan gambaran mengenai peran FDI di sektor manufaktur Indonesia, yang menjadi fokus dalam kajian ini. Terakhir, Bab 4 menutup dengan implikasi kebijakan yang relevan bagi masa depan perekonomian Indonesia.

BAB 2

INVESTASI ASING DI INDONESIA

2.1 Liberalisasi investasi dan perdagangan

Ada beberapa faktor yang mendasari naik turunnya arus investasi asing (FDI) di Indonesia. Faktor-faktor ini antara lain mencakup kebijakan penanaman modal asing, fundamental makroekonomi, infrastruktur, dukungan industri, dan implementasi kebijakan [41]. Dalam hal ini, bagian ini secara khusus akan membahas beberapa kemajuan yang relevan terkait dengan kebijakan FDI perekonomian.

Perkembangan penanaman modal asing di Indonesia dimulai dari Kabinet Ali Sastroamidjojo pertama (1952-1953) dengan mempersiapkan perangkat peraturan untuk menarik penanaman modal asing. Namun peraturan tersebut belum sempat diajukan ke parlemen karena jatuhnya kabinet ini. Pada Kabinet Ali Sastroamidjojo kedua, pada tahun 1953 diajukan Rencana Undang-Undang Penanaman Modal Asing, yang mengandung syarat-syarat agar penanaman modal asing tidak menghambat pembangunan masyarakat Indonesia. Rencana Undang-undang Penanaman Modal Asing ini tidak memperoleh persetujuan parlemen [42].

Setelah kegagalan Rencana Undang-undang Penanaman Modal Asing yang diajukan Kabinet Ali Sastroamidjojo kedua, pada tahun 1958 diterbitkanlah untuk pertama kali Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing. Undang-undang ini diterbitkan dengan pertimbangan berikut:

1. Bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta memperbesar produksi nasional guna

mempertinggi tingkatan penghidupan rakyat, sangat diperlukan modal;

2. Bahwa modal yang didapat di Indonesia pada waktu ini belum mencukupi sehingga dianggap berfaedah menarik modal asing untuk ditanam di Indonesia;
3. Bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan akan modal guna pembangunan nasional, disamping menghindarkan keragu-raguan dari pihak modal asing.

C.F.G. Sunarjati Hartono menyebut bahwa Undang-undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing ini menambahkan restriksi-restriksi yang lebih ketat dari rencana awal Undang-undang Penanaman Modal Asing yang ditolak oleh parlemen pada tahun 1953 [42].

Pembatasan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing dimaksudkan bahwa jenis-jenis perusahaan yang lazim dikerjakan oleh warga negara Indonesia adalah tertutup untuk modal asing dan modal asing diperkenankan bekerja dengan pembatasan-pembatasan berdasarkan jenis lapangan usaha. Selain pembatasan berdasarkan jenis perusahaan dan bidang lapangan usaha, di dalam Undang-undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing diatur mengenai kelonggaran-kelonggaran yang diberikan untuk penanaman modal asing.

Kelonggaran-kelonggaran tersebut sekarang disebut fasilitas penanaman modal, seperti:

1. Pajak berganda. Dengan perjanjian internasional diusahakan pencegahan pemungutan pajak berganda.
2. Pajak perseroan. Undang-undang dan/atau peraturan-peraturan yang bermaksud memberikan keringanan pemungutan pajak perseroan, cara penyusutan yang khusus atas barang modal, keringanan atau kompensasi

kerugian khusus pembebasan pemungutan bea meterai dan keringanan bea masuk atas alat perlengkapan dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam perusahaan sesudah mendapat persetujuan dari Dewan atas nama Pemerintah dapat berlaku pula untuk perusahaan asing.

Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing kemudian dicabut dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 78 Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal Asing, yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 15 Tahun 1960.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 lahir dari kekhawatiran mendalam akan dampak penanaman modal asing yang dianggap eksploitatif, menghambat kemajuan revolusi, dan bertentangan dengan prinsip kemandirian ekonomi. Pemerintah saat itu berpendapat bahwa investasi asing lebih berorientasi pada keuntungan semata, sehingga berpotensi merugikan rakyat dan menghambat tercapainya tujuan nasional, yaitu Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila. Karena itu, penanaman modal asing dianggap perlu dihapuskan secara bertahap untuk memperkuat kemampuan produksi dalam negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 secara tegas menyatakan bahwa kerja sama ekonomi dengan negara lain harus dilakukan tanpa melibatkan investasi asing. Hal ini sejalan dengan Tap MPRS No. VI/MPRS/1965 yang mengamanatkan penghapusan modal asing dan pembangunan ekonomi yang mandiri.

Dengan demikian, pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965, penanaman modal asing di Indonesia secara resmi dihentikan. Sebagai gantinya,

pemerintah fokus pada pengembangan ekonomi nasional yang berlandaskan pada Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966. Ketetapan ini menekankan pentingnya investasi dalam negeri, pengembangan teknologi, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta penguatan manajemen untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada.

Kebijakan ini mencerminkan semangat untuk membangun ekonomi yang mandiri dan berdikari, bebas dari pengaruh asing yang dianggap merugikan. Meskipun demikian, kebijakan ini juga menuai perdebatan dan memiliki dampak yang kompleks terhadap perkembangan ekonomi Indonesia selanjutnya.

Landasan kebijaksanaan ekonomi Indonesia yang berkaitan dengan penanaman modal, sebagaimana yang dikutip oleh Sunarjati Hartono [42], adalah berdasarkan Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Pasal 9, yang isinya: "Pembangunan ekonomi terutama berarti mengolah kekuatan ekonomi potensi menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen".

Mengikuti perubahan rezim politik dari Orde Lama ke Orde Baru, perekonomian Indonesia mulai mengalami pergeseran menuju keterbukaan yang lebih besar terhadap kekuatan pasar dan peningkatan peran investasi asing. Hal ini tampaknya disebabkan karena pada saat itu perekonomian sedang kekurangan modal dan teknologi. Tahap tersebut merupakan era baru bagi kerja sama antara perekonomian Indonesia dan investor asing, terutama jika dibandingkan dengan pendekatan rezim sebelumnya

yang berpuncak pada nasionalisasi hampir semua investasi asing pada tahun 1963. Diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan ini dijadikan patokan bagi pemerintah saat itu untuk menentukan kebijakan ekonomi, khususnya di bidang penanaman modal asing dan landasan diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 berlandaskan pada kebijaksanaan ekonomi di atas, dengan pertimbangan bahwa kekuatan ekonomi potensial yang terdapat banyak di seluruh wilayah tanah air yang belum diolah untuk dijadikan kekuatan ekonomi riil, yang antara lain disebabkan oleh karena ketiadaan modal, pengalaman dan teknologi. Untuk itu penggunaan modal asing perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta digunakan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor yang belum dan atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 ini juga diterbitkan menghindarkan keragu-raguan dari pihak modal asing.

Pengertian penanaman modal asing di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Pemerintah menetapkan rincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan

prioritas, dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanam modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut, selanjutnya lebih dikenal dengan daftar bidang usaha terbuka untuk penanaman modal.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, bidang-bidang usaha yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 78 Tahun 1958 menjadi tertutup bagi penanaman modal asing secara penguasaan penuh. Karena bidang-bidang tersebut penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak. Bidang-bidang tersebut selanjutnya lebih dikenal dengan daftar bidang usaha tertutup (*negative list*).

Bagi perusahaan-perusahaan modal asing yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, diberikan keringanan-keringanan perpajakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15, berupa pembebasan dan keringanan. Selain membuka bidang-bidang usaha bagi penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, pemerintah juga mengatur tentang penanaman modal dalam negeri, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, pada Pasal 1 ayat (1) terdapat definisi: "Modal Dalam Negeri ialah bagian daripada kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh Negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing". Dengan adanya dua kebijakan yang

mengatur penanaman modal, memberikan gambaran tentang pemisahan kebijakan terhadap penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.

Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967, investor asing diberikan pembebasan pajak (*tax holiday*), diperbolehkan untuk memiliki kepemilikan asing secara penuh, dan pada akhirnya tidak diwajibkan untuk mengalihkan sebagian ekuitas perusahaan tersebut kepada kepentingan Indonesia.

Namun, pada tahun 1970-an, karena minyak menyediakan devisa dan modal, serta peluang untuk meminjam dari bank internasional, semakin banyak pembatasan yang diterapkan pada investasi dalam negeri. Pembatasan yang mengatur penggunaan tenaga kerja asing dan impor mesin dan material secara bertahap diperketat, dan persyaratan yang ketat diberlakukan sehubungan dengan kemitraan lokal dan divestasi ekuitas. *Tax holiday* juga dibatalkan.

Kebijakan penanaman modal asing pada periode 1967-1970 dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan yang sebagian besar bersifat *ad hoc*. Hak-hak istimewa, hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kewajiban-kewajiban para penanam modal asing tidak banyak ditentukan oleh undang-undang yang dapat diterapkan secara umum, melainkan hanya oleh keputusan-keputusan pemerintah Indonesia yang bersifat diskresi berdasarkan kasus per kasus [43].² Setelah tahun 1970 semua penanaman modal

²Biasanya, penanam modal asing diminta untuk mengajukan proposal penanaman modal yang kemudian akan disaring oleh komite penanaman modal pemerintah untuk menentukan, berdasarkan negosiasi, hal-hal seperti: (a) syarat-syarat masuk, seperti besarnya penanaman modal, luasnya investasi, kepemilikan asing, program pemrosesan dan integrasi dalam negeri, dan saluran pemasaran; (b) jumlah insentif investasi (pengurangan pajak, pembebasan bea masuk, fleksibilitas akuntansi, dan

asing termasuk di sektor manufaktur harus mendapat persetujuan dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia).³

Dengan menurunnya pendapatan minyak pada akhir tahun 1980an, Indonesia semakin menyadari potensi peran investasi asing dalam pembangunan ekonomi. Dalam hal ini, ada dua periode liberalisasi investasi yang dilaksanakan sebelum krisis tahun 1997. Yang pertama adalah deregulasi kebijakan pada pertengahan tahun 1980an. Selain langkah-langkah stabilisasi makro seperti depresiasi rupiah, konsolidasi fiskal, dan reformasi awal di industri keuangan, deregulasi kebijakan perdagangan dan penanaman modal asing juga dilakukan. Mulai tahun 1986, pemerintah Indonesia meluncurkan promosi investasi baru dengan melonggarkan batasan kepemilikan asing untuk investasi berorientasi ekspor dan memfasilitasi prosedur perizinan investasi.⁴

sebagainya) yang memenuhi syarat untuk proyek tersebut. Persyaratan investasi bagi investor asing tertentu kemudian secara eksplisit dinyatakan dalam kontrak antara investor asing dan pemerintah negara penerima investasi, misalnya perjanjian konsesi sektor alam yang paling terkenal.

³Kewenangan BKPM memberikan: (1) jaminan bagi perusahaan asing untuk leluasa mentransfer keuntungan dan merepatiasi modalnya setelah jangka waktu tertentu; (2) tax holiday dasar bagi investor asing; (3) pembebasan pembayaran bea masuk dan pajak penjualan mesin dan peralatan; dan (4) izin bagi perusahaan asing untuk beroperasi selama jangka waktu 30 tahun setelah berdirinya badan hukum. Proses untuk mendapatkan persetujuan pemerintah terdiri dari: (1) pengisian Letter of Intent, yaitu pernyataan yang merangkum aspek luas dari investasi manufaktur yang diusulkan, (2) dalam hal persetujuan awal, pengajuan proyek proposal, yang merinci proyek dan menjadi dasar negosiasi syarat-syarat investasi, (3) akhirnya, jika tidak ada kegagalan dalam negosiasi, sebuah dokumen akan ditulis. Dokumen yang berisi perubahan yang disepakati bersama terhadap karakteristik proyek asli serta pajak dan insentif lain yang diberikan. Dokumen tersebut merupakan kontrak antara pemerintah Indonesia dan investor asing [43].

⁴Liberalisasi progresif rezim FDI yang dimulai pada pertengahan tahun 1980an telah mempengaruhi persepsi investor, namun Indonesia juga

Deregulasi ini bertujuan untuk beralih dari rezim substitusi impor ke rezim yang berorientasi ekspor guna mendiversifikasi basis pendapatan ekspor dan fiskal Indonesia dari minyak dan komoditas primer. Oleh karena itu, sejumlah langkah signifikan diambil, termasuk pembenahan prosedur bea cukai yang panjang, penerapan skema keringanan bea masuk untuk ekspor dan deregulasi besar-besaran terhadap hambatan tarif dan non-tarif, serta penghapusan berbagai pembatasan FDI yang terkait dengan orientasi ekspor. Persyaratan modal minimum diturunkan, batas kepemilikan asing ditingkatkan, persyaratan divestasi dilonggarkan, dan tunjangan diberikan untuk perlakuan nasional.

Akibatnya, arus masuk FDI dari Jepang dan NIEs-4 melonjak selama pertengahan tahun 1980an hingga awal tahun 1990an. Sejalan dengan itu, ekspor non-minyak yaitu ekspor produk manufaktur sebagai bagian dari total ekspor meningkat dari 20 persen menjadi 60 persen selama periode tersebut. Peningkatan penting terjadi pada beberapa ekspor manufaktur seperti garmen, alas kaki, dan elektronik.

Deregulasi kedua muncul setelah penurunan investasi asing pada tahun 1992. Hal ini menyebabkan sejumlah langkah untuk melonggarkan pembatasan kepemilikan asing. Langkah-langkah ini berujung pada diperbolehkannya 100 persen kepemilikan asing di sektor-sektor strategis seperti pelayaran. Perubahan dramatis ini didorong oleh sejumlah faktor. Meningkatnya persaingan

mendapat manfaat dari gabungan beberapa faktor pendorong di negara-negara sumber pendanaan di Asia. Hal ini termasuk revaluasi mata uang, kenaikan upah dan harga tanah di dalam negeri, liberalisasi aturan negara asal mengenai pergerakan modal keluar, dan hilangnya akses istimewa ke pasar-pasar utama melalui prosedur Generalized System of Preferences (GSP).

dalam perdagangan dan investasi (terutama dari negara-negara penerima FDI lainnya di Asia Timur, termasuk Tiongkok dan Vietnam), perlambatan pertumbuhan ekspor non-minyak, penurunan investasi asing, dan partisipasi perekonomian dalam forum APEC, merupakan beberapa di antaranya. faktor-faktor yang berpengaruh.

Liberalisasi lebih lanjut pada tahun 1994 memungkinkan kepemilikan asing penuh di seluruh Indonesia, mengurangi kepemilikan ekuitas minimum mitra Indonesia dalam usaha patungan menjadi lima persen, menghapus semua persyaratan divestasi, dan mengurangi jumlah sektor yang tertutup bagi investor asing (*negative list*). Saat ini, kebijakan tersebut tidak terlalu bergantung pada insentif, kecuali peraturan yang berlaku pada zona pengolahan ekspor. Liberalisasi ini merupakan bagian dari proses reformasi ekonomi yang lebih luas pada pertengahan tahun 1990an, yang mencakup kebijakan perdagangan dan sektor keuangan [41].

Pada periode pasca krisis, banyak kebijakan dan program yang diambil oleh para pengambil kebijakan untuk memperbaiki iklim investasi secara umum dan menarik lebih banyak arus masuk FDI pada khususnya [44]. Pada tahun 2007, empat peraturan utama diterbitkan yang terkait langsung dengan perkembangan FDI. Yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Penanaman Modal di Sektor Tertentu dan Daerah Tertentu, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan. penanaman modal, dan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Negatif Penanaman Modal; kemudian Peraturan Presiden

Nomor 77 Tahun 2007 selanjutnya direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007.

Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan perekonomian akan penanaman modal dengan memberikan kepastian hukum dan perlakuan nasional yang sama kepada semua investor tanpa memandang kewarganegaraannya. Hal ini memberikan jaminan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan secara sewenang-wenang menasionalisasi atau mengambil alih perusahaan-perusahaan penanaman modal asing. Hal ini juga memungkinkan investor asing untuk secara bebas mentransfer keuntungan dan dividen mereka atau memulangkan modal mereka [45].

Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang National Single Window for Investment. Peraturan baru ini dimaksudkan untuk memberikan rincian prosedur pelaksanaan 'kebijakan investasi satu atap' sebagaimana tercantum dalam UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007. Dengan peraturan ini, BKPM mempunyai mandat lebih besar untuk memberikan layanan ramah investor terkait dengan ketentuan perizinan dan non-perizinan [46].

Pemerintah Indonesia terus memberikan beberapa insentif seperti tax holiday, berbagai pengurangan pajak, kredit dan tunjangan serta insentif pajak kepada sektor-sektor prioritas. Hal ini termasuk pembebasan pajak (*tax holiday*) selama 3-8 tahun bagi perusahaan baru di 22 industri, pengurangan tarif pajak penghasilan badan sebesar 30 persen untuk realisasi investasi yang disebar selama periode 6 tahun, pembebasan dan pengurangan tarif bea masuk dan PPN atas input di industri tertentu dan khususnya bagi eksportir, pengurangan penghasilan kena

pajak hingga 30 persen untuk investasi di industri-industri prioritas, dan yang terpenting hingga 100 persen kepemilikan asing di sebagian besar industri dengan beberapa persyaratan ekspor [47].

Indonesia menerapkan strategi pembangunan yang berorientasi ke dalam hampir sepanjang periode antara kemerdekaannya pada tahun 1945 hingga awal tahun 1980an.⁵ Namun, perubahan situasi kemudian memaksa perekonomian untuk melakukan beberapa perubahan kebijakan.⁶ Kebijakan liberalisasi perdagangan pertama diperkenalkan pada tahun 1985. Reformasi tersebut mencakup pengurangan pembatasan perizinan impor, liberalisasi aturan investasi asing, penggantian hambatan non-tarif dengan tarif serta pengurangan tarif. Tahun 1985 dianggap sebagai periode perubahan arah bagi negara tersebut untuk mengubah kebijakannya dari kebijakan substitusi impor menjadi kebijakan berorientasi ekspor [48].

Liberalisasi perdagangan dilanjutkan pada pertengahan tahun 1990an. Reformasi perdagangan pada periode ini telah secara signifikan mengurangi tingkat tarif rata-rata dan menyederhanakan prosedur ekspor. Monopoli impor dari produsen dalam negeri atas barang-barang pesaing dihapuskan, berbagai larangan ekspor dihapuskan dan tarif diturunkan. Tarif nominal rata-rata di sektor manufaktur menurun dari 21 persen pada tahun 1987 menjadi enam persen pada tahun 1995, dan tingkat

⁵Alasan utamanya terletak pada munculnya kebanggaan nasional setelah puluhan tahun penjajahan dan juga dampak keuntungan tak terduga dari kenaikan harga minyak yang besar pada tahun 1970an, yang memberikan kebebasan besar bagi Indonesia dalam kebijakan ekonominya.

⁶Pada tahun 1982 harga minyak mulai menurun. Selain itu, Indonesia menghadapi penurunan nilai tukar perdagangan ekspor primer tradisional lainnya. Dampaknya adalah kesulitan neraca pembayaran yang parah.

perlindungan efektif riil dari 59 persen menjadi 16 persen. Oleh karena itu, hambatan non-tarif yang mencakup 80 persen output bruto sektor manufaktur pada tahun 1986, menurun menjadi 24 persen pada tahun 1995.⁷ Tahun 1995 ditandai dengan fase kedua liberalisasi perdagangan dalam perekonomian.

Kemudian, setelah sempat terpukul oleh krisis keuangan Asia, liberalisasi perdagangan lebih lanjut terjadi dalam perekonomian. Liberalisasi perdagangan saat ini dilakukan melalui beberapa perjanjian perdagangan preferensial bilateral dan regional (PTA) pada tahun 2000-an, misalnya implementasi progresif Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Jepang-Indonesia (JIEPA). Selain itu, liberalisasi perdagangan lebih banyak dilakukan melalui penandatanganan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) pada tahun 2002, ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) pada tahun 2005, ASEAN Economic Communities (AEC) pada tahun 2007, ASEAN-Japan Comprehensive Kemitraan Ekonomi (AJCEP) pada tahun 2008, Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru (AANZFTA) pada tahun 2009, dan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-India (AIFTA) pada tahun 2010.

Pemisahan pengaturan penanaman modal, selanjutnya sesuai dengan perkembangan sistem perdagangan internasional dan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization.

⁷Alasannya adalah karena adanya permintaan dari aktor eksternal, seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan WTO, dan juga karena upaya untuk mengimbangi kesulitan ekonomi, khususnya perlambatan ekspor antara tahun 1992-1994.

Dengan disahkannya Agreement Establishing the World Trade Organization, Indonesia selalu berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam General Agreement on Tariff and Trade/GATT 1947, berikut persetujuan susulan yang telah dihasilkan sebelum perundingan Putaran Uruguay. Termasuk didalamnya yang membahas mengenai Trade Related Investment Measures/TRIMs, yang bertujuan untuk mengurangi atau menghapus segala kebijakan di bidang investasi yang dapat menghambat kegiatan perdagangan.

Seiring dengan perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri telah diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal. Sesuai dengan pertimbangan di atas, Pemerintah Indonesia membentuk aturan penanaman modal yang tidak memisahkan antara penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, yaitu Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

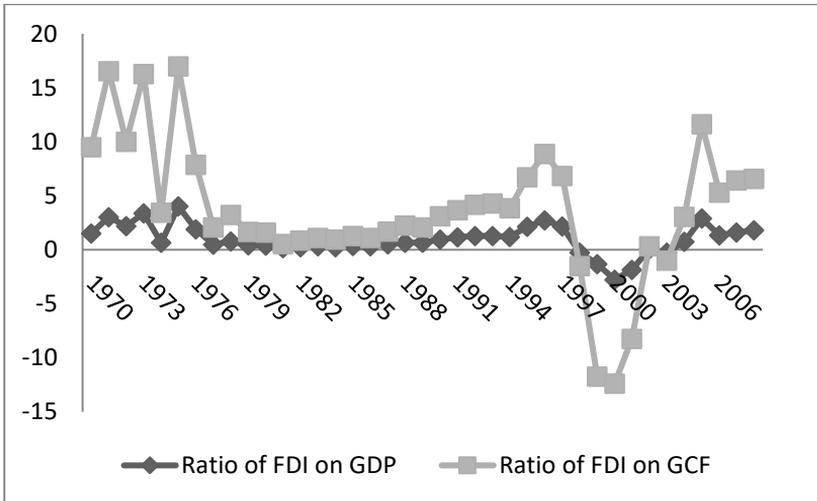
2.2 Arus investasi asing pada sektor manufaktur

Pengaruh-pengaruh FDI dalam perekonomian Indonesia selama periode panjang tahun 1970an hingga 2000an patut dikaji. Pada awal tahun 1980an hingga pertengahan tahun 1990an, Indonesia berhasil menarik

aliran masuk FDI dalam jumlah besar, namun situasi tersebut berbalik tajam setelah krisis tahun 1997. Sesaat sebelum krisis, aliran masuk FDI mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap perekonomian, yaitu sebesar 2,72 persen total output (Produk Domestik Bruto, PDB) dan 8,88 persen pembentukan modal (Gross Capital Formation, GCF). Namun pada saat krisis, aliran FDI telah terperosok ke level negatif dan pada periode setelah krisis pengaruh aliran masuk FDI bersifat dinamis dengan rata-rata hanya 1,2 persen PDB dan 4,6 persen GCF selama periode 2002-2008.⁸ Situasi ini tergambar dari tren porsi aliran masuk FDI terhadap total output (PDB) dan pembentukan modal (GCF) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.

⁸Aliran FDI bersih yang negatif perlu diinterpretasikan dengan hati-hati dan tidak boleh dilihat sebagai divestasi karena sebagian besar aliran keluar ini dikategorikan sebagai pembayaran utang oleh perusahaan milik asing [41]. Selain itu, selama periode 2000-2002, seperti negara-negara lain yang terkena dampak krisis seperti Korea Selatan, peningkatan merger dan akuisisi (M&A) telah cukup mengimbangi arus keluar FDI. Dalam kasus Indonesia, jumlah M&A meningkat dari jumlah yang dapat diabaikan menjadi \$63 miliar pada tahun 2001 dan 2002 [41]. M&A ini mencakup pembelian aset-aset bermasalah dalam program restrukturisasi industri perbankan di bawah BPPN, privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara, penempatan swasta melalui pasar modal, dan akuisisi swasta lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa motif dilakukannya M&A. Pertama, baik perusahaan asing maupun dalam negeri digunakan sebagai perusahaan kendaraan oleh pemilik sebelumnya untuk memperoleh kembali asetnya dengan harga pasar yang lebih murah. Motivasi yang kedua adalah motivasi strategis. Perusahaan asing, terutama dari Singapura, masuk ke Indonesia tanpa harus membuka operasi baru. Mereka mengambil alih operasi yang ada, untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya dan jaringan, kehadiran pasar, atau merek mereka. Motivasi lainnya adalah mitra asing mengambil bagian lebih besar dalam usaha patungan ketika mitra lokal mereka mengalami kesulitan keuangan dan masalah restrukturisasi utang. Selain itu, pada periode yang sama yaitu tahun 2000-2002, mungkin terjadi aliran masuk FDI melalui pasar ketiga, terutama Singapura [47].

Sebagai perbandingan, pada paruh pertama tahun 1990an, Indonesia cukup berhasil menarik FDI dan termasuk dalam dua belas negara penerima aliran masuk FDI terbesar di antara negara-negara berkembang. Meskipun pada saat itu FDI merupakan pemain yang relatif kecil dalam keseluruhan pembentukan modal di Indonesia, yaitu sebesar 3-6 persen dari total investasi bruto, namun FDI memainkan peran yang cukup penting dalam sektor manufaktur, karena perusahaan asing menyumbang sekitar seperempat dari total investasi bruto. output manufaktur dan ekspor [49].



Gambar 3. Rasio Aliran Masuk FDI terhadap PDB dan GCF di Indonesia, 1970-2008.

Sumber: Database Kementerian Perdagangan Indonesia dan Bank Dunia.

Sekarang beralih ke tingkat sektoral. Selama periode 1970-1999, dari total investasi asing yang disetujui, jumlah terbesar dari segi nilai masuk ke sektor manufaktur.⁹

⁹ Pada periode 1970-2003, dengan beberapa liberalisasi investasi dan meskipun beberapa industri telah dibatasi untuk investasi asing, total nilai

Secara rata-rata, investasi asing sektor manufaktur memberikan kontribusi sebesar 69,94 persen dari total persetujuan. Hal ini mencerminkan ketertarikan para pembuat kebijakan terhadap pentingnya FDI di sektor ini, karena FDI manufaktur diperkirakan akan mendatangkan lapangan kerja yang besar dan keuntungan teknologi. Namun karena kekhawatiran akan meningkatnya perkembangan sektor jasa pada tahun 2000 dan setelahnya, FDI manufaktur turun menjadi hanya 47,76 persen.¹⁰ Tabel 1 menyajikan data penanaman modal asing yang disetujui untuk periode 1970-2003.

Berdasarkan data realisasi FDI, persentase penanaman modal asing di sektor manufaktur Indonesia relatif besar dari waktu ke waktu.¹¹ Pada periode 1975-1985, ketika rezim FDI yang lebih terbuka diberlakukan, sekitar 26 persen dari total investasi asing didedikasikan untuk sektor manufaktur, namun porsi terbesar dari realisasi FDI masuk ke sektor minyak dan pertambangan. Kehadiran realisasi FDI manufaktur kemudian menurun menjadi 19 persen dari tahun 1985 hingga 1990 sebagai akibat dari tersingkirnya investasi swasta oleh investasi pemerintah.

aliran masuk FDI sebesar US\$ 56,29 miliar di lebih dari 15.000 proyek investasi asing telah disetujui.

¹⁰Sebelum krisis, sekitar tiga puluh persen dari penanaman modal asing yang disetujui disalurkan ke sektor jasa. Dalam hal ini, industri yang penting adalah listrik, gas dan air, hotel, transportasi, serta perumahan dan real estate. Pada periode pasca krisis, lebih banyak investasi yang disetujui masuk ke sektor jasa sebesar lebih dari 40 persen. Industri berikut ini: hotel, transportasi, dan listrik, gas dan air, menerima sebagian besar peningkatan FDI yang disetujui [41].

¹¹Namun sebagian besar proyek FDI yang disetujui tidak pernah dilaksanakan. Misalnya, data realisasi aliran masuk FDI tercatat hanya sebesar 17,5 persen dari total nilai persetujuan FDI selama periode 1997-2006.

Tabel 1. Persetujuan Realisasi FDI Manufaktur, 1970-2003.

Periode	Nilai FDI yang Disetujui (US\$, juta)	Persentase FDI Manufaktur terhadap Total Persetujuan
1970-74	331.02	60.32
1975-79	1.064,42	68.89
1980-84	1.553,14	81.72
1985-89	2.460,04	82.52
1990-94	11.944.18	62.74
1995-99	25.626,44	63.45
2000-03	13.319,5	47.76

Sumber: Bank Indonesia dan BKPM, laporan tahunan (berbagai terbitan)

Selanjutnya, beberapa reformasi yang dilakukan pada pertengahan tahun 1980an menyebabkan peningkatan kehadiran FDI manufaktur rata-rata sebesar 57,83 persen pada periode 1987-1997. Selain itu, terdapat perubahan struktural pada realisasi aliran masuk FDI selama periode 1998-2003. Selama periode 1998-1999, sektor manufaktur masih menerima hampir dua pertiga dari total realisasi aliran masuk FDI, namun porsinya menurun drastis setelahnya. Sebaliknya, porsi sektor jasa telah meningkat dari 24,5 persen pada periode 1997-1999 menjadi 39,9 persen pada periode 2000-2003 [41].

Terkait arus investasi, ada beberapa fakta yang menarik untuk ditelusuri. Pertama, total investasi di sektor manufaktur sebagian besar dipengaruhi oleh investasi asing sepanjang periode 1990-2010. Pada periode sebelum krisis, aliran investasi asing mencapai 47 persen dari total investasi. Pada masa krisis dan setelah krisis, arus investasi asing tercatat masing-masing sebesar 78 persen dan 66 persen dari total investasi. Kedua, investasi baru pada

sebagian besar industri sektor manufaktur didominasi oleh penanaman modal asing. Investasi dalam negeri hanya menunjukkan dominasi pada industri makanan dan minuman, kayu dan produk kayu, kertas dan produk kertas, serta industri mineral non-besi. Data realisasi aliran investasi asing dan dalam negeri periode 1990-2010 masing-masing disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Pengamatan lain terhadap pengaruh FDI pada sektor manufaktur dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 4 menyajikan data stok FDI pada sektor manufaktur Indonesia periode 1990-2010. Pertama, kehadiran FDI di sektor ini terus meningkat dari 20 persen pada periode 1990-1996, menjadi 27 persen dan 41 persen masing-masing pada periode 1997-2003 dan 2004-2010.

Kedua, jika dilihat dari jenis FDI, dalam kurun waktu yang cukup panjang yaitu tahun 1990-2003, kehadiran FDI yang bertujuan memperluas pasar (*market-seeking*) lintas industri lebih besar dibandingkan dengan FDI yang bertujuan menyasar efisiensi biaya produksi (*efficiency-seeking*). Namun pada periode terakhir tahun 2004-2010, kehadiran FDI yang menyasar efisiensi biaya produksi di beberapa industri telah melampaui FDI yang memperluas pasar. Hal ini berarti kehadiran FDI yang bertujuan efisiensi di sektor manufaktur Indonesia telah meningkat.¹²

Ketiga, meskipun distribusi FDI yang bertujuan memperluas pasar cukup tersebar, namun distribusi FDI yang menyasar efisiensi biaya produksi cukup terkonsentrasi pada beberapa industri saja, seperti industri logam dasar, produk logam, kayu dan produk kayu, serta

¹² Perkembangan FDI yang bertujuan efisiensi dalam perekonomian Indonesia dibahas pada Bagian 3.4.

industri lainnya. Kecenderungan ini kemudian dilonggarkan pada periode 2004-2010.

Tabel 2. Realisasi Inward FDI di Sektor Manufaktur Indonesia (1990-2010).*

Industry (ISIC)	1990-1997			1998-2001			2002-2010		
	Project	Value (million, US\$)		Project	Value (million, US\$)		Project	Value (million, US\$)	
Food and beverage (311-314)	132	1,786	8%	122	1,243	7%	510	4,844	16%
Textile (321-322)	248	1,487	7%	152	872	5%	496	1,681	6%
Leather, leather products, leather shoes (323-324)	92	580	3%	43	110	1%	116	668	2%
Wood (331-332)	62	297	1%	40	227	1%	166	669	2%
Paper, paper products, printing (341-342)	30	1,949	9%	39	1,081	7%	123	2,285	8%
Industrial chemical, chemical products, pharmacy (351-354)	222	6,499	28%	153	4,462	27%	441	7,028	24%
Rubber, rubber products, plastics (355-356)	99	4,146	18%	122	1,091	7%	347	1,506	5%
Non-ferrous mineral (361-362, 369, 372)	40	434	2%	41	410	2%	71	705	2%
Steel, steel products, machinery, electronics (371, 381-383)	375	4,014	18%	330	5,728	34%	980	5,830	20%
Optical, precision and medical instruments, watches (385)	13	22	0%	9	40	0%	18	45	0%
Transportations (384)	93	1,366	6%	82	1,119	7%	361	3,752	13%
Other (390)	83	288	1%	78	241	1%	302	743	2%
Total	1,489	22,868	100%	1,211	16,624	100%	3,931	29,758	100%

Sumber: BKPM.

Tabel 3. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Sektor Manufaktur Indonesia (1990-2010).*

Industry (ISIC)	1990-1997			1998-2001			2002-2010		
	Project	Value (million, US\$)		Project	Value (million, US\$)		Project	Value (million, US\$)	
Food and beverage (311-314)	242	1,948	8%	113	864	18%	388	5,329	34%
Textile (321-322)	444	5,179	20%	119	549	11%	139	812	5%
Leather, leather products, leather shoes (323-324)	80	391	2%	18	68	1%	17	27	0%
Wood (331-332)	215	1,331	5%	55	246	5%	56	369	2%
Paper, paper products, printing (341-342)	104	3,518	14%	43	725	15%	87	3,242	21%
Industrial chemical, chemical products, pharmacy (351-354)	203	4,215	17%	66	919	19%	182	2,365	15%
Rubber, rubber products, plastics (355-356)	189	1,522	6%	97	351	7%	173	544	3%
Non-ferrous mineral (361-362, 369, 372)	102	2,085	8%	29	571	12%	47	1,198	8%
Steel, stll products, machinery, electronics (371, 381-383)	217	3,795	15%	75	279	6%	213	1,531	10%
Optical, precision and medical instruments, watches (385)	6	17	0%	4	36	1%	1	1	0%
Transportations (384)	69	1,057	4%	21	153	3%	47	206	1%
Other (390)	80	229	1%	18	32	1%	29	49	0%
Total	1,951	25,286	100%	658	4,793	100%	1,379	15,672	100%

Sumber: BKPM.

Tabel 4. Tren Kehadiran FDI di Sektor Manufaktur Indonesia, 1990-2010.*

Industry (ISIC)	Percentage of FDI to total plants			Percentage of Efficiency-seeking FDI to total plants			Percentage of Market-seeking FDI to total plants		
	1990-1996	1997-2003	2004-2010	1990-1996	1997-2003	2004-2010	1990-1996	1997-2003	2004-2010
31	0.08	0.14	0.27	0.01	0.02	0.01	0.06	0.12	0.25
32	0.32	0.22	0.49	0.04	0.08	0.28	0.27	0.13	0.20
33	0.06	0.19	0.41	0.04	0.16	0.25	0.02	0.03	0.16
34	0.11	0.18	0.49	0.01	0.04	0.39	0.10	0.14	0.11
35	0.24	0.36	0.35	0.07	0.07	0.10	0.17	0.29	0.25
36	0.09	0.12	0.10	0.00	0.01	0.01	0.08	0.10	0.09
37	0.27	0.26	0.35	0.13	0.10	0.15	0.14	0.16	0.19
38	0.30	0.50	0.73	0.07	0.15	0.36	0.23	0.36	0.37
39	0.34	0.45	0.54	0.17	0.22	0.41	0.17	0.23	0.13
Total	0.20	0.27	0.41	0.06	0.09	0.22	0.14	0.17	0.20

*Nilai persentase merupakan nilai rata-rata kehadiran FDI terhadap total aset tetap. FDI yang mencari efisiensi didefinisikan sebagai pabrik asing yang mempunyai penjualan ekspor paling sedikit 65 persen, sebaliknya penanaman modal asing tersebut dikategorikan sebagai FDI yang mencari pasar.

Sumber: perhitungan sendiri dari survei industri manufaktur BPS, berbagai isu.

Pengamatan mengenai keberadaan jenis FDI di sektor manufaktur Indonesia di atas dibenarkan dalam penelitian yang secara khusus mengkaji faktor-faktor determinan FDI dalam perekonomian Indonesia periode 1992-2006 [50]. Studi tersebut menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, stabilitas politik dan tarif merupakan faktor penentu utama investasi asing di Indonesia. Semua faktor dimaksud dan khususnya faktor pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan hadirnya FDI yang mencari pasar di sektor manufaktur Indonesia.

Terkait dengan sumber investasi, dalam jangka waktu yang lama, pintu masuk asing utama ke Indonesia berasal dari negara-negara industri seperti Jepang, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1980an, mereka diikuti oleh pintu masuk lain dari negara-negara industri baru di Hong Kong, Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan (NIEs-4).¹³

Selain itu, berdasarkan stok investasi, perekonomian Asia Timur telah menjadi sumber FDI yang paling penting [41]. Pola serupa juga terjadi pada sektor manufaktur. Jepang menyumbang 15 persen dari investasi kumulatif dari tahun 1990 hingga 2002, dan NIEs-4 menyumbang sekitar 28 persen. Uni Eropa menyumbang 18 persen FDI, dengan Inggris menjadi investor terbesar. Amerika Serikat menyumbang 4 persen selama periode 1980 hingga 2002.

¹³Adapun NIEs-4, mereka menjadi sumber investasi penting selama tahun 1980an karena mereka menghadapi kenaikan biaya dan apresiasi mata uang di dalam negeri. Beberapa investasi mereka di Indonesia merupakan investasi relokasi. Selama tahun 1980an saja, negara-negara tersebut menyumbang sekitar 22 persen arus masuk FDI. Hong Kong memimpin dengan FDI sebesar 10 persen, diikuti oleh Taiwan dan Korea Selatan, masing-masing sebesar 5 dan 4 persen. Singapura menyumbang 3 persen sisanya.

Sekarang beralih ke dampak investasi asing terhadap sektor manufaktur Indonesia. Pada tahun 1990-an, ketika sektor manufaktur berada pada puncak kinerjanya, investasi asing memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap total produksi dan ekspor bruto pabrik-pabrik skala menengah dan besar. Kontribusi investasi asing meningkat dari 19 menjadi 27 persen terhadap total nilai tambah, dan 20 hingga 35 persen terhadap ekspor selama periode 1990–1996. Hal ini secara umum berlaku di semua industri di sektor ini [51].

Setelah terjadinya krisis, namun, pada tahun 1998 perbedaan intensitas ekspor menghilang. Namun, perusahaan asing mempunyai kecenderungan lebih tinggi untuk mengimpor input produksi. Oleh karena itu, perusahaan dalam negeri lebih intensif melakukan ekspor dibandingkan perusahaan asing. Hingga tahun 2000, perusahaan asing kembali menjadi importir neto, sedangkan perusahaan dalam negeri tetap menjadi eksportir neto.

Antara tahun 1990 dan 1996, lapangan kerja di perusahaan manufaktur asing tumbuh sebesar 20 persen setiap tahunnya. Oleh karena itu, jumlah lapangan kerja mereka meningkat dari 9 menjadi 16 persen dari total selama periode ini. Perusahaan asing relatif besar. Rata-rata perusahaan asing dan milik negara mempekerjakan sekitar 600 pekerja per pabrik, atau empat kali lipat dari rata-rata pekerja di perusahaan dalam negeri. Selain itu, produktivitas tenaga kerja di perusahaan asing rata-rata dua kali lipat dibandingkan rata-rata perusahaan dalam negeri, hal ini sebagian besar disebabkan oleh ukuran dan pilihan industri yang mereka pilih [51].

Ringkasnya, aliran masuk FDI ke Indonesia mempunyai peranan yang cukup besar, termasuk dalam

pengembangan sektor manufaktur. Oleh karena itu, pengambil kebijakan terus memperbaiki iklim investasi dan bahkan menawarkan sejumlah insentif. Sampai saat ini, setelah krisis, Indonesia cukup peka terhadap kebutuhan untuk meningkatkan sumber daya investasi asing, dan telah memulai beberapa kampanye intensif untuk mendorong investor asing kembali ke perekonomian.

Selain itu, faktor lain yang berpengaruh adalah *FDI-trade nexus* pada sektor manufaktur Indonesia. Keterlibatan negara-negara Asia Timur dalam kegiatan perdagangan dan investasi internasional telah berkembang pesat sejak pertengahan tahun 1980an, dan mengalami perlambatan selama krisis keuangan Asia Timur.¹⁴ Demikian pula, perdagangan dan investasi regional menjadi semakin penting di negara-negara berkembang di Asia Timur. Dalam hal ini, peran FDI dalam kegiatan perekonomian negara-negara berkembang di Asia Timur menjadi lebih penting karena afiliasi asing dari perusahaan multinasional terlibat secara aktif dalam produksi, lapangan kerja, pembelian dan ekspor, di negara-negara penerima FDI. Permasalahan ini dan dampaknya terhadap pengembangan FDI yang bertujuan

¹⁴Kajian terhadap perdagangan internasional negara-negara Asia Timur menunjukkan bahwa peningkatan besar dalam ekspor dan impor terjadi pada tahun 1980-an dan 1990-an, sebelum negara-negara tersebut dilanda krisis keuangan pada tahun 1997. Pangsa ekspor negara-negara Asia Timur terhadap ekspor dunia meningkat dari 15 dan 15 persen pada tahun 1980 menjadi 25 dan 21 persen pada tahun 1999. Mirip dengan ekspor, impor ke negara-negara berkembang di Asia Timur meningkat secara signifikan pada tahun 1980an dan 1990an sebelum krisis. Secara khusus, impor mereka meningkat 6,5 kali lipat antara tahun 1980 dan 1997, sebelum mengalami penurunan pada tahun 1998 akibat krisis. Ekspansi impor yang pesat oleh negara-negara berkembang di Asia Timur mengakibatkan peningkatan pangsa impor mereka di dunia, dari 8,1 persen pada tahun 1980 menjadi 18 persen pada tahun 1997 [52].

efisiensi di sektor manufaktur Indonesia akan diuraikan pada bagian ini.

Meningkatnya perkembangan perdagangan internasional di Asia Timur juga menyebabkan meningkatnya kecenderungan perdagangan intra-regional. Pengamatan tersebut dapat dilihat pada indikator ukuran absolut dan ukuran relatif perdagangan intra-regional Asia Timur pada Tabel 5. Ukuran absolut yang mewakili rasio perdagangan intra-regional di Asia Timur terhadap total perdagangan dunia meningkat dari 8,3 persen pada tahun 1990 menjadi 11,9 persen. Hal ini berarti perdagangan intra-regional di Asia menjadi lebih penting bagi perdagangan dunia.

Indikator ukuran relatif total perdagangan yang mewakili rasio perdagangan intra-regional di Asia Timur terhadap total perdagangan perekonomian Asia Timur juga meningkat dari 43,2 persen pada tahun 1990 menjadi 51,8 persen pada tahun 2001. Hal ini berarti bahwa perdagangan intra-regional telah meningkat. menjadi semakin penting bagi perekonomian Asia Timur. Selain itu, impor intra-regional tumbuh lebih cepat dibandingkan ekspor intra-regional. Artinya, perdagangan intra-Asia Timur lebih penting sebagai sumber impor dibandingkan sebagai tujuan ekspor. Temuan ini menunjukkan pola perdagangan di mana perekonomian Asia Timur melakukan impor di dalam kawasan dan menjual ekspor ke luar kawasan.

Tabel 5. Perdagangan Intra-regional di Asia Timur, 1990 dan 2001.

Indikator (%)	1990	2001
Ukuran Mutlak	8.3	11.9
Ukuran Relatif		
- Jumlah perdagangan	43.2	51.8
- Ekspor	39.8	47.5
- Impor	47.2	56.9

Sumber: data Urata [53]

Terkait dengan investasi asing, aliran masuk FDI ke negara-negara Asia Timur tumbuh lebih dari 12 kali lipat dari tahun 1985 hingga 1999. Sebagai hasil dari ekspansi yang cepat ini, pangsa negara-negara berkembang di Asia Timur terhadap arus masuk FDI dunia meningkat dari 8 persen pada tahun 1999. pada tahun 1985 menjadi 22 persen pada tahun 1994, sebelum menurun tajam menjadi 9 persen pada tahun 1999. Asia Timur meningkatkan porsinya terhadap arus masuk FDI dunia pada periode sebelum krisis hingga tahun 1997 seiring dengan peningkatan porsi tersebut dari 7,6 persen pada tahun 1985 menjadi 19 persen pada tahun 1996 sebelumnya. menurun sebesar 10 persen pada tahun 1999 [52].¹⁵

¹⁵Ada dua fenomena penting mengenai arus masuk FDI di Asia Timur selama krisis keuangan (52). Salah satunya adalah ketahanannya bahkan selama periode krisis ekonomi, kecuali negara-negara yang terkena dampak seperti Korea Selatan, Malaysia, Indonesia dan Thailand. Dibandingkan dengan bentuk aliran modal internasional lainnya seperti pinjaman bank, yang menurun drastis setelah krisis, aliran masuk FDI relatif stabil di negara-negara berkembang di Asia Timur. Fenomena penting lainnya adalah meningkatnya merger dan akuisisi (M&A) sebagai cara masuk, khususnya setelah krisis ekonomi. Pola *greenfield investment* pada masa lalu merupakan cara masuk yang disukai perusahaan multinasional di Asia Timur, karena adanya pembatasan partisipasi ekuitas.

Menariknya, perkembangan FDI di Asia Timur juga menyebabkan pola pertumbuhan investasi intra-regional. Hal ini terlihat pada Tabel 6. Pertama, dari segi nilai, jumlah FDI di Asia Timur mengalami peningkatan selama periode 1990-2000. Kedua, persentase FDI Asia Timur terhadap total aliran masuk FDI dunia di kawasan ini relatif signifikan, berkisar antara 20 persen hingga 40 persen pada paruh pertama tahun 1990an. Kontribusi ini sebagian besar meningkat pada separuh periode lainnya, kecuali NIEs-4. Hal ini berarti investasi intra-regional di Asia Timur semakin penting bagi perekonomian di wilayah tersebut.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi peningkatan signifikan dalam perdagangan luar negeri dan arus masuk FDI di kawasan Asia Timur terbagi dalam dua kelompok faktor [54]. Kelompok pertama, menyangkut faktor dalam negeri dan kelompok kedua menyangkut faktor eksternal. Faktor domestik terpenting dalam kaitan ini adalah liberalisasi kebijakan perdagangan dan penanaman modal asing (FDI) di negara-negara Asia Timur.¹⁶ Selain itu,

Namun krisis ekonomi mengubah hal ini. Negara-negara berkembang di Asia Timur yang memiliki minat besar untuk menarik FDI melonggarkan pembatasan tersebut. Ditambah dengan pelanggaran rezim FDI, penurunan tajam nilai mata uang dan aset di Asia Timur telah mendorong perusahaan multinasional untuk melakukan merger dan akuisisi.

¹⁶ Negara-negara berkembang di Asia Timur memulai liberalisasi perdagangan dan kebijakan FDI sebagai bagian dari kebijakan reformasi struktural yang lebih komprehensif. Perubahan kebijakan tersebut disebabkan adanya persepsi bahwa liberalisasi dan deregulasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Liberalisasi perdagangan dan FDI menyebabkan perluasan ekspor dan masuknya FDI karena hal ini menggeser insentif dari produksi substitusi impor ke produksi ekspor sehingga meningkatkan daya tarik negara-negara tersebut di mata investor asing. Negara-negara berkembang di Asia Timur meliberalisasi rezim impor mereka dengan menurunkan tarif dan hambatan non-tarif dari awal tahun 1980an hingga awal tahun 1990an. Hong Kong dan Singapura sebenarnya telah mengadopsi rezim perdagangan bebas. Tiongkok dan

kondisi makroekonomi yang baik, tercermin pada tingkat harga yang relatif stabil, serta berlimpahnya pasokan tenaga kerja terdidik dan berupah rendah, berkontribusi terhadap peningkatan ekspor dan masuknya investasi asing langsung (FDI).

Indonesia telah menurunkan tarif rata-rata mereka secara signifikan. Hambatan non-tarif telah dikurangi di banyak negara Asia Timur, kecuali di Tiongkok. Yang paling luar biasa adalah Indonesia, yang mengurangi hambatan non-tarif dari 95 persen pada tahun 1984-1987 menjadi kurang dari 3 persen pada tahun 1991-1993 [52]. Kebijakan FDI ke dalam negeri diliberalisasi pada pertengahan tahun 1980an, ketika perekonomian Asia Timur mulai menyadari bahwa aliran masuk FDI akan mendorong pertumbuhan ekonomi [54]. Banyak negara berkembang di Asia Timur mengurangi pembatasan akses pasar dengan mengurangi jumlah industri yang masuk dalam daftar negatif dan melonggarkan batasan kepemilikan saham asing. Dalam hal ini, Korea Selatan dan ASEAN-4 (Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand) telah mengadopsi langkah-langkah liberalisasi FDI yang substansial dalam upaya menarik investor asing. Selain itu, sejumlah negara memperkenalkan insentif seperti *tax holiday* untuk menarik lebih banyak FDI. Liberalisasi perdagangan dan penanaman modal asing juga mengalami kemajuan dalam kerangka regional dan global. Para anggota ASEAN membentuk ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tahun 1992. Liberalisasi FDI di ASEAN telah berlangsung setelah pembentukan ASEAN Investment Area (AIA) pada tahun 1998. ASEAN juga telah membuat sejumlah perjanjian perdagangan bebas dengan perekonomian Asia Timur lainnya: Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Pada skala yang lebih global, perundingan perdagangan multilateral APEC dan GATT/WTO juga berkontribusi terhadap liberalisasi perdagangan dan FDI bagi perekonomian Asia Timur.

Tabel 6. Aliran Masuk FDI Intra-regional di Asia Timur, 1990-2000.*

Investor	Penerima FDI					
	Cina		NIE-4		ASEAN-4	
	1990-1995	1996-2000	1990-1995	1996-2000	1990-1995	1996-2000
Asia Timur	12.854	14.239	1.603	4.876	12.507	15.477
Jepang	3.072	3.511	1.336	2.766	6.042	7.306
NIE-4	8.364	9.671	145	987	5.561	6.517
Jumlah (Dunia)	60.349	55.997	5.209	18.338	30.995	33.836
Persentase Asia Timur terhadap Total	21.3	25.4	30.8	26.6	40.4	45.7

* Nilai tahunan rata-rata (juta, US\$). Ini adalah nilai perkiraan, karena ada beberapa perbedaan dalam definisi data.

Sumber: data Kimura dan Ando [55].

Mengenai faktor eksternal, penyesuaian nilai tukar secara substansial, khususnya nilai tukar yen-dolar pada pertengahan tahun 1980an, penting dalam mendorong ekspor dan arus masuk FDI di kawasan Asia Timur. Pada tahun 1990an, ledakan ekonomi yang berkepanjangan di Amerika Serikat menyediakan pasar yang besar bagi ekspor Asia Timur. Selain itu, kemajuan teknis luar biasa yang dicapai dalam teknologi informasi, yang mengurangi biaya komunikasi, memfasilitasi operasi global oleh perusahaan multinasional. Terakhir, meningkatnya persaingan di antara perusahaan-perusahaan multinasional telah mendorong aktivitas global mereka, sehingga memperluas perdagangan dan penanaman modal asing.

Pengamatan sebelumnya terhadap pesatnya perkembangan investasi dan perdagangan internasional di kawasan Asia Timur menunjukkan adanya hubungan dengan struktur perekonomian negara-negara Asia Timur.

Hal ini sebenarnya berkaitan dengan karakteristik pola perdagangan intra-regional dan antar-industri di Asia Timur. Bagian selanjutnya akan menjelaskan permasalahan ini, dengan secara khusus mengidentifikasi investor utama investasi internasional di kawasan. Mereka adalah perusahaan multinasional dari Jepang dan Amerika Serikat. Banyak perusahaan multinasional lain dari NIE Asia Timur seperti Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan juga telah membangun jaringan produksi mereka di wilayah ini, khususnya di bidang tekstil dan alas kaki.¹⁷

Sumber utama FDI di Asia Timur adalah perusahaan multinasional Jepang.¹⁸ Sejalan dengan itu, selama tahun 1990an, lebih dari 30 persen perdagangan Jepang dilakukan dengan negara-negara Asia Timur (Tiongkok, NIE-4, ASEAN-5). Pada tahun 2000, pangsa perdagangan total mencapai hampir 40 persen, dan sebagian besar mencakup perdagangan mesin umum, mesin listrik, peralatan transportasi, dan mesin presisi [55].

Dalam hal ini, sejumlah besar perusahaan multinasional Jepang di Asia Timur diketahui merupakan perusahaan yang mencari efisiensi [52]. Dengan demikian, perusahaan multinasional ini menempatkan diri mereka dalam perekonomian di mana mereka dapat menjalankan operasinya dengan biaya paling rendah. Misalnya, perusahaan multinasional Jepang di sektor permesinan

¹⁷ Perusahaan multinasional Korea Selatan di Asia Timur biasanya merupakan tipe yang menyasar efisiensi biaya produksi [56].

¹⁸ Pengamatan Urata [52] terhadap pola perdagangan dan investasi perusahaan multinasional Jepang selama periode 1980an-1990an menunjukkan bahwa: pertama, perusahaan multinasional Jepang telah berkontribusi terhadap promosi perdagangan luar negeri di Asia, khususnya perdagangan intra-regional; dan kedua, perusahaan multinasional Jepang menjadi lebih aktif dalam melakukan produksi intra-regional dan pembagian kerja antar-proses.

dan elektronik, yang mencakup sebagian besar kegiatan multinasional Jepang di Asia Timur, membagi proses produksi mereka menjadi beberapa sub-proses, dan menempatkan setiap sub-proses dalam perekonomian di mana anak perusahaan mereka dapat beroperasi. sub-proses tertentu yang paling efisien. Setelah itu, anak perusahaan mengekspor sebagian produknya ke suatu perekonomian di wilayah tempat produk akhir dirakit, dan kemudian mengekspor produk akhir rakitan tersebut ke pasar lain.

Pada dasarnya, perusahaan multinasional Jepang akan menempatkan sub-proses di negara-negara dimana input faktor yang dibutuhkan relatif berlimpah, misalnya pekerja berketerampilan tinggi untuk produksi suku cadang dan pekerja berupah rendah untuk operasi perakitan. Pola serupa dalam jaringan produksi intra-regional dan perdagangan antar-industri juga berlaku untuk perusahaan multinasional Jepang yang bergerak di bidang peralatan transportasi dan industri otomotif.

Perusahaan multinasional AS juga aktif dalam membangun jaringan produksi di sektor manufaktur Asia Timur. Berbeda dengan sistem produksi MNC Jepang yang cenderung tertutup, jaringan produksi yang dibangun oleh MNC AS cenderung lebih terbuka bagi perusahaan dari negara lain seperti Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan [52]. Memang benar, strategi dasar perusahaan multinasional AS adalah menjalin hubungan dengan produsen yang paling efisien tanpa memandang kewarganegaraan mereka. Seperti perusahaan multinasional Jepang, perusahaan multinasional AS telah berkontribusi meningkatkan orientasi perdagangan di negara penerima investasi di Asia Timur. Pada tahun 2000, afiliasi manufaktur perusahaan multinasional AS di Asia

Timur mengekspor hampir 60 persen penjualan mereka [57].¹⁹ Namun, mereka tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan perdagangan intra-regional, karena ikatan mereka dengan pasar AS kuat [52].

Semua perkembangan dalam sistem dan jaringan produksi regional ini telah memberikan kontribusi terhadap perdagangan intra-regional dan antar-industri yang lebih besar di Asia Timur, serta di sektor manufaktur Indonesia. Oleh karena itu, pada sektor manufaktur Indonesia, data kehadiran FDI periode 1990-2010 menunjukkan kecenderungan yang semakin mengarah pada tipe pencarian efisiensi (Tabel 4 pada Subbab 2.1), khususnya pada beberapa industri dengan kode ISIC dari 32, 33, 34, 38, 39.

¹⁹Terkait dengan faktor penentu investasi, perusahaan multinasional AS lebih memilih keterbukaan perdagangan di negara penerima investasi, dibandingkan insentif yang mereka peroleh [57].

BAB 3

DAMPAK INVESTASI ASING

3.1 Beberapa kajian empiris

Bagian ini bertujuan untuk menyajikan survei literatur terhadap teori dan bukti dampak FDI terhadap negara berkembang. Bagian ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saling terkait, seperti apa latar belakang masuknya FDI ke negara-negara berkembang? Apa saja faktor penentu masuknya FDI di negara-negara berkembang? Dan, sehubungan dengan hal tersebut, bagaimana dampak FDI terhadap pembangunan ekonomi negara tuan rumah? Seberapa baik teori-teori yang tersedia menjelaskan dampak FDI di negara-negara berkembang?

Survei literatur ini bermaksud memperoleh tipologi dampak-dampak FDI pada produktivitas negara penerima investasi. Sumber utama survei adalah publikasi artikel-artikel ilmiah yang terindeks dalam National Bureau of Economic Research (NBER, <http://www.nber.org>) dan EconPapers (<http://www.econpapers.repec.org>). NBER dan EconPapers merupakan repositori artikel ilmiah bereputasi khususnya bagi kajian-kajian empiris di bidang investasi asing, liberalisasi perdagangan, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Survei literatur dilakukan terhadap kajian-kajian tentang dampak-dampak investasi asing pada perekonomian negara-negara berkembang yang diterbitkan hingga tahun 2012.

Berbagai penelitian telah mengeksplorasi dampak pertumbuhan dan produktivitas FDI terhadap perekonomian Indonesia, termasuk sektor manufaktur. Beberapa di antaranya didasarkan pada pengujian ekonometrik pada data survei industri tingkat agregat atau

sektoral, sementara yang lain merupakan studi kasus di tingkat perusahaan atau sektoral. Bagian ini menyajikan tinjauan singkat terhadap studi-studi tersebut. Rangkumannya disajikan pada Lampiran 2.

Mengenai dampak pertumbuhan FDI terhadap perekonomian Indonesia, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan [58,59]. Bachtiar [58] meneliti dampak pertumbuhan FDI di Indonesia dengan menggunakan data time series tahunan (1970-2000) dan menggunakan model persamaan tunggal sederhana, ia mengidentifikasi tanda positif untuk koefisien agregat aliran masuk FDI dengan PDB sebagai variabel dependen.

Khaliq dan Noy [59] menyelidiki dampak FDI terhadap pertumbuhan dengan menggunakan data sektoral untuk aliran masuk FDI ke Indonesia selama periode 1997-2006. Studi ini menemukan bahwa secara agregat, FDI terlihat membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, jika memperhitungkan perbedaan tingkat pertumbuhan antar sektor, dampak positif investasi asing tidak lagi terlihat, termasuk pada sektor manufaktur. Ketika mengkaji berbagai dampak lintas sektor, hasil estimasi menunjukkan temuan yang beragam. Sangat sedikit sektor yang menunjukkan dampak positif FDI, dan salah satu sektor, yaitu pertambangan dan penggalian, bahkan menunjukkan dampak negatif yang besar dari aliran masuk FDI.

Terkait dengan produktivitas, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan [47,59,60,61,62,63,64]. Negara dan Firdausy [47] menggunakan analisis data panel periode 1995-2005. Hasil estimasi mereka menunjukkan bahwa kehadiran FDI di Indonesia berpengaruh positif terhadap produktivitas perusahaan domestik. Hal ini juga dibuktikan bahwa mekanisme intra-

industri dan keterkaitan ke depan berpengaruh positif terhadap produktivitas perusahaan domestik. Namun, kurangnya bukti yang terungkap dalam kasus manfaat FDI melalui mekanisme keterkaitan ke belakang.

Khaliq dan Noy [59] yang menggunakan data panel pada tingkat sektoral periode 1997-2006 menemukan dampak negatif FDI terhadap pertumbuhan output sektor pertambangan Indonesia, sedangkan dampak positif muncul di beberapa industri manufaktur. AswicaHyono [60] menguji hubungan antara produktivitas faktor total (*total factor productivity*, TFP) dan kepemilikan pada sektor manufaktur dengan menggunakan data survei industri. Hasil yang diperoleh tidak meyakinkan, dan dampak FDI terhadap TFP bersifat spesifik pada industri tertentu. Misalnya, TFP di perusahaan asing lebih tinggi hanya pada dua industri: peralatan transportasi dan produk kulit.

Takii dan Ramstetter [61] mempelajari dampak FDI terhadap produktivitas tenaga kerja dengan menggunakan data survei industri tahun 1975-2000. Mereka mengukur produktivitas tenaga kerja sebagai nilai tambah per pekerja dan mengontrol variasi ukuran dan umur perusahaan. Mereka menemukan bahwa perusahaan asing memiliki produktivitas tenaga kerja yang jauh lebih tinggi dibandingkan perusahaan dalam negeri, terutama di industri kimia, listrik, dan mesin presisi.

Lebih lanjut, Takii [62] mengkaji sejauh mana limpahan produktivitas dari perusahaan yang berafiliasi dengan asing ke perusahaan dalam negeri. Ia menemukan bahwa besarnya dampak limpahan berkorelasi positif dengan kontribusi perusahaan asing dalam penyerapan lapangan kerja. Selain itu, dampak buruknya cenderung lebih kecil pada industri yang terdapat kesenjangan

teknologi yang besar antara perusahaan asing dan dalam negeri.

Temenggung [63] menggunakan data tingkat perusahaan sektor manufaktur Indonesia selama periode 1975-2000 untuk menemukan bukti adanya dampak limpahan produktivitas dari investasi asing. Studi ini juga menguji pengaruh rezim kebijakan perdagangan terhadap dampak FDI. Secara umum, studi ini menemukan dampak positif dan signifikan terhadap produktivitas sektor manufaktur di Indonesia. Temuan ini terutama diterapkan pada sektor padat karya dan rezim perdagangan yang diliberalisasi.

Jacob dan Meister [64] menyampaikan studi mengenai dampak teknologi internasional pada sektor manufaktur di Indonesia, dan secara khusus meneliti hubungannya dengan rezim perdagangan. Fokus mereka adalah untuk mempelajari pentingnya kebijakan perdagangan dalam mendorong peningkatan produktivitas nasional. Model regresi mereka mampu mengidentifikasi adanya dampak teknologi yang disebabkan oleh jalur FDI dan perdagangan, terutama setelah diperkenalkannya rezim perdagangan liberal. Selain itu, karakteristik sektoral dan struktur pasar industri juga berperan dalam mempengaruhi dampak teknologi terhadap perubahan produktivitas.

Kesimpulannya, meskipun terdapat upaya liberalisasi yang berkelanjutan dan keterlibatan investasi asing yang besar dalam perekonomian Indonesia, termasuk sektor manufaktur, bukti mengenai dampak FDI terhadap pertumbuhan ekonomi dan produktivitas masih beragam. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung mengkaji dampak FDI pada tingkat agregat atau mengabaikan keberadaan berbagai jenis FDI yang

masuk (*inward FDI*), yang merupakan sumber kekurangan dalam studi-studi terdahulu terhadap dampak FDI.

Untuk menyelidiki hubungan antara kehadiran FDI dan perusahaan di sektor manufaktur Indonesia, penulis mengikuti pendekatan standar di lapangan, yang mengadopsi bentuk fungsional fungsi produksi Cobb-Douglas²⁰. Pada bagian ini, kita akan membahas masalah teknis dalam memperkirakan model ini secara detail. Pekerja keras dari pendekatan ini dapat ditentukan oleh fungsi produksi linierisasi berikut untuk industri $j = 1, 2, \dots, j$.

$$y_{it} = a_{it} + \beta_1 l_{it} + \beta_2 k_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

dimana y_{it} nilai tambah riil perusahaan pada waktu it ; a_{it} adalah istilah yang diasumsikan untuk menggambarkan kemajuan teknis, yang sering disebut produktivitas faktor total (TFP); k_{it} adalah masukan modal riil, yang didekati dengan aset tetap berwujud; l_{it} adalah jumlah pekerja yang dipekerjakan; dan ε_{it} merupakan kesalahan estimasi (*errors*). Semua variabel riil dihitung berdasarkan deflator PDB tahun dasar 2000 dan penulis melakukan transformasi logaritmik untuk melinearisasikan fungsi produksi.

Istilah untuk kemajuan teknis, a_{it} , dimasukkan dalam Persamaan 1 sebagai faktor pergeseran yang tidak bergantung pada input. Salah satu cara untuk memodelkan pengaruh kehadiran FDI terhadap produktivitas suatu Perusahaan adalah dengan menghubungkan istilah ini dengan kehadiran FDI. Penulis berasumsi bahwa kemajuan teknis a_{it} dipengaruhi oleh

²⁰Faktanya, sebagian besar penelitian empiris mengadopsi pendekatan ini dengan menggunakan fungsi produksi tipe Cobb-Douglas.

kehadiran FDI. Untuk industri j , penulis menetapkan hubungan antara kemajuan teknis dan kehadiran FDI sebagai berikut.

$$a_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 FDI_{j\exists i,t} + \alpha_2 FDI_{j\nexists i,t} + \delta_1 Export_{it} + \delta_2 D_t + \epsilon_{it} \quad (2)$$

di sini FDI dengan beberapa subskrip yang akan dijelaskan selanjutnya mewakili keberadaan FDI. Selanjutnya, persamaan 2 ditentukan untuk menangkap dua faktor yang cukup penting. Pertama, untuk menangkap pengaruh tipe FDI terhadap produktivitas, spesifikasi ini mencakup indikator *dummy* tipe FDI ($Export$). Jenis FDI diidentifikasi berdasarkan persentase ekspor perusahaan asing. Perusahaan asing dengan ekspor minimal 65 persen digolongkan sebagai tipe FDI yang mencari efisiensi produksi di negara penerima (*efficiency-seeking FDI*).²¹ Jika tidak, maka perusahaan asing diklasifikasikan sebagai tipe FDI yang mencari perluasan pasar ke negara penerima (*market-seeking FDI*). Secara teknis, variabel *dummy* untuk efek ini diberi nilai 1 untuk mewakili *efficiency-seeking FDI*, dan jika tidak, diberi nilai 0 untuk menunjukkan adanya *market-seeking FDI*.

Kedua, *time dummies* (D_t) dimasukkan untuk mengetahui pengaruh perubahan rezim perdagangan terhadap perekonomian Indonesia. Pengenalan *time dummies* diharapkan dapat menangkap perubahan dalam lingkungan bisnis yang berlaku untuk semua perusahaan

²¹Batasan ini ditetapkan dengan mengacu pada kebijakan BKPM. Kebijakan tersebut mengakui perusahaan dengan persentase ekspor minimal 65 persen sebagai perusahaan berorientasi ekspor. Hanya perusahaan yang memenuhi kriteria ini yang akan diberikan sejumlah insentif fiskal atau memenuhi syarat untuk menggunakan fasilitas EPZ.

yang terlibat dengan cara yang sama, yang disebabkan oleh perubahan dalam rezim kebijakan perdagangan internasional. Pendekatan ini juga digunakan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Temenggung [63] dan Jacob dan Meister [64].

Kajian ini membagi periode sampel tahun 1990-2010 menjadi tiga periode: sebelum krisis (1990-1997), krisis (1998-2002), dan pasca krisis (2003-2010) dalam penetapan time dummies. Salah satu fitur penting dari kajian ini adalah membandingkan perbedaan dampak yang ditimbulkan oleh perubahan rezim kebijakan pada periode pasca krisis, yang ditandai dengan kecenderungan besar perekonomian Indonesia menuju PTA bilateral dan regional (lihat Subbab 2.1), dan juga dampak masa krisis.²² Time dummies ini mengakomodasi jeda satu tahun agar perubahan rezim kebijakan dapat diterapkan.

Penulis memilih untuk menggunakan time dummies untuk mengukur perubahan rezim kebijakan perdagangan dalam perekonomian Indonesia, daripada menggunakan indikator keterbukaan perdagangan seperti Sachs-Warner Index (SWI) atau indeks bias perdagangan (TBI), dengan memperhatikan alasan-alasan berikut. Pertama, efektivitas SWI dalam mengukur tingkat keterbukaan perdagangan telah banyak dikritik [65,66].²³

²² Perjanjian Perdagangan Preferensial secara analitis rumit karena keduanya meliberalisasi dan mendistorsi perdagangan. Perdagangan diliberalisasi karena beberapa aliran barang ke negara-negara anggota memiliki pembatasan yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya, namun perdagangan juga terdistorsi karena barang-barang yang masuk ke negara anggota akan dikenakan tarif yang berbeda tergantung pada asal barang tersebut.

²³ Penggunaan SWI untuk mengukur tingkat keterbukaan perdagangan [70] sudah cukup populer, khususnya untuk studi empiris lintas negara. Namun, Harrison dan Hanson [65] menemukan kurangnya kekuatan indeks, setelah menguraikan lima variabel (tarif, kuota, premi pasar gelap,

Kedua, meskipun penggunaan ukuran langsung mengenai keterbukaan perdagangan TBI [67,68,69] lebih dapat diandalkan, namun ukuran semacam ini tidak sesuai dengan tujuan penulis untuk mempelajari konteks perubahan rezim kebijakan perdagangan di Indonesia. Tujuan khusus penulis adalah untuk membedakan dampak perubahan rezim kebijakan perdagangan Indonesia pada periode sebelum dan sesudah krisis; dimana pada periode terakhir rezim kebijakan perdagangan ditandai dengan kecenderungan besar pada PTA bilateral dan regional. Dalam hal ini, penggunaan TBI saja tidak akan menjadi tindakan yang efektif pada periode pasca krisis.²⁴ Demikian pula, karena penulis juga ingin mengidentifikasi dampak krisis keuangan Asia yang memberikan guncangan besar terhadap kinerja perekonomian, maka penggunaan TBI tidak relevan dalam kasus ini.

Oleh karena itu, meskipun penggunaan time dummies di sini juga mengalami kekurangan dalam mengukur secara tepat dampak rezim kebijakan perdagangan terhadap perekonomian, secara seimbang menganggap penulis bahwa ini adalah pilihan yang paling terjangkau untuk mencapai tujuan.

monopoli negara atas ekspor utama, sistem ekonomi sosialis atau non-sosialis) dari indeks komposit SWI. Studi lain yang dilakukan oleh Rodriguez dan Rodrik [66] menemukan bahwa indeks keterbukaan perdagangan (termasuk SWI) bermasalah sebagai ukuran hambatan perdagangan, karena indeks tersebut sangat berkorelasi dengan sumber kinerja ekonomi buruk lainnya. Selain itu, metode empiris yang digunakan untuk memastikan hubungan antara kebijakan perdagangan dan pertumbuhan mempunyai beberapa kekurangan yang serius, jika dihilangkan maka akan menghasilkan temuan yang jauh lebih lemah.

²⁴TBI menggunakan rasio rata-rata pemungutan bea masuk terhadap total impor dan pemungutan pajak ekspor terhadap total ekspor, namun tanpa mempertimbangkan dampak pengalihan perdagangan PTA.

Dengan memasukkan Persamaan 2 ke Persamaan 1, kita memperoleh bentuk tambahan fungsi produksi yang menggabungkan efek FDI serta jenis FDI dan variabel rezim kebijakan perdagangan.

$$y_{it} = \alpha_0 + \beta_1 l_{it} + \beta_2 k_{it} + \alpha_1 FDI_{j\exists i,t} + \alpha_2 FDI_{j\nexists i,t} + \delta_1 \text{Export}_{it} + \delta_2 D_t + v_{it} \dots (3)$$

dimana $v_{it} = \varepsilon_{it} + \epsilon_{it}$. Perlu dicatat bahwa tujuan kajian ini adalah untuk menyelidiki pengaruh kehadiran FDI di setiap perusahaan di setiap industri. Untuk memenuhi tujuan ini, Persamaan 3 mencakup $FDI_{j\exists i,t}$ sebagai bagian output yang diasumsikan dihasilkan oleh FDI di industri j dimana perusahaan i berafiliasi, sedangkan $FDI_{j\nexists i,t}$ sebagai bagian output di semua industri lain kecuali industri tersebut j . Penulis berpendapat bahwa variabel pertama diasumsikan mewakili variabel proksi kehadiran FDI dalam suatu industri, sedangkan variabel kedua merupakan variabel proksi kehadiran FDI di luar industri tersebut. Definisi rinci mengenai kehadiran FDI dan justifikasinya diberikan berikut ini.

Dengan menggunakan format data panel, penulis menyarankan ukuran kehadiran FDI yang terkait dengan industri berikut ini:

$$FDI_{j\exists i,t} = \frac{\sum_{i \in j} (w_{it} y_{it})}{\sum_{i \in j} y_{it}} \dots (4)$$

Di mana $w_{it} = \frac{FDI_{it}}{K_{it}}$ singkatan dari bobot FDI untuk sebuah perusahaan i pada waktu t , yaitu rasio investasi asing langsung pada perusahaan tersebut terhadap nilai total aset tetap, yang semuanya merupakan nilai riil, dengan definisi variabel lainnya sama dengan yang di atas.

Pendekatan ini mengikuti pengukuran dampak buruk intra-industri serupa yang diterapkan dalam Aitken dan Harrison [19].

Pembaca yang berpengetahuan luas di bidang ini akan segera mengetahui definisi dari $FDI_{j\neq i,t}$ sama dengan variabel proksi standar untuk apa yang disebut sebagai 'efek horizontal' FDI dalam literatur. Namun, untuk tujuan kajian ini, penulis menyarankan alternatif pengganti variabel proksi populer lainnya untuk 'efek vertikal' FDI, yaitu: $FDI_{j\neq i,t}$ seperti yang diformalkan dalam Persamaan 5.

$$FDI_{j\neq i,t} = \frac{\sum_{i \neq j} (w_{it} y_{it})}{\sum_{i \neq j} y_{it}} \dots (5)$$

Dalam sebagian besar studi empiris, koefisien teknis dari tabel input-output (IO) digunakan untuk mengukur sejauh mana industri bergantung satu sama lain melalui rantai pasokan-pemintaan ini, yang mana dampak potensial dari kehadiran FDI dievaluasi. Ini mengikuti studi Javorcik [71] yang mengukur efek vertikal FDI.

Gagasan utama di balik pengukuran ini terletak pada keyakinan bahwa adanya limpahan FDI terwujud melalui aliran barang setengah jadi yang diasumsikan diproduksi oleh FDI. Dalam kerangka ini, misalnya, industri j akan memperoleh manfaat dari dampak limpahan ke depan ketika industri tersebut membeli input antara yang dipasok oleh industri lain; negara ini juga akan menikmati dampak limpahan ke belakang (*backward spillover effect*) ketika negara tersebut memasok input perantara ke industri lain. Mengingat adanya keterkaitan antar industri melalui penawaran dan permintaan barang setengah jadi, kehadiran FDI di industri j dapat

mempengaruhi industri-industri lain sepanjang porsinya di industri tersebut. Namun penulis berargumentasi bahwa meskipun pendekatan ini mempunyai kelebihan tersendiri,²⁵ pendekatan ini dapat bias.

Kekhawatiran pertama berkaitan dengan asumsi koefisien teknis yang konstan. Secara umum, tabel IO dan koefisien teknis dipublikasikan secara berkala dengan interval yang agak panjang. Di Indonesia, informasi tabel IO dikumpulkan setiap 5 tahun dan harus menunggu satu tahun lagi hingga dipublikasikan. Mengingat lamanya waktu yang diperlukan untuk membuat tabel IO baru, sulit untuk menemukan alasan yang baik untuk meyakini bahwa koefisien tidak berubah selama bertahun-tahun setelah versi terakhir tabel IO diterbitkan (kumpulan data mencakup waktu yang agak lama) jangka waktu 21 tahun). Oleh karena itu, masuk akal untuk meragukan bahwa koefisien teknis yang sudah ketinggalan zaman yang digunakan untuk menyalurkan efek FDI ke industri lain dapat menjadi ukuran yang baik untuk mengukur sejauh mana saling ketergantungan antar industri.

Kedua, yang lebih penting, metode tradisional untuk mengukur dampak FDI vertikal dengan menggunakan tabel IO dapat melewatkan saluran penting dari apa yang disebut Hukum Kaldor-Verdoorn, dan eksternalitas lain yang berasal dari kehadiran FDI. Hukum Kaldor-Verdoorn berpendapat bahwa perusahaan menjadi lebih

²⁵Salah satu keuntungan terpentingnya terletak pada kenyataan bahwa ia dapat menguraikan variabel proksi untuk efek vertikal menjadi efek ke belakang dan ke depan. Namun, perlu diingat bahwa penulis tidak menguraikan dampak vertikal menjadi dampak ke belakang dan ke depan karena tujuan utamanya bukan *untuk* mengungkap saluran limpahan FDI vertikal. Namun demikian, sangatlah bermanfaat untuk membahas sifat dan titik lemah metodologi tradisional untuk mengukur alternatif bagi metodologi tersebut.

produktif ketika mereka memproduksi lebih banyak [72,74] untuk diskusi lengkap dan survei komprehensif mengenai studi teoritis dan empiris Hukum). Ketika mereka memproduksi lebih banyak untuk memenuhi peningkatan permintaan pasar, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas mereka dengan serangkaian praktik peningkatan produktivitas seperti belajar sambil melakukan, memperdalam pembagian kerja, dan meningkatkan pengeluaran penelitian dan pengembangan [74].

Oleh karena itu, kecepatan perluasan ukuran pasar secara keseluruhan memang penting, dan FDI yang memperluas pasar mungkin ada hubungannya dengan hal tersebut. Di sisi lain, mungkin terdapat eksternalitas murni yang menyertai investasi asing.²⁶ Contohnya termasuk tekanan persaingan yang dilakukan oleh perusahaan asing dengan tingkat teknologi yang lebih tinggi, yang mengakibatkan fasilitasi adopsi teknologi dan upaya peningkatan produktivitas lainnya. Mengingat saluran-saluran tambahan penting yang melaluinya FDI berperan

²⁶ Daripada penjelasan tradisional, alasan mengapa rasio produk FDI terhadap total output dalam suatu industri ditafsirkan sebagai proksi dampak horizontal mungkin lebih baik diberikan dalam logika yang sama dengan dampak vertikal yang disarankan di sini. Satu-satunya perbedaan di antara keduanya adalah bahwa pendekatan pertama mencoba mengidentifikasi dampak-dampak tersebut *dalam* industri yang sedang dipertimbangkan. Kadang-kadang, limpahan FDI semacam ini disebut efek 'keuangan' dan lebih disukai untuk diskusi teoretis. Misalnya saja, Saggi [73] membedakan secara tegas antara efek 'keuangan' dan efek 'murni' dan berargumentasi bahwa efek 'murni'lah yang dapat disebut sebagai dampak teknologi dari investasi asing (FDI). Meskipun pendekatan ini secara teoritis canggih, penulis menganggap 'semua' dampak lebih relevan, karena penulis lebih tertarik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membantu mengembangkan perekonomian tuan rumah dan standar hidup masyarakat di negara tuan rumah. Kekhawatiran ini menyiratkan bahwa tindakan ini mencakup dampak finansial dan dampak langsung dari investasi asing.

dalam meningkatkan produktivitas domestik, ukuran dampak vertikal Javorcikian tampaknya terlalu sempit untuk studi ini²⁷.

Tujuan mendasar dari kajian ini, yaitu menyelidiki kemungkinan dampak FDI yang unik di seluruh industri, alih-alih mengidentifikasi saluran yang tepat dimana limpahan FDI menyebar, memerlukan pengukuran yang paling komprehensif untuk kehadiran FDI yang dapat menggabungkan dampak FDI antar-industri yang seluas-luasnya.

Oleh karena itu, kelemahan dan sifat sempitnya proksi Javorcikian untuk efek vertikal kehadiran FDI membawa kita pada pendekatan alternatif, yang diformalkan dengan Persamaan 5²⁸ yang didefinisikan sebagai rasio keseluruhan dari nilai yang diciptakan oleh FDI terhadap nilai total industri.²⁹

²⁷ Kekhawatiran ini mungkin mempunyai implikasi penting terhadap interpretasi hasil empiris. Sebagai contoh, ketika pengukuran yang mengandalkan keterkaitan langsung berdasarkan tabel IO digunakan untuk dampak vertikal, tidak signifikannya estimasi koefisien tidak serta merta mengindikasikan ketidakefektifan FDI, karena hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan asing tidak terlibat dengan perusahaan dalam negeri. perusahaan. Secara khusus, hal ini dapat terjadi ketika mayoritas FDI merupakan produk dari strategi outsourcing perakitan perusahaan multinasional: yaitu, hal ini dapat terjadi ketika perusahaan asing direlokasi di negara tuan rumah untuk mengimpor suku cadang dari perusahaan induk atau/ dan negara lain dan merakitnya untuk diekspor ke luar negeri, sehingga hanya menunjukkan sedikit hubungan dengan perusahaan domestik di negara tuan rumah; tanpa keterkaitan tersebut, signifikansi estimasi tersebut mungkin tidak berlaku secara ekonomi.

²⁸ Mengingat kelemahan variabel proksi untuk efek vertikal FDI, cara terbaik untuk mengukur tingkat kehadiran FDI adalah dengan mengumpulkan informasi tentang seberapa besar keterlibatan mereka dengan negara penerima investasi, sehingga mengurangi porsi FDI yang terisolasi di perekonomian domestik. Sayangnya, data tersebut tidak tersedia.

²⁹ Sebenarnya, variabel 'share' mungkin tidak tepat untuk mengukur keberadaan FDI karena dua alasan. Pertama, kemajuan teknis perusahaan-

Untuk pengukuran efek horizontal (Persamaan 4) dan efek vertikal (Persamaan 5), untuk menguji pengaruh karakteristik industri terhadap limpahan FDI, dijalankan estimasi untuk setiap industri pada tingkat ISIC 2 digit. Estimasi pada agregasi ISIC tingkat tinggi dipilih untuk mendapatkan distribusi kehadiran FDI yang signifikan dan seimbang di seluruh industri, yang penting untuk mendapatkan hasil yang lebih dapat diandalkan.³⁰ Hal ini

perusahaan dalam negeri dapat disebabkan oleh dampak FDI atau usaha mereka sendiri, atau keduanya. Mengingat bahwa penyebut pada Persamaan 3 dan 4 memuat total output yang diproduksi oleh perusahaan domestik dan juga perusahaan asing, maka yang diukur oleh variabel bagian adalah output relatif yang diasumsikan diproduksi oleh FDI. Faktanya, dalam kerangka ini, faktor apa pun, seperti ledakan ekonomi dan, khususnya, peningkatan produktivitas yang disebabkan oleh upaya perusahaan domestik yang dapat meningkatkan total output, dapat mengurangi kepentingan relatif dari perusahaan asing, sehingga menyebabkan perkiraan yang terlalu rendah terhadap nilai produksi. dampak investasi asing. Kedua, jika total output dijumlahkan di masing-masing perusahaan dalam kumpulan data panel, jumlah tersebut dapat menjadi lebih besar seiring berjalannya waktu seiring dengan meluasnya cakupan sampel yang tercatat dan kumpulan data pun demikian. Selain itu, penjumlahan FDI per tahun tidak mempunyai alternatif lain, karena dapat bervariasi karena perubahan cakupan dari waktu ke waktu. Idealnya, alternatif yang paling masuk akal untuk analisis data panel mungkin adalah indikator 'tingkat' FDI baik pada tingkat perusahaan maupun industri, bukan pada saham. Sayangnya, kumpulan data tersebut saat ini tidak tersedia.

³⁰Dari segi ekonometrika, disarankan agar penelitian dengan hubungan ukuran perusahaan perlu mengendalikan dampak industri pada tingkat agregasi yang tinggi, misalnya tingkat 2 digit, terutama ketika menggunakan kumpulan data yang mencakup banyak industri [76,77]. Dengan pendekatan ini, kesalahan standar dikoreksi dengan mempertimbangkan fakta bahwa ukuran potensi dampak limpahan bersifat spesifik industri, sementara pengamatan dalam kumpulan data dilakukan pada tingkat perusahaan. Kegagalan untuk melakukan koreksi seperti itu dapat menyebabkan bias yang serius dalam kesalahan estimasi, sehingga menghasilkan temuan palsu mengenai signifikansi statistik dari variasi agregat. Hal ini menjadi lebih penting untuk studi yang dilakukan dalam konteks negara berkembang, dimana perusahaan besar cenderung melakukan diversifikasi dan beroperasi di lebih dari satu industri.

untuk menghindari kecenderungan perusahaan asing tertarik pada industri yang lebih produktif pada tingkat agregasi ISIC yang lebih rendah, dan kemudian hasil estimasi kemungkinan besar akan menemukan hubungan positif antara porsi FDI dan produktivitas perusahaan domestik meskipun tidak ada dampak buruknya terjadi. Selain itu, hal ini memungkinkan kita untuk melakukan perbandingan hasil dengan penelitian lain yang menerapkan pendekatan yang sama, misalnya studi Temenggung [63]. Namun, penulis menyadari bahwa pendekatan ini mungkin terlalu menyederhanakan perbedaan struktural antara efek horizontal dan vertikal FDI. Artinya, efek vertikal yang dihasilkan dari keterkaitan rantai pasokan juga dapat terjadi dalam industri ISIC 2-digit yang sama.

Selanjutnya, perhatikan bahwa memperkirakan fungsi produksi seperti Persamaan 2 dengan kuadrat terkecil biasa (OLS) mungkin mengalami bias yang disebabkan oleh sifat endogen dari input faktor [77,78,79]. Bagi perusahaan yang memaksimalkan keuntungan, respons terbaiknya adalah dengan segera meningkatkan input faktor yang tersedia, ketika perusahaan tersebut melihat adanya guncangan produktivitas yang positif (tetapi tidak diamati oleh para ahli ekonometrik), dan sebaliknya. Karena guncangan produktivitas akan diambil dari istilah kesalahan dalam model ekonometrik, kemungkinan besar istilah kesalahan tersebut dikorelasikan dengan variabel masukan, yang pada gilirannya dapat membuat perkiraan OLS untuk elastisitas masukan terhadap keluaran menjadi bias. Dengan asumsi bahwa investasi merupakan fungsi yang meningkat secara monoton sehubungan dengan guncangan produktivitas, bergantung pada persediaan modal, Olley dan Pakes [79]

mengusulkan untuk memperkenalkan investasi sebagai variabel proksi untuk guncangan produktivitas.

Namun, Levinsohn dan Petrin [80] kemudian berargumentasi bahwa investasi mungkin tidak dapat merespons guncangan dengan lancar karena besarnya biaya penyesuaian yang terkait dengannya, dan sebagai gantinya mengusulkan input perantara (misalnya listrik atau material) sebagai penggantinya. Keuntungan terbesar dari pendekatan alternatif ini terletak pada kenyataan bahwa input antara yang lebih murah cenderung memberikan respons yang lebih penuh terhadap guncangan produktivitas dibandingkan investasi, jika biaya penyesuaiannya tidak kecil. Selain itu, karena kumpulan data yang digunakan lebih banyak melewatkan observasi investasi dibandingkan input material (perantara), penulis memilih prosedur Levinsohn-Petrin untuk memperkirakan koefisien tenaga kerja dan modal seperti pada Persamaan 1. Prosedur ini dapat diterapkan dengan modul STATA *levpet* dikembangkan oleh Petrin, Poi, dan Levinsohn [81]. Setelah parameter elastisitas input dan output yang bebas dari kontaminasi guncangan produktivitas diperkirakan, kita dapat menghitung TFP bebas bias (logaritma) sebagai berikut:

$$\hat{a}_{it} = y_{it} - \hat{\beta}_1 l_{it} - \hat{\beta}_2 k_{it} \dots (6)$$

di sini \hat{a}_{it} adalah perkiraan TFP untuk perusahaan i di industri j pada tahun t dan $\hat{\beta}'$ s adalah koefisien Levinsohn-Petrin untuk tenaga kerja dan modal yang terkait, yang semuanya bebas dari bias yang mungkin timbul dari simultanitas antara guncangan produktivitas dan input faktor. Agar selengkap mungkin, kajian ini akan menggunakan nilai tambah (Persamaan 3) dan TFP

Levinsohn-Petrin (Persamaan 2) sebagai variabel dependen, dan kemudian membandingkan hasilnya satu sama lain untuk memeriksa kekokohan pengujian ini.

Terdapat dua hipotesis yang dikembangkan dalam kajian ini:

1. H0: Jenis FDI yang mencari pasar dan mencari efisiensi masing-masing memiliki tingkat hubungan yang sama dengan tingkat output dan produktivitas faktor total di sektor manufaktur Indonesia;
2. H0: Masing-masing rezim kebijakan perdagangan yang berbeda memiliki tingkat hubungan yang sama dengan tingkat output dan produktivitas faktor total di sektor manufaktur Indonesia.

Studi empiris ini didasarkan pada data tingkat perusahaan yang diambil dari Survei Manufaktur Tahunan yang tidak dipublikasikan (Survei Tahunan Perusahaan Industri Pengolahan) dilakukan dan disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sampel data mencakup periode 1990-2010.³¹

Survei ini dilakukan setiap tahun dan pada prinsipnya mencakup semua perusahaan manufaktur skala menengah dan besar yang terdaftar, dengan sedikitnya 20 karyawan. Jumlah perusahaan yang tercakup dalam kumpulan data terus meningkat dari waktu ke waktu dari 16.536 pada tahun 1990 menjadi 24.342 pada tahun 2010, dengan jumlah total observasi bertambah hingga 453.342.

³¹Survei tahunan ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1970, namun dengan beberapa keterbatasan pada cakupan datanya. Oleh karena itu untuk menghindari permasalahan ketimpangan data, kajian ini melewatkan penggunaan data sebelum tahun 1980 [82,84]. Penelitian lain menggunakan data backcast periode sebelum tahun 1980 [62,63,84]. Penelitian ini tidak menerapkan pendekatan tersebut, agar konsisten dengan penggunaan hanya data primer yang diambil dari survei langsung.

Selain itu, dataset juga berisi informasi detail mengenai perusahaan milik asing. Tergantung pada tahunnya, survei ini berisi hingga 160 variabel yang mencakup klasifikasi industri (ISIC 5 digit), status kepemilikan (domestik, asing, pemerintah), lokasi (kecamatan, kabupaten, provinsi), keluaran, masukan, nilai tambah, aset, perubahan aset, tenaga kerja (produksi dan non-produksi, upah, pendidikan), bahan mentah, mesin, energi (listrik, bahan bakar dan pelumas, dll), pendapatan, pengeluaran non-produksi, investasi, dan pertanyaan khusus lainnya. Data tambahan mencakup tabel input-output dan beberapa deflator harga input dan output.

Survei ini memberikan dataset yang baik dan panjang untuk mengkaji variabel-variabel yang digunakan dalam kajian ini. Namun, ada beberapa kelemahan pada dataset yang memerlukan perhatian cermat dan proses pembersihan dataset yang ekstensif. Pertama, penulis meminimalkan gangguan akibat tidak adanya pelaporan, kesalahan pelaporan, dan kesalahan nyata dalam keypunching data.³²

³² Undang-undang pemerintah menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan hanya akan digunakan untuk tujuan statistik. Namun, beberapa laporan resmi berkomentar bahwa beberapa perusahaan sengaja salah melaporkan informasi keuangan karena khawatir otoritas pajak atau pesaing dapat mengakses data tersebut. Tidak mengherankan, khususnya di negara-negara berkembang, terdapat tingginya tingkat respons yang tidak melaporkan dan salah terhadap banyak pertanyaan survei, terutama pertanyaan yang memerlukan keahlian akuntansi, seperti penggantian dan nilai buku aset tetap. Selain itu, karena analisis efek tetap dalam kajian ini hanya mengakui variasi dalam perusahaan pada skala logaritmik, kesalahan pelaporan yang kurang atau lebih tidak akan membuat hasil menjadi bias jika setiap perusahaan secara konsisten melakukan kesalahan pelaporan dari waktu ke waktu. Sekalipun tingkat kesalahan pelaporan di suatu perusahaan bervariasi dari waktu ke waktu, hasilnya tidak bias asalkan kesalahan pelaporan tersebut tidak berkorelasi dengan atribut

Karena kajian ini mencakup cukup banyak observasi, maka dimungkinkan untuk menghilangkan semua data yang hilang. Kedua, dalam beberapa periode, BPS melakukan perubahan nama variabel. Oleh karena itu, prosedur untuk memeriksa dan memastikan pengumpulan variabel yang tepat pada setiap tahun kuesioner disampaikan.

Ketiga, BPS secara berkala mengubah klasifikasi ISIC yang digunakan dalam survei antara tahun 1990 dan 2010. Untuk periode 1990-1998 ISIC Code rev. 2 digunakan, dan 1999-2010 Kode ISIC rev. 3 digunakan [82]. Oleh karena itu, untuk klasifikasi lebih lanjut dalam kajian ini, tabel konkordansi digunakan untuk mencocokkan kode klasifikasi industri yang konsisten. Terakhir, seluruh data moneter termasuk data output dan modal dalam kajian ini dideflasi menggunakan deflator PDB dari database Bank Dunia, yang digunakan untuk mendapatkan rangkaian yang konsisten. Sehubungan dengan beberapa pertimbangan yang disebutkan dalam Bagian 3.1, studi ini menyederhanakan klasifikasi industri dengan menggabungkan 5 digit level I SIC ke dalam klasifikasi level 2 digit, menghasilkan sembilan sektor industri dari 31 hingga 39, yang daftarnya disajikan pada Tabel 7.

perusahaan lainnya di sisi kanan regresi. Tingkat non-respons adalah antara 6 dan 12 persen dalam hal perusahaan.

Tabel 7. Klasifikasi ISIC pada Manufaktur Indonesia.

No	ISIC Rev.2	Keterangan	Intensitas Teknologi
1	31	Makanan dan minuman	4
2	32	Tekstil	4
3	33	Kayu dan produk kayu	4
4	34	Kertas dan produk kertas	4
5	35	Bahan kimia dan apotek	2, 3
6	36	Mineral bukan logam	3
7	37	Logam dasar	3
8	38	Produk logam	1, 2
9	39	Yang lain	3

Catatan: 4 = Tingkat teknologi rendah; 3 = Tingkat teknologi sedang-rendah; 2 = Tingkat teknologi menengah-tinggi; 1 = Tingkat teknologi tinggi (Sumber: UNSO).

Setelah memangkas data, akhirnya dibuat kumpulan data panel dengan 277.393 observasi, dimana 47.776 perusahaan diberi nomor identifikasi uniknya selama periode registrasi. Dikombinasikan dengan variasi jumlah total observasi selama bertahun-tahun, fakta bahwa semua perusahaan belum melakukan kompilasi lengkap setiap tahunnya menyiratkan bahwa panel yang dibangun adalah panel yang tidak seimbang dengan kesenjangan waktu. Struktur data panel akhir dirangkum dalam Tabel 8 dan Tabel 9.

Tabel 8. Struktur Data: berdasarkan tahun.

Year	Frequency	Percent(%)
1990	13,219	4.77
1991	12,969	4.68
1992	14,250	5.14
1993	14,553	5.25
1994	15,191	5.48
1995	16,883	6.09
1996	14,230	5.13
1997	15,576	5.62
1998	14,445	5.21
1999	1,255	0.45
2000	12,737	4.59
2001	11,686	4.21
2002	12,878	4.64
2003	12,793	4.61
2004	13,039	4.70
2005	12,993	4.68
2006	13,067	4.71
2007	12,842	4.63
2008	14,328	5.17
2009	14,205	5.12
2010	14,254	5.14
Total	277,393	100.00
Total # of Plants	47,776	

Tabel 9. Struktur Data: menurut industri.

Industries	Frequency	Percent (%)
31	82,001	29.56
32	53,634	19.34
33	39,215	14.14
34	11,297	4.07
35	29,883	10.77
36	27,013	9.74
37	2,190	0.79
38	25,447	9.17
39	6,713	2.42
Total	277,393	100.00

3.2 Perusahaan asing vs perusahaan domestik

Sebelum menyelidiki dampak FDI terhadap produktivitas perusahaan domestik di berbagai industri, penulis memulai analisis dengan menyediakan gambaran kasar perbedaan perusahaan domestik dan perusahaan luar. Perbedaan struktural di antara keduanya dapat diidentifikasi dengan mengestimasi fungsi produksi tertambah (Persamaan 3) dan persamaan TFP (Persamaan 2) yang mengenalkan istilah interaksi antara variabel efek horizontal dan vertikal FDI dan variabel *dummy* untuk perusahaan asing, sehingga FDI dampak terhadap perusahaan asing dapat dibedakan dengan dampak terhadap perusahaan domestik.

Untuk validitas estimasi, pertama-tama penulis memperkirakan persamaan yang diperbesar untuk data yang dikumpulkan oleh OLS, dan kemudian memperkirakan persamaan efek tetap dan efek acak. model panel. Untuk kasus estimasi OLS gabungan, penulis menyertakan dummies industri 2-digit untuk

memungkinkan perbedaan produktivitas tetap antar industri. Namun perlu dicatat, penulis menyadari bahwa estimasi OLS dengan nilai tambah sebagai variabel dependen mungkin mengalami masalah simultanitas seperti yang diperingatkan di atas. Selain itu, ada kemungkinan bahwa beberapa variabel penting untuk karakteristik perusahaan tertentu mungkin dihilangkan dalam spesifikasi. Faktanya, semua karakteristik yang tidak teramati tersebut akan dibiarkan dalam istilah kesalahan s_t , yang dapat mengakibatkan kesimpulan yang menyesatkan s_t . Untuk mengendalikan variabel spesifik perusahaan yang tidak teramati, penulis juga mengestimasi model efek tetap untuk data panel yang seluruh variabel invariannya dihilangkan.³³ Semua perkiraan kesalahan standar bersifat cluster (individu) - kesalahan standar yang kuat.

Tabel 10 melaporkan hasil estimasi ini dengan kesalahan standar yang kuat di dalam tanda kurung. Dengan memperkirakan berbagai format persamaan output dan produktivitas, penulis menemukan beberapa perbedaan menarik antara perusahaan asing dan perusahaan domestik. Pertama, koefisien untuk variabel *dummy* untuk perusahaan asing (*Foreign-Invested*), yang

³³Pembaca yang cermat mungkin akan segera mempertimbangkan model efek acak untuk data panel dan menyarankan prosedur pengujian yang sesuai untuk pemilihan model seperti uji Hausman. Namun, pengujian tersebut tidak diperlukan karena ada kemungkinan besar bahwa *error term* fungsi produksi tidak independen terhadap variabel penjelas yang dimasukkan dalam spesifikasi karena karakteristik spesifik perusahaan yang tidak teramati yang diambil dari *error term*. Perlu diperhatikan juga bahwa, dalam kerangka model efek tetap, koefisien untuk variabel *dummy* waktu dan regional tidak akan diestimasi, karena keduanya merupakan variabel invarian waktu. Karena fokusnya adalah mengidentifikasi korelasi antara produktivitas perusahaan dan kehadiran FDI, permasalahan ini tidak tepat sasaran.

diberi nilai 1 jika suatu perusahaan merupakan penerima FDI, dan 0 jika tidak) signifikan secara statistik. Signifikansi statistik dari koefisien yang diperkirakan menunjukkan bahwa tingkat output dan produktivitas perusahaan asing (efek produktivitas sendiri) berbeda secara signifikan dengan tingkat output dan produktivitas perusahaan domestik. Perusahaan asing mempunyai produktivitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan perusahaan domestik.

Di samping itu, sangat disayangkan mendapatkan kesimpulan yang konsisten bahwa keduanya mempunyai tanda yang berbeda: estimasi yang dilakukan dengan pooled OLS dan model efek acak adalah positif, sedangkan estimasi dengan model efek tetap memiliki tanda negatif, yang memerlukan pertimbangan lebih hati-hati mengenai kredibilitasnya. dari spesifikasi model. Perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa model data panel mungkin lebih disukai daripada model OLS gabungan karena, berbeda dengan model data panel, model data panel tidak mempertimbangkan karakteristik spesifik perusahaan serta perbedaan industri. Untuk koefisien *Investasi Asing*, uji Hausman dilakukan, dan mendapatkan hasil yang mendukung model efek tetap dibandingkan model efek acak. Jika hal ini terjadi, kita mungkin akan menyimpulkan bahwa perusahaan asing kurang produktif dibandingkan perusahaan domestik.

Limpahan FDI, semua koefisien untuk efek horizontal signifikan secara statistik pada tingkat yang tinggi. Meskipun tanda-tandanya beragam (negatif pada model gabungan dan model efek tetap, namun positif pada model efek acak), uji Hausman untuk koefisien ini memberikan hasil yang lebih baik pada model efek tetap dibandingkan model efek acak. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa,

dengan menggabungkan perusahaan-perusahaan asing dan domestik dalam industri manufaktur di Indonesia, kehadiran FDI dalam industri yang melibatkan perusahaan-perusahaan asing mempunyai dampak negatif pada tingkat output dan produktivitas perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan temuan Aitken dan Harrison [19].

Namun, koefisien interaksi antara variabel *s* untuk *investasi asing* dan *H horizontal* menunjukkan tanda positif dan signifikan secara statistik untuk estimasi kedua model data panel. Koefisien positif signifikan untuk istilah interaktif ini berarti bahwa pengaruh horizontal relatif positif terhadap perusahaan asing. Faktanya, ketika kita mengambil hasil estimasi untuk model efek tetap, besaran koefisiennya bahkan melebihi koefisien negatif untuk variabel *Horizontal* diperkirakan. Hasilnya, dampak horizontal FDI terhadap perusahaan-perusahaan asing secara keseluruhan menjadi lebih positif. Temuan ini mungkin menunjukkan bahwa perusahaan asing adalah pihak yang paling diuntungkan, bukan korban dampak horizontal investasi asing. Hal ini juga konsisten dengan temuan Aitken dan Harrison [19].

Tabel 10. Perusahaan Asing vs. Perusahaan Domestik.

Variables	Pooled OLS		Fixed Effect Model		Random Effect Model	
	Value-added	TFP	Value-added	TFP	Value-added	TFP
(1) Capital	0.317*** (0.00)		0.113*** (0.00)		0.207*** (0.00)	
(2) Labor	0.929*** (0.00)		0.979*** (0.01)		1.022*** (0.01)	
(3) Foreign-Invested	0.610*** (0.04)	1.113*** (0.05)	-0.135* (0.06)	-0.257*** (0.06)	0.264*** (0.05)	0.195*** (0.05)
(4) Horizontal	-0.108*** (0.03)	-0.260*** (0.03)	-0.195*** (0.03)	-0.231*** (0.03)	0.386*** (0.02)	0.278*** (0.03)
(3)*(4)	0.006 (0.06)	0.063 (0.06)	0.674*** (0.10)	0.847*** (0.11)	0.454*** (0.08)	0.744*** (0.09)
(5) Vertical	-0.141** (0.04)	-0.188*** (0.05)	-0.155*** (0.04)	-0.300*** (0.04)	-0.653*** (0.04)	-0.755*** (0.04)
(3)*(5)	0.109 (0.13)	0.801*** (0.14)	0.089 (0.17)	0.487** (0.18)	0.023 (0.15)	0.481** (0.17)
(6) Export Share	0.029*** (0.01)	0.602*** (0.01)	-0.029* (0.01)	-0.004 (0.01)	0.024* (0.01)	0.092*** (0.01)
(3)*(6)	-0.464*** (0.02)	-0.854*** (0.02)	-0.067* (0.03)	-0.074* (0.03)	-0.190*** (0.03)	-0.174*** (0.03)
1990-1997	0.080*** (0.01)	0.091*** (0.01)	0.108*** (0.01)	0.111*** (0.01)	0.095*** (0.01)	0.118*** (0.01)
1998-2002	0.082*** (0.01)	0.042*** (0.01)	0.054*** (0.01)	0.070*** (0.01)	0.071*** (0.01)	0.076*** (0.01)
2003-2010	0.240*** (0.01)	0.126*** (0.01)	0.149*** (0.01)	0.182*** (0.01)	0.179*** (0.01)	0.175*** (0.01)

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01

Dummies for industry are included.

Berbeda dengan kebijaksanaan umum dalam literatur limpahan FDI yang menyatakan bahwa dampak vertikal FDI adalah positif, estimasi kajian ini menyajikan dampak vertikal FDI yang secara statistik negatif. Seperti yang ditunjukkan, seluruh koefisien untuk efek vertikal (variabel *Vertikal*) adalah negatif dan signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 1 persen, yang menyiratkan bahwa kehadiran investasi asing di luar industri yang berafiliasi dengan perusahaan asing berdampak negatif pada tingkat output dan produktivitas. s perusahaan Indonesia. Namun, hal ini mungkin tidak berlaku bagi perusahaan asing. Koefisien interaksi antara variabel proksi efek vertikal FDI dan variabel *dummy*

untuk perusahaan asing menunjukkan bahwa efek vertikal berbeda secara signifikan antara perusahaan asing dan domestik. Tepatnya, koefisien untuk suku interaksi bernilai positif secara signifikan, dan beberapa nilai absolutnya bahkan lebih besar dibandingkan nilai efek vertikal. Hal ini menunjukkan bahwa dampak vertikal terhadap produktivitas berdampak positif bagi perusahaan asing.

Mengenai pengaruh jenis FDI terhadap produktivitas sektor manufaktur Indonesia, kita mendapatkan hasil yang tidak meyakinkan. Estimasi dari gabungan OLS dan model efek acak adalah positif dan signifikan secara statistik, sedangkan model efek tetap menghasilkan hasil negatif, namun secara statistik tidak signifikan. Terlebih, interaksi antara *Export* dan *Foreign-Invested* secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan asing kurang terkait dengan jenis FDI yang mencari efisiensi. Yang terakhir, seluruh koefisien jangka waktu yang mewakili fase-fase liberalisasi kebijakan perdagangan adalah positif dan sangat signifikan, yang menyiratkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut telah mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Kesimpulannya, ketika mempertimbangkan seluruh perusahaan di seluruh industri di sektor manufaktur Indonesia, kita menemukan bahwa terdapat beberapa bukti dampak positif kehadiran FDI terhadap tingkat output dan produktivitas perusahaan-perusahaan di Indonesia. Namun, dampaknya pada perusahaan asing dan perusahaan domestik berbeda. Secara umum, perusahaan-perusahaan asing telah menikmati keuntungan lebih banyak dari limpahan FDI.

Meskipun analisis komparatif antara perusahaan asing dan domestik di atas memberi kita gambaran besar mengenai dampak limpahan FDI terhadap produktivitas perusahaan di Indonesia, sebaiknya fokus pada perusahaan domestik saja. Selain itu, sulit untuk mengatakan bahwa hasil di atas merupakan hasil yang pasti karena tidak mempertimbangkan karakteristik spesifik industri.

Kemungkinan besar dampak limpahan FDI berbeda antar industri. Oleh karena itu, akan bermanfaat jika memperkirakan dampak limpahan FDI untuk masing-masing industri secara terpisah. Kajian ini memperkirakan model efek tetap dan acak untuk sembilan industri dengan tingkat ISIC 2-digit. Selanjutnya, untuk pemeriksaan ketahanan, penulis memperkirakan model dengan nilai tambah sebagai variabel terikat (Persamaan 3) serta produktivitas faktor total (Persamaan 2).

Hasil estimasi model *fixed-effect* dilaporkan dalam dua tabel. Estimasi yang menggunakan nilai tambah sebagai variabel dependen disajikan pada Tabel 11. Estimasi lain yang menggunakan TFP sebagai variabel dependen disajikan pada Tabel 12. Berdasarkan model estimasi *fixed-effect*, *horizontal spillover effect* untuk masing-masing industri bervariasi. Koefisien untuk industri kertas dan produk kertas, bahan kimia dan farmasi, mineral bukan logam, logam dasar, produk logam dan lain-lain bernilai positif dan sebagian besar memiliki tingkat signifikansi yang tinggi, sedangkan koefisien untuk beberapa industri makanan dan minuman, tekstil, kayu dan produk kayu, bersifat negatif dan signifikan secara statistik (Tabel 11).

Pengecualian terdapat pada hasil Tabel 12 untuk industri mineral bukan logam yang mempunyai koefisien

negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa untuk beberapa industri yang terkena dampak positif dari dampak horizontal FDI, perusahaan domestik mendapatkan keuntungan dari kehadiran perusahaan asing di industri tersebut. Namun, bagi industri-industri lain yang terkena dampak negatif, perusahaan-perusahaan domestik menderita akibat tersingkirnya perusahaan-perusahaan asing dari pesaing mereka.

Mengenai dampak vertikal FDI, hasilnya menunjukkan bahwa hanya sedikit industri yang mempunyai koefisien positif dan ada pula yang mempunyai koefisien signifikansi kecil. Industri tersebut adalah industri makanan dan minuman, industri mineral bukan logam, dan logam dasar (pada Tabel 11); atau hanya industri makanan dan minuman serta logam dasar (Tabel 16). Koefisien industri lainnya menunjukkan tanda negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa hanya sedikit industri di sektor manufaktur yang memiliki tingkat keterkaitan yang relatif tinggi untuk memungkinkan terjadinya transfer teknologi dari perusahaan asing ke mitra domestik melalui mekanisme rantai pasokan.

Sekarang beralih ke dampak jenis FDI. Berbeda dengan ekspektasi positif dari dampak ini, koefisien *Export* menunjukkan bahwa hanya dua industri pada Tabel 15 (yaitu: kayu dan produk kayu serta bahan kimia dan farmasi) yang mempunyai tanda positif, atau tiga industri pada Tabel 16 (yaitu: tekstil, kayu dan produk kayu serta bahan kimia dan apotek); dan semuanya tidak terlalu penting. Industri lainnya menunjukkan tanda-tanda negatif. Perlu diingat bahwa *Export* ditetapkan untuk mewakili kehadiran FDI yang bertujuan efisiensi. Oleh karena itu, kajian ini hanya menemukan sedikit bukti mengenai pengaruh positif FDI yang mencari efisiensi

(relatif terhadap FDI yang mencari pasar) terhadap kinerja perusahaan di Indonesia.

Dampak rezim kebijakan perdagangan juga diperiksa dalam estimasi model efek tetap. Seluruh koefisien menunjukkan hasil yang positif dengan tingkat signifikansi yang tinggi untuk semua industri dan tiga rezim perdagangan yang berbeda, kecuali industri mineral non-logam. Selain itu, nilai absolut koefisien rezim kebijakan perdagangan pada periode liberalisasi kedua (2003-2010) lebih tinggi dibandingkan pada periode liberalisasi pertama (1996-1997), untuk masing-masing industri. Selain itu, nilai absolut koefisien pada periode krisis (1998-2002) lebih rendah dibandingkan pada periode liberalisasi pertama. Ini menyiratkan dua temuan penting. Mengingat adanya efek FDI, kebijakan liberalisasi lebih lanjut akan meningkatkan kinerja sektor manufaktur Indonesia di berbagai industri, namun periode krisis menghambat kinerja tersebut.

Selanjutnya, untuk pemeriksaan ketahanan, penulis juga melaporkan hasil model *random-effect*. Hasil estimasi model *random-effect* disajikan pada Tabel 17 dan Tabel 18. Secara umum, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil estimasi model *random-effect* dan hasil estimasi model *fixed-effect*. Hasil untuk dampak FDI secara horizontal dan vertikal, serta dampak rezim kebijakan perdagangan dalam estimasi ini konsisten dengan hasil sebelumnya dalam model tetap. Pengecualian terjadi pada dampak jenis investasi asing yang menunjukkan tanda-tanda yang lebih positif dan tingkat signifikansi yang lebih tinggi. Artinya, hasil model estimasi ini memberikan lebih banyak bukti mengenai pengaruh positif FDI yang mencari efisiensi terhadap kinerja perusahaan di Indonesia.

Tabel 11. Limphan FDI pada Nilai Tambah (*fixed-effect*).

Dependent Variable: Value-added

Industries	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Constant	2.490*** (0.17)	1.742*** (0.16)	2.723*** (0.18)	2.227*** (0.38)	2.649*** (0.27)	0.943*** (0.27)	-0.320 (1.29)	2.024*** (0.26)	2.525*** (0.50)
Capital	0.124*** (0.01)	0.105*** (0.01)	0.115*** (0.01)	0.107*** (0.02)	0.100*** (0.01)	0.147*** (0.01)	0.107* (0.04)	0.095*** (0.01)	0.122*** (0.02)
Labor	0.883*** (0.02)	1.002*** (0.02)	0.947*** (0.02)	1.014*** (0.04)	0.961*** (0.03)	1.008*** (0.03)	1.258*** (0.13)	1.052*** (0.03)	0.878*** (0.05)
Horizontal	-1.740*** (0.23)	-0.048 (0.07)	-3.074*** (0.15)	0.404*** (0.09)	0.325** (0.12)	0.023 (0.09)	1.225** (0.42)	0.519*** (0.12)	0.179 (0.14)
Vertical	0.484*** (0.08)	-0.185 (0.11)	-0.191 (0.10)	-0.987*** (0.24)	-0.450* (0.21)	0.008 (0.11)	0.606 (0.69)	-2.189*** (0.26)	-0.181 (0.25)
Exports	-0.101** (0.03)	-0.010 (0.03)	0.021 (0.02)	-0.170 (0.13)	0.001 (0.05)	-0.088 (0.06)	-0.143 (0.24)	-0.095 (0.08)	-0.030 (0.07)
1990-1997	0.155*** (0.02)	0.105*** (0.01)	0.001 (0.02)	0.203*** (0.04)	0.135*** (0.02)	0.027 (0.02)	0.070 (0.11)	0.169*** (0.02)	0.165*** (0.05)
1998-2002	0.061*** (0.02)	0.066*** (0.02)	-0.010 (0.02)	0.032 (0.04)	0.123*** (0.03)	-0.056** (0.02)	0.137 (0.10)	0.033 (0.03)	0.101 (0.05)
2003-2010	0.194*** (0.02)	0.186*** (0.02)	0.375*** (0.03)	0.216*** (0.04)	0.339*** (0.03)	-0.105*** (0.02)	0.385** (0.14)	0.216*** (0.03)	0.160** (0.06)

Tabel 12. Limphan FDI terhadap Produktivitas Faktor Total (*fixed-effect*).

Dependent Variable : Total Factor Productivity

	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Constant	4.743*** (0.02)	4.642*** (0.02)	4.981*** (0.03)	6.160*** (0.06)	6.163*** (0.04)	4.605*** (0.03)	4.504*** (0.18)	5.120*** (0.04)	4.293*** (0.09)
Horizontal	-2.163*** (0.25)	-0.113 (0.07)	-3.100*** (0.15)	0.457*** (0.09)	0.284* (0.13)	-0.136 (0.10)	0.743 (0.44)	0.616*** (0.13)	0.185 (0.14)
Vertical	0.522*** (0.09)	-0.298** (0.11)	-0.318** (0.10)	-1.223*** (0.26)	-0.610** (0.23)	-0.060 (0.11)	0.450 (0.70)	-2.687*** (0.29)	-0.257 (0.25)
Exports	-0.083* (0.04)	0.016 (0.03)	0.044* (0.02)	-0.126 (0.12)	0.022 (0.05)	-0.021 (0.07)	-0.034 (0.28)	-0.065 (0.08)	-0.018 (0.07)
1990-1997	0.155*** (0.02)	0.107*** (0.01)	0.006 (0.02)	0.240*** (0.04)	0.160*** (0.02)	0.022 (0.02)	0.092 (0.11)	0.184*** (0.02)	0.170*** (0.05)
1998-2002	0.067*** (0.02)	0.074*** (0.02)	0.035 (0.02)	0.079 (0.04)	0.192*** (0.03)	-0.059** (0.02)	0.084 (0.11)	0.038 (0.03)	0.118* (0.06)
2003-2010	0.241*** (0.03)	0.190*** (0.02)	0.411*** (0.03)	0.269*** (0.04)	0.448*** (0.04)	-0.106*** (0.03)	0.430** (0.14)	0.266*** (0.03)	0.177** (0.06)

Tabel 13. Limpahan FDI pada Nilai Tambah (*random-effect*).
Dependent Variable: Value-added

Industries	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Constant	0.044 (0.11)	0.774*** (0.07)	1.498*** (0.08)	0.676*** (0.20)	1.315*** (0.16)	-0.470** (0.17)	-1.020 (0.56)	0.480*** (0.14)	1.154*** (0.25)
Capital	0.237*** (0.01)	0.171*** (0.01)	0.176*** (0.01)	0.151*** (0.01)	0.180*** (0.01)	0.222*** (0.01)	0.172*** (0.04)	0.165*** (0.01)	0.192*** (0.01)
Labor	0.981*** (0.01)	1.013*** (0.01)	0.982*** (0.01)	1.106*** (0.03)	0.980*** (0.02)	1.062*** (0.02)	1.237*** (0.09)	1.109*** (0.02)	0.936*** (0.03)
Horizontal	-1.776*** (0.22)	-0.051 (0.06)	-2.881*** (0.14)	0.434*** (0.09)	0.275* (0.12)	-0.012 (0.09)	1.263** (0.41)	0.512*** (0.11)	0.147 (0.13)
Vertical	0.575*** (0.08)	-0.190 (0.10)	-0.097 (0.09)	-0.920*** (0.22)	-0.472* (0.19)	-0.001 (0.10)	0.194 (0.60)	-2.021*** (0.26)	-0.285 (0.23)
Exports	0.029 (0.03)	0.052* (0.02)	0.003 (0.02)	-0.133 (0.11)	0.075 (0.04)	0.015 (0.05)	-0.046 (0.20)	-0.060 (0.06)	-0.051 (0.05)
1990-1997	0.131*** (0.02)	0.086*** (0.01)	-0.007 (0.02)	0.192*** (0.04)	0.129*** (0.02)	-0.002 (0.02)	0.097 (0.10)	0.139*** (0.02)	0.154*** (0.05)
1998-2002	0.076*** (0.01)	0.071*** (0.02)	-0.020 (0.02)	0.035 (0.03)	0.151*** (0.02)	-0.046* (0.02)	0.217* (0.10)	0.040 (0.03)	0.099* (0.05)
2003-2010	0.241*** (0.02)	0.187*** (0.02)	0.381*** (0.02)	0.231*** (0.04)	0.370*** (0.03)	-0.064** (0.02)	0.440*** (0.13)	0.243*** (0.03)	0.136** (0.05)

Tabel 14. Limpahan FDI terhadap Produktivitas Faktor Total
(*random-effect*).

Dependent Variable : Total Factor Productivity

	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Constant	4.650*** (0.02)	4.624*** (0.02)	4.894*** (0.03)	6.067*** (0.05)	6.095*** (0.04)	4.606*** (0.03)	4.454*** (0.16)	5.106*** (0.04)	4.359*** (0.08)
Horizontal	-2.004*** (0.24)	-0.158* (0.06)	-3.047*** (0.14)	0.437*** (0.09)	0.288* (0.13)	-0.124 (0.10)	0.815 (0.43)	0.560*** (0.13)	0.135 (0.13)
Vertical	0.492*** (0.08)	-0.332** (0.11)	-0.297** (0.09)	-1.137*** (0.24)	-0.728*** (0.22)	-0.101 (0.11)	0.191 (0.63)	-2.586*** (0.29)	-0.386 (0.24)
Exports	0.116*** (0.03)	0.243*** (0.02)	0.134*** (0.02)	0.059 (0.11)	0.222*** (0.05)	0.138* (0.06)	0.106 (0.23)	0.135 (0.07)	0.078 (0.05)
1990-1997	0.159*** (0.02)	0.103*** (0.01)	0.001 (0.02)	0.236*** (0.04)	0.173*** (0.02)	0.017 (0.02)	0.099 (0.10)	0.169*** (0.02)	0.170*** (0.05)
1998-2002	0.089*** (0.02)	0.085*** (0.02)	0.023 (0.02)	0.078* (0.04)	0.216*** (0.03)	-0.056** (0.02)	0.123 (0.10)	0.039 (0.03)	0.107* (0.05)
2003-2010	0.258*** (0.02)	0.159*** (0.02)	0.388*** (0.02)	0.266*** (0.04)	0.461*** (0.04)	-0.091*** (0.02)	0.416** (0.13)	0.273*** (0.03)	0.119* (0.05)

BAB 4 PENUTUP

4.1 Meraup limbah produktivitas

Kajian ini menemukan beberapa bukti empiris limbah produktivitas investasi asing pada sektor manufaktur Indonesia selama periode 1990-2010. Limbah produktivitas terjadi baik melalui mekanisme horizontal maupun vertikal. Temuan tersebut nampak pada hasil analisis di tingkat subsektor industri (Tabel 11 dan Tabel 12). Temuan ini mendukung kajian dampak FDI yang menjelaskan bahwa karakteristik industri berperan penting dalam penerimaan dampak positif investasi asing.

Dampak positif limbah produktivitas melalui mekanisme horizontal muncul secara signifikan pada subsektor industri dengan tingkat teknologi tinggi (kode ISIC 34, 35, 37, dan 38). Namun demikian, berbeda dengan studi Temenggung [63], temuan dalam studi ini tidak terkait dengan faktor kapasitas penyerapan³⁴. Kesenjangan teknologi antara perusahaan asing dan domestik pada subsektor-subsektor industri tersebut diasumsikan lebih tinggi dibanding subsektor industri dengan tingkat teknologi lebih rendah.³⁵ Sehingga, salah satu

³⁴Studi Temenggung [63] menggunakan data tingkat perusahaan sektor manufaktur Indonesia periode 1975-2000. Penggunaan periode waktu yang berbeda mungkin memberikan hasil yang berbeda dalam kasus ini. Misalnya pada beberapa periode terakhir, mungkin terdapat beberapa perubahan pada struktur pasar sektor manufaktur Indonesia. Perlu diketahui bahwa studi ini menggabungkan penggunaan data backcast dalam datasetnya.

³⁵ Sebagai interpretasi alternatif, temuan ini menyiratkan bahwa penanaman modal asing di industri dengan tingkat teknologi yang lebih rendah cenderung menghasilkan tingkat teknologi yang serupa.

penjelasannya adalah faktor struktur pasar dari masing-masing subsektor industri.³⁶

Kehadiran perusahaan asing dapat meningkatkan efisiensi dan alokasi sumber daya di masing-masing subsektor industri domestik (kode ISIC 34, 35, 37, dan 38). Mekanisme umumnya diawali dengan dominasi pasar dan setelah itu memicu daya kompetisi dan efisiensi perusahaan domestik (*competition effects*). Alternatifnya, struktur pasar pada subsektor-subsektor industri tersebut pastilah sangat kompetitif, sehingga perusahaan asing menimbulkan dampak positif (*crowding-in*), melalui perpindahan pekerja dari perusahaan asing ke perusahaan domestik ataupun efek demonstrasi (*demonstration effects*).

Sebaliknya, pada subsektor industri lain (kode ISIC 31 dan 33) yang mengalami dampak negatif terhadap produktivitas, dominasi perusahaan asing telah menimbulkan efek *crowding-out*. Perusahaan asing mengalahkan pesaing domestik dalam perebutan pangsa pasar, atau menarik lebih banyak pekerja berketerampilan tinggi di subsektor industri tersebut. Lebih jauh lagi, ketika perusahaan asing menggantikan investasi dan pangsa pasar perusahaan domestik, masuknya perusahaan asing menyebabkan berkurangnya jumlah perusahaan di industri, khususnya perusahaan-perusahaan domestik yang tidak efisien. Dengan demikian, mereka menciptakan struktur industri yang lebih monopolistik (*anti-competition effects*).

Berbeda dengan limpahan produktivitas pada mekanisme horizontal, temuan pada mekanisme vertikal menunjukkan hanya sedikit industri terdampak positif

³⁶Untuk referensi lebih lanjut mengenai dampak struktur pasar terhadap dampak FDI pada sektor manufaktur di Indonesia, dapat mempelajari studi Jacob dan Meister [64].

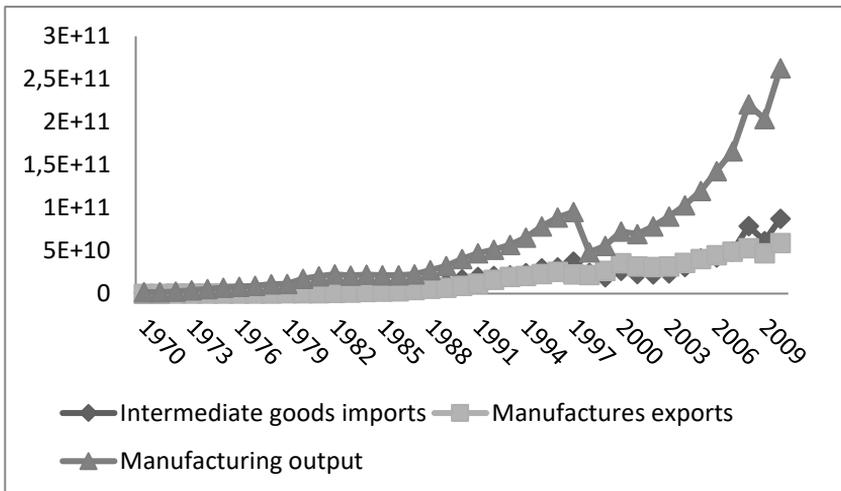
oleh hadirnya investasi asing. Dampak positif pada mekanisme vertikal hanya signifikan pada industri dengan kode ISIC 31; dan tanpa menunjukkan pola tingkatan teknologi tertentu. Salah satu penjelasan yang dapat diterima adalah tingkat keterkaitan vertikal industri – melalui hubungan rantai pasok – pada subsektor industri ini relatif lebih tinggi dibanding pada subsektor-subsektor industri manufaktur lainnya. Secara umum, penjelasan ini mengungkapkan lemahnya keterkaitan vertikal di sektor manufaktur Indonesia.

Alasan ini dibenarkan dalam penelitian Dhanani dan Hasnain [51] yang mengamati bahwa perusahaan asing membeli sebagian besar bahan baku, input, dan komponennya secara impor, yaitu sebesar 55 persen.³⁷ Persentase impor bahan mentah yang lebih tinggi terutama terlihat pada subsektor elektronik dan otomotif (80-90 persen), karena perusahaan-perusahaan di kedua subsektor tersebut hanya melakukan kegiatan perakitan.

Pada masa sebelum krisis, tercatat persentase impor bahan mentah oleh perusahaan asing meningkat dua kali lipat jika dibandingkan dengan perusahaan domestik. Selain itu, kecenderungan yang lebih tinggi dari perusahaan asing untuk mencari pemasok dari luar negeri terlihat jelas di semua subsektor industri, baik subsektor industri berteknologi rendah, seperti industri tekstil, garmen dan alas kaki, maupun subsektor industri berteknologi tinggi, seperti komponen elektronik dan komponen kendaraan bermotor. Hal ini juga menunjukkan semakin tinggi jumlah perusahaan asing di suatu industri, semakin tinggi pula kandungan impor produksi di industri tersebut.

³⁷ Pasca krisis moneter, pengadaan impor perusahaan asing bahkan meningkat menjadi 57 persen.

Penjelasan di atas ditunjukkan oleh pola pengadaan barang setengah jadi di sektor manufaktur. Data menunjukkan bahwa sebagian besar arus barang setengah jadi di sektor tersebut dipasok dari sumber impor (Gambar 4). Selama periode panjang 1970-2010, semakin tinggi output manufaktur, semakin tinggi pula impor barang setengah jadi. Rata-rata persentase impor barang setengah jadi terhadap output manufaktur tergolong tinggi, yaitu 47,62 persen pada periode substitusi impor (1970-1984), dan 35,98 persen pada periode promosi ekspor (1985-2010).³⁸ Selain itu, jumlah impor barang setengah jadi lebih tinggi dibandingkan ekspor manufaktur sepanjang periode 1970-2010, kecuali pada tahun 1999-2004 dan 2006-2007.



Gambar 5. Impor Barang Menengah Sektor Manufaktur Indonesia, 1970-2010.

Sumber: Database Bank Dunia.

³⁸Secara kasar, pada tahun 2000an, rata-rata pangsa bahan setengah jadi dan barang modal dari total impor adalah sekitar 90 persen. Hal ini berarti industri pendukung domestik masih kurang berkembang Negara dan Firdausy [47].

Hal ini berarti bahwa asumsi mengenai dampak positif vertikal yang diharapkan terlihat pada aliran barang setengah jadi dari perusahaan domestik ke perusahaan asing tidak berlaku dalam industri manufaktur di Indonesia. Hal ini disebabkan karena perusahaan-perusahaan asing relatif bergantung pada bahan baku impor untuk barang-barang setengah jadi. Perusahaan-perusahaan asing di sektor ini cenderung hanya memanfaatkan tenaga kerja berupah rendah di Indonesia. Argumen ini berlaku bagi perusahaan domestik terafiliasi asing yang menjalankan fungsi perakitan untuk perusahaan multinasional induknya, seperti di industri elektronik dan otomotif (kode ISIC 38).

Selain itu, kebijakan liberalisasi perdagangan yang mengurangi hambatan impor mungkin berdampak buruk pada rendahnya insentif bagi produsen domestik untuk memproduksi barang-barang setengah jadi. Kondisi ini telah mengurangi tingkat keterkaitan antara perusahaan asing dan domestik, yang merupakan mekanisme penting dalam limpahan teknologi.

Temuan di atas diperkuat oleh pengamatan Dhanani [49] yang menyatakan bahwa transfer teknologi asing di sektor manufaktur Indonesia tergolong moderat. Indikasi awal dari hal tersebut adalah kurangnya kemajuan dalam pengembangan pemasok domestik dan industri pendukungnya selama tahun 1990an, ketika sektor manufaktur berada pada puncak kinerjanya. Indikasi berikutnya adalah kurangnya pendalaman dan diversifikasi teknologi pada struktur industri perekonomian Indonesia selama periode 1985-1990.

Temuan penting lain dari kajian ini menyoroti bahwa perusahaan asing memperoleh manfaat lebih besar dari keberadaan investasi asing, baik secara hubungan

industri horizontal maupun vertikal. Hal ini merupakan isu yang menarik untuk dibahas.

Dalam kasus hubungan horizontal, hal ini dapat disebabkan oleh kapasitas belajar yang lebih tinggi dari perusahaan asing dalam mengadopsi teknologi baru ketika perusahaan asing lainnya memasuki industri tersebut. Perusahaan asing juga mungkin lebih mampu dibanding perusahaan domestik untuk bersaing dengan perusahaan asing lain.

Dalam kasus hubungan vertikal, perusahaan asing menerima manfaat lebih besar dari investasi asing sangat mungkin disebabkan karena perusahaan asing mempunyai kecenderungan untuk membuat hubungan rantai pasok dengan perusahaan asing lain karena persyaratan teknologi dan standar mutu yang tinggi. Atau, karena Perusahaan-perusahaan asing secara geografis terletak berdekatan satu sama lain, misalnya dalam lokasi kawasan industri yang sama.

Temuan kajian ini berbeda dengan studi terdahulu yang menyarankan pentingnya dampak vertikal, terutama dari mekanisme *backward linkage* [26,29,70]. Temuan ini merupakan kasus khusus yang disebabkan oleh rendahnya tingkat dampak vertikal akibat kurangnya hubungan vertikal antara perusahaan asing dan domestik di sektor manufaktur Indonesia.

Salah satu tujuan kajian ini adalah untuk menemukan bukti pengaruh berbagai jenis FDI terhadap tingkat output dan produktivitas sektor manufaktur Indonesia. Dalam hal ini, ada dua jenis investasi asing yang menjadi fokus penelitian: (1) jenis investasi asing yang bertujuan mengeksploitasi pasar negara penerima (*market-seeking FDI*) dan (2) jenis investasi asing yang

bertujuan memperoleh efisiensi produksi di negara penerima (*efficiency-seeking FDI*).

Keberadaan FDI yang bertujuan efisiensi diperkirakan akan menghasilkan kinerja perekonomian yang lebih baik, terutama melalui ekspansi ekspor [26,31,84]. Namun, hasil kajian ini mengenai pengaruh jenis FDI di tingkat subsektor industri hanya menemukan sedikit bukti yang mendukung prediksi tersebut (Tabel 11 dan Tabel 12, model efek tetap). Hal ini bukan karena asumsi di atas tidak tepat, namun lebih disebabkan karena karakteristik dari subsektor industri yang diteliti.

Berdasarkan estimasi pada Tabel 10 (model efek tetap), arah keseluruhan hasil menunjukkan bahwa *efficiency-seeking FDI* pada sektor manufaktur Indonesia tidak berkorelasi dengan kinerja perusahaan yang lebih baik di sektor tersebut. Dilihat dari estimasi lain, hasil kajian menunjukkan bahwa kinerja yang lebih baik di sektor manufaktur Indonesia berkorelasi dengan *market-seeking FDI*.

Hal ini dapat disebabkan oleh fakta bahwa proporsi utama investasi asing di sektor manufaktur Indonesia bukanlah tipe *efficiency-seeking FDI*, namun merupakan *market-seeking FDI*. Data distribusi jenis FDI antar industri yang disajikan pada Tabel 4 (di Bagian 3.1) menunjukkan bahwa fakta tersebut berlaku untuk periode yang panjang yaitu pada periode 1990-1996 dan 1997-2003. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan *market-seeking FDI*, keberadaan *efficiency-seeking FDI* di sektor manufaktur Indonesia mempunyai pengaruh yang relatif kecil untuk dipertimbangkan.

Tujuan lain dari kajian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh rezim kebijakan perdagangan terhadap tingkat output dan produktivitas sektor manufaktur Indonesia.

Dalam hal ini, terdapat dua rezim kebijakan perdagangan yang dipertimbangkan, yaitu rezim kebijakan perdagangan pada periode sebelum krisis (periode liberalisasi pertama) dan periode pasca krisis (periode liberalisasi kedua). Dampak liberalisasi perdagangan pada perekonomian Indonesia pada periode pasca krisis patut untuk dikaji, karena pada periode ini perekonomian sudah jauh lebih terbuka untuk menciptakan liberalisasi perdagangan bilateral dan regional.

Temuan-temuan dalam kajian ini menunjukkan bahwa dengan adanya dampak-dampak investasi asing sebagaimana dijelaskan sebelumnya, liberalisasi perdagangan berturut-turut membawa pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja seluruh subsektor manufaktur di Indonesia, kecuali pada industri mineral non-logam.

Temuan ini sebanding dengan penelitian sebelumnya yang menemukan dampak positif liberalisasi perdagangan [62, 64]. Namun, kajian ini hendak memperjelas dampak liberalisasi perdagangan pada periode pasca krisis. Dalam hal ini, temuan kajian menunjukkan bahwa dampak positif liberalisasi perdagangan pada periode pasca krisis lebih besar dibandingkan pada periode sebelum krisis, dan bahwa periode krisis menghambat dampak positif yang mungkin terjadi.

Perlu diingat bahwa temuan ini juga menguatkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa rezim kebijakan perdagangan terbuka menciptakan lebih banyak efisiensi dalam perekonomian, yang sebenarnya bermanfaat positif baik bagi perusahaan asing dan domestik dalam perekonomian [84,85]. Namun, terkait dengan temuan kajian ini bahwa perusahaan-

perusahaan asing di sektor manufaktur Indonesia mendapat manfaat lebih besar dari dampak limpahan produktivitas investasi asing selama periode penelitian, maka rezim kebijakan perdagangan yang lebih terbuka sebenarnya lebih menguntungkan perusahaan-perusahaan asing.

Penerapan liberalisasi perdagangan membawa keuntungan lebih bagi perusahaan-perusahaan asing di sektor manufaktur Indonesia, namun tidak melalui mekanisme keuntungan efisiensi ekspor sebagaimana dijelaskan dalam hipotesis Bhagwati [68]. Sebaliknya, liberalisasi perdagangan di Indonesia telah mendorong lebih banyak impor barang setengah jadi, sebagai bahan baku produksi dari banyak perusahaan asing di sektor manufaktur Indonesia yang tergolong *market-seeking FDI*.

4.2 Implikasi kebijakan dan agenda masa depan

Secara umum kajian dalam buku ini membuktikan bahwa dampak positif yang diharapkan dari masuknya investasi asing pada kinerja sektor manufaktur Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidaklah kuat. Bukti-bukti di tingkat subsektor industri manufaktur memberikan gambaran yang lebih jelas, dimana dampak hubungan horizontal lebih besar dibandingkan dampak hubungan vertikal.

Dampak masuknya investasi asing terhadap tingkat output dan produktivitas kemungkinan besar berkaitan dengan karakteristik tertentu dalam industri, seperti struktur pasar dan tingkat hubungan vertikal. Kajian ini juga menemukan bahwa liberalisasi perdagangan berturut-turut memberikan lebih banyak dampak positif.

Temuan kajian ini yang menyiratkan efek limpahan produktivitas FDI yang lebih kuat dari tipe hubungan

horizontal dibanding tipe hubungan vertikal merupakan hal menarik. Hal ini disebabkan oleh rendahnya hubungan vertikal antara perusahaan asing dan domestik di sektor manufaktur Indonesia.

Selain itu, berbeda dengan studi sebelumnya yang menyatakan bahwa *efficiency-seeking FDI* menghasilkan lebih banyak dampak positif, kajian ini menunjukkan bahwa jenis investasi asing sendiri tidak menentukan, khususnya ketika tingkat hubungan vertikal antara perusahaan asing dan domestik rendah. Dengan demikian, menegaskan bahwa dampak positif dari FDI bergantung pada jenis FDI dan karakteristik industri pada negara penerima.

Temuan-temuan di atas tidak seluruhnya mengejutkan, sebagian darinya telah diklarifikasi dalam studi-studi sebelumnya mengenai dampak-dampak investasi asing pada negara-negara berkembang. Namun temuan terpenting dari kajian ini mengungkapkan bahwa sepanjang periode 1990-2010, perusahaan-perusahaan asing lebih banyak memperoleh keuntungan dari kehadiran investasi asing. Sebuah paradoks terhadap harapan akan masuknya investasi asing.

Hal ini sebagian disebabkan oleh liberalisasi perdagangan dalam perekonomian. Liberalisasi perdagangan progresif dalam perekonomian telah memungkinkan perusahaan multinasional untuk melakukan produksi langsung secara efisien. Selain itu, disebabkan pula oleh lemahnya hubungan rantai pasok antara perusahaan asing dan perusahaan domestik, serta rendahnya kapasitas penyerapan teknologi dari perusahaan-perusahaan domestik. Untuk menanggapi permasalahan ini, kajian kebijakan dapat dilakukan.

Para pembuat kebijakan di Indonesia telah lama mendukung agenda pembangunan yang didorong FDI. Terkait dengan kebijakan FDI, sejak tahun 1970-an telah terdapat berbagai insentif keuangan dan fasilitas khusus lainnya yang ditawarkan untuk menarik lebih banyak FDI ke dalam perekonomian. Demikian pula pada rezim kebijakan perdagangan, sejak pertengahan tahun 1980an, pertengahan tahun 1990an dan setelah tahun 2000an yang jauh lebih liberal dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Namun, seperti disebutkan di bagian sebelumnya, manfaat penuh lebih dinikmati oleh perusahaan asing dibandingkan penduduk domestik. Hal ini terjadi karena para pembuat kebijakan tidak mempersiapkan ekosistem industri yang menyalurkan keuntungan dari masuknya modal asing ke perusahaan-perusahaan domestik.

Misalnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi ditambah beberapa paket insentif FDI berhasil menarik lebih banyak investasi asing di sektor manufaktur. Namun, perubahan mendadak dari kebijakan substitusi impor ke kebijakan peningkatan ekspor pada pertengahan tahun 1980an yang kemudian diikuti oleh beberapa liberalisasi progresif justru meningkatkan ketergantungan perekonomian pada investasi asing dan input bahan baku asing, dibandingkan upaya memperbesar peluang dan kemampuan produsen-produsen domestik. Bahkan, beberapa subsektor industri manufaktur terkena dampak *crowding out* dari investasi asing.

Krisis keuangan Asia yang terjadi pada akhir tahun 1990an, ketika perekonomian dan khususnya sektor manufaktur sedang berada pada puncak kinerjanya, telah memperburuk kondisi di atas. Namun perkembangan

terkini setelah masa krisis tidak menunjukkan adanya perbaikan terhadap permasalahan ini.

Faktanya, kebijakan perdagangan dan investasi telah lebih diliberalisasi untuk menarik lebih banyak penanaman modal asing. Sebaliknya, para pembuat kebijakan perlu mengalihkan fokus mereka dari menarik lebih banyak investasi asing kepada membangun ekosistem industri yang lebih mendukung penyerapan dampak positif FDI. Oleh karena itu, penting dan tepat waktu bagi agenda para pengambil kebijakan ke depan adalah mensinergikan kebijakan perdagangan dan investasi dengan kebijakan industri.

Secara khusus, beberapa inisiatif harus diambil untuk membangun hubungan yang lebih kuat antara perusahaan asing dan domestik, serta mengurangi ketergantungan perekonomian yang tinggi terhadap impor bahan-bahan setengah jadi. Dalam hal ini, tindakan pembatasan sementara terhadap impor barang setengah jadi dapat dipertimbangkan berdasarkan kebijakan perlindungan industri pemula (*infant industry*) pada subsektor industri tertentu.

Pengalaman dan strategi pembangunan Jepang dan negara-negara Macan Asia memberikan pelajaran yang baik. Pada tahap awal perkembangannya, negara-negara industri maju ini menerapkan kebijakan perdagangan khusus yang dicirikan sebagai upaya terkoordinasi untuk melindungi industri baru dan promosi ekspor [87]. Kedua kebijakan ini, bertentangan dengan literatur arus utama, saling sejalan. Keberhasilan program fasilitasi *infant industry* perlu didukung oleh program promosi ekspor yang berkelanjutan. Devisa yang diperoleh dari ekspor kemudian digunakan untuk meningkatkan kemampuan teknologi perusahaan domestik, dengan memperoleh

teknologi baru dalam bentuk mesin berteknologi tinggi, atau lisensi teknis dan konsultasi.

Pada gilirannya, program promosi ekspor memerlukan dukungan program industri bayi, agar dapat melanjutkan peningkatan industri ekspor. Dengan demikian, strategi pembangunan melibatkan kebijakan-kebijakan yang saling terkait dan bukan sekedar kebijakan perdagangan terbuka dan investasi. Dalam hal ini, pembangunan ekonomi memerlukan perbaikan terus-menerus terhadap struktur industri yang didasarkan pada pengembangan kemampuan teknologi, seringkali dengan bantuan perlindungan impor yang tepat, subsidi pemerintah, dan pembangunan ekosistem industri.

Agenda penting lainnya bagi para pengambil kebijakan adalah meningkatkan tingkat kemampuan teknologi manufaktur domestik. Hal ini penting untuk meningkatkan kelayakan produsen domestik untuk menjadi pemasok pilihan bagi perusahaan asing. Selain itu, hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas penyerapan perusahaan domestik, sehingga mereka dapat belajar lebih banyak dari perusahaan asing, melalui mekanisme rantai pasokan, peniruan, atau kompetisi.

Karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan insentif yang memfasilitasi peningkatan kemampuan teknologi produsen domestik, misalnya dalam penggunaan teknologi atau mesin baru. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dalam perekonomian, baik pada perguruan tinggi maupun lembaga vokasi.

Akhirnya, bagi para pembuat kebijakan di negara-negara berkembang, kajian ini dapat memberikan dua rekomendasi utama. Pertama, karena tidak ada jaminan dampak positif dari masuknya FDI, maka pembuat

kebijakan perlu lebih memperhatikan persyaratan yang mendorong terjadinya dampak-dampak positif yang diharapkan. Selain menerapkan kebijakan pertumbuhan yang didorong oleh investasi asing, perbaikan kualitas sumber daya manusia dan faktor-faktor kelembagaan juga diperlukan untuk meningkatkan kapasitas penyerapan negara penerima. Kedua, para pembuat kebijakan perlu menerapkan pendekatan terkoordinasi dalam kebijakan perdagangan dan industri mereka untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penanaman modal asing.

Selanjutnya, meskipun ada beberapa wawasan tambahan mengenai dampak FDI yang ditawarkan dalam kajian ini, terutama dalam meninjau kembali hubungan antara FDI dan kebijakan perdagangan di negara-negara berkembang, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan.

Pertama, dari segi metodologi dan data, penelitian ini tidak membedakan jenis investasi asing yang beroperasi di negara penerima, yakni antara FDI (M&A) *greenfield* dan *brownfield*. Diasumsikan bahwa investasi *greenfield* di negara-negara berkembang membawa dampak yang lebih positif, karena adanya tambahan kapasitas produksi yang terkait dengannya. Oleh karena itu, akan bermanfaat bagi penelitian ke depan untuk memasukkan pertimbangan ini, guna mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai kemungkinan dampak-dampaknya terhadap perekonomian penerima.

Kedua, kajian dalam buku ini menunjukkan bahwa struktur pasar industri penerima berperan penting dalam mempengaruhi dampak FDI. Struktur pasar industri penerima mungkin perlu mendapat lebih banyak perhatian dalam menciptakan kondisi yang mendukung agar dampak positif horizontal dapat diterapkan. Namun,

model estimasi penelitian ini tidak dapat mengungkap bukti lebih lanjut mengenai masalah tersebut. Oleh karena itu, masalah khusus ini harus diatasi untuk agenda penelitian ke depan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Ringkasan Studi Empiris Dampak FDI di Negara Berkembang.*

Dampak	Metodologi dan data	Periode	Temuan	Penulis
Pertumbuhan keluaran	Panel, tingkat industri (25 negara berkembang)	1990-2000	- Campuran - FDI yang mencari efisiensi membawa efek pertumbuhan positif yang lebih besar daripada FDI yang mencari pasar	Nunnenkamp dan Spatz (2003)
	Panel, tingkat industri (47 ekonomi termasuk 27 ekonomi berkembang)	1981-1999	- Negatif untuk sektor primer - Positif untuk sektor sekunder - Tidak meyakinkan untuk sektor tersier	Alfaro (2003)
	Panel, tingkat perusahaan (48 negara berkembang)	1983-1996	Positif untuk perusahaan dengan orientasi ekspor dan perdagangan intra-perusahaan tingkat tinggi	Feinberg dan Keane (2005)
	Panel, tingkat industri	1990-2004	- Positif untuk sektor primer dan sekunder, sektor	Vu, dkk. (2008)

	(Cina, Vietnam)		sekunder paling diuntungkan - Tidak meyakinkan untuk sektor tersier	
Limpahan produktivitas	Panel, tingkat industri (Cina)	1988-1994	Positif untuk sektor manufaktur tertentu, tidak meyakinkan untuk manufaktur lainnya	Chen dan Demurger (2002)
	Panel, tingkat perusahaan (transisi ekonomi)	1994-1999	- Positif - Efek langsung (ke afiliasi sendiri) signifikan di lima dari sepuluh ekonomi dan lebih besar daripada efek luapan - Limpahan vertikal lebih besar dari limpahan horizontal	Damijan, dkk. (2001)
	Panel, tingkat industri (35 OECD dan ekonomi berkembang)	1987-2002	Positif untuk industri tertentu dan ekonomi berkembang, khususnya di mana FDI bertepatan dengan investasi tinggi dan orientasi ekspor	Fillat dan Woerz (2010)

Lampitan 1b. Rangkuman Studi Empiris Dampak FDI di Negara Berkembang, lanjutan.

Dampak	Metodologi dan data	Periode	Temuan	Pengarang
Limpahan produktivitas intra-industri atau horizontal**	Cross-sectional, tingkat industri (Meksiko)	1970, 1970/75	Positif	Blomstrom dan Persson (1983); Blomstrom (1986); Blomstrom dan Wolff (1994); Kokko (1994); Kokko (1996)
	Cross-sectional, tingkat perusahaan (Uruguay)	1990	Tidak meyakinkan	Kokko, dkk. (1996)
	Cross-sectional, tingkat perusahaan (Taiwan)	1991	Positif	Chuang dan Lin (1999)
	Cross-sectional, tingkat perusahaan (Uruguay)	1988	Tidak meyakinkan	Kokko, dkk. (2001)
	Cross-sectional, tingkat industri (Cina)	1995	Positif	Li, dkk. (2001)
	Tingkat panel, perusahaan dan industri (Maroko)	1985-1989	Tidak meyakinkan	Haddad dan Harrison (1993)

Panel, tingkat perusahaan (Venezuela)	1976-1989	Negatif	Aitken dan Harrison (1999)
Panel, tingkat perusahaan (India)	1976-1989	Tidak meyakinkan	Katuria (2000)
Panel, tingkat industri (Kolombia)	1974-1998	Tidak meyakinkan	Kugler (2001)

Lampiran 1c. Rangkuman Studi Empiris Dampak FDI di Negara Berkembang, lanjutan.

Dampak	Metodologi dan data	Periode	Temuan	Pengarang
	Panel, tingkat perusahaan (Ceko)	1993-96	Negatif	Djankov dan Hoekman (2000)
	Panel, tingkat perusahaan (Polandia)	1993-97	Negatif	Zukowska-Gagelmann (2000)
	Panel, tingkat perusahaan (Ceko)	1995-98	Tidak meyakinkan	Kinoshita (2001)
	Panel, tingkat perusahaan (Hongaria)	1993-97	Tidak meyakinkan	Boscho (2001)
	Panel, tingkat perusahaan (Bulgaria, Polandia, Rumania)	1993-97	- Negatif untuk Bulgaria dan Rumania - Tidak meyakinkan untuk Polandia	Konings (2001)

Limpahan produktivitas antar-industri atau vertikal**	Panel, tingkat perusahaan (8 ekonomi transisi)	1994-98	- Negatif atau tidak meyakinkan - Positif hanya untuk Rumania	Damijan, dkk. (2001)
	Panel, tingkat perusahaan (Meksiko)	1993-1999	Negatif, tidak meyakinkan	Lopez-Cordova (2002)
	Panel, tingkat perusahaan (Ghana)	1991-1997	Positif	Gorg dan Strobl (2002)
	Panel, tingkat perusahaan (Lituania)	1996-2000	Tidak meyakinkan	Smarzynska-Javorcik (2002)
	Panel, tingkat industri (Kolombia)	1974-98	- Positif untuk limbah ke belakang. - Tidak ada hasil untuk limbah ke depan	Kugler (2001)
	Panel, tingkat perusahaan (Lituania)	1996-2000	- Positif untuk limbah ke belakang. - Tidak ada hasil untuk limbah ke depan	Smarzynska-Javorcik (2002)

Lampiran 1d. Rangkuman Studi Empiris Dampak FDI di Negara Berkembang, lanjutan.

Dampak	Metodologi dan data	Periode	Temuan	Pengarang
Limpahan upah**	Panel, tingkat industri (Meksiko)	1984-1990	Negatif	Aitken, dkk. (1996)
	Panel, tingkat industri (Venezuela)	1977-1989	Negatif	Aitken, dkk. (1996)
Limpahan ekspor**	Cross-sectional, tingkat perusahaan (Meksiko)	1986-1989	Positif	Aitken, dkk. (1997)
	Panel, tingkat perusahaan (Uruguay)	1998	Tidak meyakinkan	Kokko, dkk. (2001)
	Panel, tingkat industri (India)	1994-2000	Positif	Banga (2003)

*Ringkasan ini tidak termasuk studi tentang Indonesia, karena akan disajikan secara terpisah pada Lampiran 2.

** Disusun dari Gorg dan Greenaway (2004).

Lampiran 2. Ringkasan Studi Empiris Dampak FDI di Indonesia.

Dampak	Metodologi dan data	Periode	Temuan	Pengarang
Pertumbuhan keluaran	Panel, sektoral	1997-2006	Negatif pada sektor pertambangan, positif pada beberapa sektor manufaktur	Khaliq dan Noy (2007)
	Panel, agregat	1970-2000	Positif	Bachtiar (2003)
Limpahan produktivitas	Panel, agregat	1975-1985	Tidak meyakinkan	Aswiyono (1998)
	Panel, tingkat perusahaan	1986-2000	Dampak positif hanya terjadi pada FDI yang berasal dari Jepang dan negara-negara kurang berkembang di Asia Timur, sedangkan FDI di negara-negara non-Asia tidak mempunyai dampak yang signifikan.	Takii (2007)
	Panel, tingkat perusahaan, sektor manufaktur	1975-2000	Positif, khususnya di sektor padat karya dan selama	Temenggung (2006)

	Panel, tingkat perusahaan	1980-1996	periode pasca liberalisasi perdagangan Dampak negatifnya baik pada masa pra-liberalisasi perdagangan maupun pasca-liberalisasi perdagangan	Yakub dan Meister (2005)
	Panel, tingkat perusahaan	1995-2005	Dampak positif terhadap limpahan horizontal dan ke depan. Namun, hanya sedikit bukti yang menunjukkan adanya dampak ke belakang. Positif	Negara dan Firdausy (2011)
Limpahan produktivitas intra-industri atau horizontal	Cross-sectional, tingkat perusahaan	1991	Positif	Blomstorm dan Sjöholm (1999)
	Cross-sectional, tingkat perusahaan	1980-1991	Positif	Sjöholm (1999)
Limpahan produktivitas antar-	Panel, tingkat perusahaan	1988-1996	Positif	Blalock dan Gertler (2005)

industri atau vertikal				
Pekerjaan	Panel, tingkat perusahaan, sektor manufaktur	1975-2005	Positif	Lipsev, dkk. (2010)

REFERENSI

- (1) O'Rourke K.H. dan Williamson J.G. When did globalization begin? *NBER Working Paper*. April 2000; 7632.
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w7632/w7632.pdf.
- (2) Smith A. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: W. Strahan; 1776.
- (3) Ricardo D. *On the Principles of Political Economy and Taxation*. London: John Murray, Albemarle-Street; 1817.
- (4) Chang H.J. Globalization, transnational corporations, and economic development: can the developing countries pursue strategic industrial policy in a globalizing world economy? Dalam Baker D, Epstein G, Pollin R. (eds.) *Globalization and Progressive Economic Policy*, Cambridge: Cambridge University Press; 1998. p.97-113. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511599095>.
- (5) Brakman S., Garretsen H. *Foreign Direct Investment and the Multinational Enterprise*. London: MIT Press; 2008. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262026451.001>.
- (6) Pollin R. Globalization and the transition to egalitarian development. *PERI Working Paper Series*. 2002; Number 42. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.341761>.
- (7) Crotty J., Epstein G., Kelly P. Multinational corporations in the neo-liberal regime. Dalam Baker D, Epstein G, Pollin R. (eds.) *Globalization and Progressive Economic Policy*, Cambridge: Cambridge University Press; 1998.
- (8) Baker D., Epstein G., Pollin R. Introduction. Dalam Baker D, Epstein G, Pollin R. (eds.) *Globalization and Progressive Economic Policy*, Cambridge: Cambridge University Press; 1998.

- (9) Ietto-Gillies G. *Transnational Corporations and International Production: Concepts, Theories and Effects*. Cheltenham: Edward Elgar; 2005.
- (10) Narula R. Multinational firms, regional integration and globalising markets: implications for developing countries. *MERIT, Infonomics Research Memorandum Series*. 2001; 036.
- (11) Goldberg P.K. dan Pavcnik N. Distributional effects of globalization in developing countries. *NBER Working Paper*. February 2007; 12885. <https://doi.org/10.3386/w12885>.
- (12) Garner B.A. *Black Law Dictionary*. St. Paul, MN: Thomson Reuters; 2014.
- (13) Sornarajah M. *The International Law on Foreign Investment*. New York: Cambridge University Press; 2010.
- (14) Forsgren M. *Theories of the Multinational Firm: A Multidimensional Creature in the Global Economy*. Cheltenham: Edward Elgar; 2008.
- (15) Gorg H dan Greenaway D. Much ado about nothing? Do domestic firms really benefit from foreign direct investment? *The World Bank Research Observer*. 2004; Vol. 19, No. 2. <https://doi.org/10.1093/wbro/lkh019>.
- (16) Lall S. dan Narula R. Foreign direct investment and its role in economic development: Do we need a new agenda? Dalam R. Narula and S. Lall (eds.) *Understanding FDI-Assisted Economic Development*, New York: Routledge; 2006.
- (17) Rugraff E., Sanchez-Ancochea D., Sumner A. What do we know about the developmental impacts of TNCs? Dalam Rugraff E., Sanchez-Ancochea D., Sumner A (eds.) *Transnational Corporations and Development Policy: Critical Perspectives*, London: Palgrave Macmillan; 2009. p. 29-58.

- (18) Caves R.E. *Multinational Enterprise and Economic Analysis*. New York: Cambridge University Press; 2007.
- (19) Aitken B.J. dan Harrison A.E. Do domestic firms benefit from direct foreign investment? Evidence from Venezuela. *American Economic Review*. 1999; Vol. 89, Issue 3. p.605-618. <https://doi.org/10.1257/aer.89.3.605>.
- (20) Konings J. The effects of foreign direct investment on domestic firms: Evidence from firm-level panel data in emerging economies. *Economics of Transition and Institutional Change*. November 2001; Vol. 9, Issue 3. <https://doi.org/10.1111/1468-0351.00091>.
- (21) Kokko A. Technology, market characteristics, and spillovers. *Journal of Development Economics*. 1994; 43. p.279-93. [https://doi.org/10.1016/0304-3878\(94\)90008-6](https://doi.org/10.1016/0304-3878(94)90008-6).
- (22) Damijan J.P., Majcen B., Knell M., Rojec M. The role of FDI, R&D accumulation and trade in transferring technology to transition countries: Evidence from firm panel data for eight transition countries. *UN Economic Commission for Europe*; 2001. http://www.eadi.org/fileadmin/WG_Documents/Reg_WG/damijan.pdf.
- (23) Findlay R. Relative backwardness, direct foreign investment, and the transfer of technology: A simple dynamic model. *The Quarterly Journal of Economics*. 1978; Vol. 92, Issue 1. p.1-16. <http://hdl.handle.net/10.2307/1885996>.
- (24) Glass A.J. dan Saggi K. International technology transfer and the technology gap. *Journal of Development Economics*. 1998; Vol. 55, Issue 2. p.369-398. [https://doi.org/10.1016/S0304-3878\(98\)00041-8](https://doi.org/10.1016/S0304-3878(98)00041-8).

- (25) Markusen J.R. dan Rutherford T.F. Learning on the quick and cheap: Gains from trade through imported expertise. *NBER Working Paper*. January 2005; No. w10603. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.739588>.
- (26) Fillat C. dan Woerz J. Good or bad? The influence of FDI on productivity growth: An industry-level analysis. *The Journal of International Trade and Economic Development*. 2011; Vol. 20 Issue 3. <https://doi.org/10.1080/09638190903003010>.
- (27) Moran T.H. How does FDI affect host country development? Using industry case studies to make reliable generalizations. Dalam Moran TH, Graham EM, Blomstrom M (eds.) *Does Foreign Direct Investment Promote Development?* Washington, DC: Institute for International Economics and Center for Global Development; April 2005.
- (28) Kugler M. Spillovers from foreign direct investment: Within or between industries? *Journal of Development Economics*. August 2006; Vol. 80 Issue 2. p.444-477. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2005.03.002>.
- (29) Blalock G., Gertler P.J. Foreign direct investment and externalities: The case for public intervention. Dalam Moran TH, Graham EM, Blomstrom M (eds.) *Does Foreign Direct Investment Promote Development?* Washington, DC: Institute for International Economics and Center for Global Development; April 2005.
- (30) Smarzynska B.K. Does foreign direct investment increase the productivity of domestic firms? In search of spillovers through backward linkages. *Policy Research Working Paper, The World Bank Development Research Group*. October 2002; 2923. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-2923>.

- (31) Nunnenkamp P., Spatz J. Foreign direct investment and economic growth in developing countries: How relevant are host-country and industry characteristics? *Kiel Working Paper*. 2003; No. 1176. <https://hdl.handle.net/10419/3028>.
- (32) Alfaro L. Foreign direct investment and growth: does the sector matter? *Harvard Business School Working Paper*. 2003.
- (33) Vu T.B., Gangnes B., Noy I. Is foreign direct investment good for growth? Evidence from sectoral analysis of China and Vietnam. *Journal of the Asia Pacific Economy*. 2008; Vol. 13 Issue 4. p. 542-562. <https://doi.org/10.1080/13547860802364976>.
- (34) Grossman G.M., Helpman E. *Innovation and Growth in the Global Economy*. London: MIT Press; 1992.
- (35) Sachs J.D., Warner AM. *Natural Resource Abundance and Economic Growth*. NBER Working Paper. 1995; 5398.
- (36) UNCTAD. *World Investment Report: Cross-border Mergers and Acquisitions and Development*. Geneva: United Nations; 2000.
- (37) Cowling K. and Sugden R. *Transnational Monopoly Capitalism*. Brighton: Wheatsheaf; 1987.
- (38) Blonigen B.A. A review of the empirical literature on FDI determinants. *Atlantic Economic Journal*. November 2005; Vol. 33 Issue 4. p.383-403. <https://doi.org/10.1007/s11293-005-2868-9>
- (39) Cantwell J.A. The Relationship Between International Trade and International Production. Dalam Greenaway D, Winters LA (eds.) *Surveys in International Trade*, Oxford: Basil Blackwell; 1994. p.303-28.
- (40) Cohen S.D. *Multinational Corporations and Foreign Direct Investment: Avoiding Simplicity, Embracing Complexity*. New York: Oxford University Press; 2007.

- (41) Pangestu M. dan Anas T. Foreign investment and development: Indonesia's experience. Dalam Urata S, Yue CS, and Kimura F (eds.) *Multinationals and Economic Growth in East Asia: Foreign Direct Investment, Corporate Strategies and National Economic Development*, New York: Routledge; 2006. p.253-286.
- (42) Hartono S. *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Bandung: Binatjipta; 1972.
- (43) Ibrahim H. *Direct Foreign Investment in Indonesian Manufacturing: A Bargaining Approach*. Michigan: University Microfilms International; 1984.
- (44) Marsudi T. et al. *A Study on the Investment Law of Indonesia from the Perspective of the Strategy for Economic Development*. Seoul: Korea Legislation Research Institute; 2011.
- (45) Rachbini D.J. *Arsitektur Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Index; 2008.
- (46) Ilmar A. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Kencana; 2010.
- (47) Negara S.D. dan Firdausy C.M. The development of foreign direct investment and its impact on firm's productivity, employment and exports in Indonesia. Dalam Sussangkarn C, et al. (eds.) *Foreign Direct Investments in Asia*, New York: Routledge; 2011. p.18-50.
- (48) Hill H. *The Indonesian Economy*. Cambridge: Cambridge University Press; 2000.
- (49) Dhanani S. *Indonesia: Strategy for Manufacturing Competitiveness*. UNIDO; 2000.
http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Publications/Pub_free/Indonesia_strategy_for_manufacturing_competitiveness.pdf.

- (50) Kurniati Y., Prasmuko A., Yanfitri. Determinan FDI: Faktor-Faktor yang Menentukan Investasi Asing Langsung. *Bank of Indonesia Working Paper*. 2007; 6. <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/3B101DCB-5196-4D7E-8648-F8BE1C2D7BA3/20772/WP200706.pdf>.
- (51) Dhanani S. dan Hasnain S.A. The impact of foreign direct investment on Indonesia's manufacturing sector. *Journal of the Asia Pacific Economy*. 2002; Vol. 7 Issue 1. p.61-94. <https://doi.org/10.1080/13547860120110470>.
- (52) Urata, S. A shift from market-led to institution-led regional economic integration in East Asia. Paper presented at *Conference on Asian Economic Integration, Research Institute of Economy, Trade and Industry, United Nations University*. 2002. <http://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/04e012.pdf>.
- (53) Urata, S. "FDI Flows, Their Determinants, and Economic Impacts in East Asia." Dalam *Multinationals and Economic Growth in East Asia: Foreign Direct Investment, Corporate Strategies and National Economic Development*, ed. Shujiro Urata, Chia Siow Yue and Fukunari Kimura, 21-64. New York: Routledge; 2006.
- (54) Yamazawa I., Urata S. Trade and Investment Liberalization and Facilitation. Dalam Yamazawa I (eds.) *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC): Challenges and Tasks for the Twenty-first Century*, London: Routledge; 2001. p.51-89.
- (55) Kimura F. dan Ando M. Japanese Manufacturing FDI and International Production and Distribution Networks in East Asia. Dalam Urata S, Yue CS, Kimura F (eds.) *Multinationals and Economic Growth in East Asia: Foreign Direct Investment, Corporate Strategies and*

- National Economic Development*, New York: Routledge; 2006. p.65-104.
- (56) Kwak J.S. *Korean OFDI: Investment Strategies and Corporate Motivations for Investing Abroad*. Santiago: United Nations; 2007. <http://www.eclac.org/publicaciones/xml/1/32611/lcl2804i.pdf>.
- (57) Lipsey R.E. U.S. firms and East Asian development in the 1990s. Dalam Urata S., Yue C.S., Kimura F. (eds.) *Multinationals and Economic Growth in East Asia: Foreign Direct Investment, Corporate Strategies and National Economic Development*, New York: Routledge; 2006. p.105-130.
- (58) Bachtiar I. *Development Stages and Foreign Direct Investment: an Analysis of Indonesia's Recent Experiences*. Unpublished PhD dissertation, Department of Economics, Colorado State University; 2003.
- (59) Khaliq A. dan Noy I. Foreign direct investment and economic growth: Empirical evidence from sectoral data in Indonesia. *University of Hawaii Working Paper*. 2007; Vol. 07 Issue 26. http://www.economics.hawaii.edu/research/workingpapers/WP_07-26.pdf.
- (60) Aswicahyono H. *Total Factor Productivity in Indonesian Manufacturing, 1975-1993*. Unpublished PhD dissertation, Australian National University; 1998.
- (61) Takii S. dan Ramstetter E. Foreign multinationals in Indonesian manufacturing, 1985-1998: Shares, relative size and relative labor productivity. *ICSEAD Working Paper*. 2000; 18. http://file.icsead.or.jp/user03/926_170.pdf.
- (62) Takii S. Productivity spillovers and characteristics of foreign multinational plants in Indonesian manufacturing 1990-1995. *ICSEAD Working Paper*. 2001;

14. http://file.icsead.or.jp/user03/828_210_20110621150321.pdf.
- (63) Temenggung D. Productivity spillovers from foreign direct investment: Indonesian manufacturing industry's experience, 1975-2000." Research School of Pacific and Asian Studies, ANU Working Paper. 2006. http://www.degit.ifw-kiel.de/papers/degit_12/C012_048.pdf.
- (64) Jacob J. dan Meister C. Productivity gains, technology spillovers and trade: Indonesian manufacturing, 1980-96. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 2005; Vol. 41 Issue 1. p. 37-56.
- (65) Hanson G.H. dan Harrison A. Trade liberalization and wage inequality in Mexico. *ILR Review*. 1999; Vol. 52 Issue (2). p.271-288. <https://doi.org/10.1177/001979399905200207>.
- (66) Rodriguez F. dan Rodrik D. Trade policy and economic growth: A skeptic's guide to the cross-national evidence. Dalam Bernanke BS, Rogoff K (eds.) *NBER Macroeconomics Annual*. Cambridge: MIT Press; 2000. p.261-338.
- (67) Weerasinghe P.N. Trade policy openness and economic performance: Cross-country evidence. *Central Bank of Sri Lanka Staff Studies*. 2005; Vol. 35, Nos. 1 & 2.
- (68) Bhagwati J. *Foreign trade regimes and economic development: Anatomy and consequences of exchange contrast regimes*. Cambridge, MA: Ballinger Publishing Company; 1978.
- (69) Krueger A.O. *Foreign Trade Regimes and Economic Development: Liberalization Attempts and Consequences*. Cambridge, MA: NBER Books; 1978.

- (70) Sachs J.D. dan Warner A.M. Economic reform and the process of global integration. *Brooking Papers on Economic Activity*. 1995; 1.
- (71) Javorcik B.S. Does foreign direct investment increase the productivity of domestic firms? In search of spillovers through backward linkages. *American Economic Review*. 2004; Vol. 94 Issue 3. p.605-627. <https://doi.org/10.1257/0002828041464605>.
- (72) Verdoorn P.J. Fattori che regolano lo sviluppo della produttività del lavoro. *L'Industria*. 1949; 1. p. 3-10.
- (73) Saggi K. "Trade, Foreign Direct Investment, and International Technology Transfer: A Survey." *World Bank Research Observer*. 2002;17 (2): 191-235.
- (74) Kaldor N. *Causes of the Slow Rate of Economic Growth of the United Kingdom*. London: Cambridge University Press; 1966.
- (75) McCombie J.S.L dan Thirlwall A.P. *Economic Growth and the Balance-of-Payments Constraint*. London: Palgrave Macmillan; 1994. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-23121-8>.
- (76) Cohen W. dan Levin R. Empirical studies of innovation and market structure. Dalam Schmalensee RC, Willig R (eds.) *Handbook of Industrial Organization*. Amsterdam: Elsevier; 1989. p.1059-1107.
- (77) Moulton B.R. An illustration of a pitfall in estimating the effects of aggregate variables on micro unit. *The Review of Economics and Statistics*. MIT Press. 1990; Vol. 72 Issue 2. p.334-338. <https://doi.org/10.2307/2109724>.
- (78) Griliches Z. dan Mairesse J. Production function: The search for identification. Dalam Steinar Strom (eds.) *Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium*. Cambridge MA: Cambridge University Press; 1999. p.169-203.

- (79) Olley G.S. dan Pakes A. The dynamics of productivity in the telecommunication equipment industry. *Econometrica*. 1996; Vol. 64 Issue 6. p.1263-1297. <https://doi.org/10.2307/2171831>.
- (80) Levinsohn J., Petrin A. Estimating production functions using inputs to control for unobservable. *Review of Economics Studies*. 2003; Vol. 70 Issue 2. p.317-341. <https://doi.org/10.1111/1467-937X.00246>.
- (81) Petrin A., Poi A., Levinsohn J. Production function estimation in Stata using inputs to control for unobservables. *Stata Journal*. 2004; Vol. 4 Issue 2. p.113-123.
- (82) Aswicahyono H. A survey of micro-data analyses in Indonesia. Dalam Corbett J, Umezaki S (eds.) *Deepening East Asian Economic Integration*. ERIA Research Project Report, 1. 2008. p.456-472. http://www.eria.org/publications/research_project_reports/deepening-east-asian-economic-integration.html.
- (83) Booth A. *The Historical Development of the Indonesian Statistical System*. Hitotsubashi University Repository. 2001. <http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/14674/1/DP99-39.pdf>.
- (84) Lipsey R.E. dan Sjöholm F. Foreign firms and Indonesian manufacturing wages: an analysis with panel data. *NBER Working Paper*. 2002; 9417.
- (85) Feinberg S.E. dan Keane M.P. Intrafirm trade of US MNCs: findings and implications for models and policies towards trade and investment. Dalam Moran TH, Graham EM, Blomstrom M (eds.) *Does Foreign Direct Investment Promote Development?* Washington, DC: Institute for International Economics and Center for Global Development; April 2005.

- (86) Balasubramanyam V., Salisu M., Sapsford D. Foreign direct investment and growth in EP and IS Countries. *Economic Journal*, Royal Economic Society. 1996; Vol. 106 Issue 434. p.92-105. <https://doi.org/10.2307/2234933>.
- (87) Kohpaiboon A. Vertical and Horizontal FDI Technology Spillovers: Evidence from Thai Manufacturing. Dalam Corbett J, Umezaki S (eds.) *Deepening East Asian Economic Integration*. ERIA Research Project Report 2008-1. Jakarta: ERIA; 2009. p.314-355.
- (88) Chang H.J. *The East Asian Development Experience: The Miracle, the Crisis and the Future*. London: Zed Books; 2006.

TENTANG PENULIS



Dr. Wahyudi Wibowo, S.T., M.M.

Blog: <https://wibowowahyudi.wordpress.com>

Blog: <https://www.kompasiana.com/wahyudi13628>

NIDN: 0715047402

Scopus ID: 57794557000; ORCID: 0000-0001-5479-1555;

WOS ID: GPK-0909-2022; Publon ID: 5416529;

Google Scholar ID: UFzG7zYAAAAJ; SSRN ID: 1640771;

Sinta ID: 5983771; Garuda ID: 3636777

Penulis saat ini berkarya sebagai dosen tetap pada Fakultas Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (<http://ukwms.ac.id>). Pengalaman lain yang pernah dijalani adalah selaku anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Jawa Timur pada periode 2014-2019 dan anggota Pokja Kesehatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2024.

Penulis pernah terlibat dalam beberapa proyek penelitian dan konsultasi di beberapa lembaga seperti TFO Canada, JICA Indonesia, GIZ Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan Borneo Institute. Bidang penelitian yang ditekuni meliputi pembangunan

ekonomi yang berkelanjutan, rantai nilai global, dan ekonomi internasional. Selain itu, penulis kerap menyumbangkan gagasan di media massa.

Buku pertama yang dipublikasikannya berisi senarai pemikiran tentang berbagai persoalan dalam perekonomian Indonesia. Buku berjudul “Perekonomian Indonesia: Mengelola Tantangan Menuju Indonesia Tangguh, Tumbuh dan Berkeadilan” tersebut terbit pada tahun 2022.

Penulis menyelesaikan pendidikan terakhir dari program Doctor of Economics, International Trade and Commerce Department, Kyungsoong University, Korea Selatan. Gelar Magister Manajemen diraih dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Jakarta, dan Sarjana Teknik diraih dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya. Selaku pengajar dan peneliti pernah bertugas sebagai Visiting Fellow di beberapa kampus mitra di luar negeri, seperti University of San Carlos, Filipina (2015), Kyungsoong University, Korea Selatan (2020), serta Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology, Malaysia (2022).

Buku ini mengajak para pembuat kebijakan dan pelaku industri di Indonesia untuk mengevaluasi kembali strategi pembangunan yang berorientasi pada penerimaan modal asing. Strategi ke depan sebaiknya lebih fokus pada pengembangan rantai pasok antara perusahaan asing dan domestik.

ISBN 978-623-161-345-5



Pustaka Aksara